TAHUN
2021

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE

*"AKSELERASI EKONOMI SERTA PENGUATAN KAPASITAS SOSIAL DAN KESEHATAN MASYARAKAT"*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan Rahmat dan Karunia yang telah dianugerahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bone dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bone. Laporan ini juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah di semua tingkatan, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Demikian pengantar ini, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bone Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 serta menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Watampone, 28 Maret 2022

**BUPATI BONE**

**Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

# KALEIDOSKOP 2021

**Januari**
Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Selatan

**Januari**
LHKPN

**Juli**
BI

**Februari**
BPK

**Juni**
Pelepasan STQH

**Februari**
PEMBUKAAN BIMTEK LPPD

**Maret**
Evalusasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

**Mei**
Pembukaan MTQ

**Maret**
Kunjungan Mentri Perhubungan

**April**
Peresmian Asrama Kabupaten Wajo

**April**
Hari Otonomi Daerah

Januari

Februari

Maret

A p r i l

Mei

Juni

Juli

**Agustus**
Kunjungan Jubir Presiden

**Agustus**

**Agustus**
Pemberian Remisi

**Juli**
Operasi Yustisi

**September**

**September**
Penyerahan Izin ASN Ikut Pilkades

**September**
Tinjauan Vaksin

**Juni**
Peresmian SD Lurae Bontocani

**Oktober**

**Oktober**
Pencanangan Zona Integritas

**Oktober**
TPKAD Toraj Utara

**November**

**November**
Tanete Riattang Award

**November**
Peresmian Perpustakaan

**Mei**
Laouncing Ketapang Lampoko

**Desember**

**Desember**
Pelantikan 177 Kepala Desa

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ---------- ii
**DAFTAR ISI** ---------- vi
**DAFTAR TABEL** ---------- vii
**DAFTAR GAMBAR** ---------- x
**DAFTAR GRAFIK** ---------- xi
**BAB1 PENDAHULUAN** ---------- 1
A. pendahuluan ---------- 2
B. organisasi ---------- 7
C. isu-isu strategis ---------- 14
D. aspek starategis organisais ---------- 14
**BABII PERENCANAANKINERJA** ---------- 18
A. TUJUAN DAN SASARAN ---------- 19
B. STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ---------- 20
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ---------- 23
D. PERJANJIAN KINERJA ---------- 25
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA ---------- 30
**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ---------- 31
A. Capaian Kinerja Organisasi ---------- 32
B. Realisasi Anggaran ---------- 157
**BABIV PENUTUP**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 1.3. Kondisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang
Tabel 1.4. Kondisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.5. Kondisi PNS yang Pensiun Tahun 2021
Tabel 1.6. Kondisi Data Penerimaan CPNS Tahun 2021

Tabel 2.1. Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi
Tabel 2.2. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bone
Tabel 2.4. Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi
Tabel 2.5. Program dan Pagu Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel 3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.2. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023
Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran
Tabel 3.10. Target dan Realisasi Kinerja 2021
Tabel 3.11. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023
Tabel 3.13. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.14. Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja
Tabel 3.15. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.16. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran
Tabel 3.18. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.19. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Tabel 3.21. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.22. Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja
Tabel 3.23. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.25. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.26. Realisasi Anggaran
Tabel 3.27. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.29. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.30.Realisasi Anggaran
Tabel 3.31. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021
Tabel 3.32. Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja
Tabel 3.33. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.34. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.35. Realisasi Anggaran
Tabel 3.36. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.37. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.38. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Tabel 3.39. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.40. Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.41. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.42. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.43. Realisasi Anggaran
Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023
Tabel 3.46. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.47. Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja
Tabel 3.48. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Kinerja
Tabel 3.49. Realisasi Anggaran
Tabel 3.50. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.51. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021
Tabel 3.52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018-2023
Tabel 3.53. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.54. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.55. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.56. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021
Tabel 3.57. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021
Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target RPJMD
Tabel 3.59. Ikhtisar Capaian Kinerja Kab. Bone Tahun 2021
Tabel 3.60. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.61. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Tabel 3.62. Realisasi Anggaran Tahun 2021
Tabel 3.63. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 IPG Indeks Pemberdayaan Gender
Tabel 3.64. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Tabel 3.65. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan indikator Kinerja
Tabel. 3.66. Data Jumlah Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bone 2021
Tabel. 3.67. Capaian Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kinerja Anggaran Tahun 2021
Tabel 3.68. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.69. Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021
Tabel 3.70. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.71. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.72. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD 2018 - 2023
Tabel 3.73. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tabel. 3.74. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.75. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.76. Realisasi Anggaran
Tabel 3.77. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.78. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.79. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja
Tabel 3.80. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.81. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.82. Realisasi Anggaran Tahun 2021
Tabel 3.83. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021
Tabel 3.84. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tabel 3.85. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.86. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.87. Realisasi Anggaran
Tabel 3.88. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.89. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Tabel 3.90. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Tabel 3.91. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.92. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.93. Realisasi Anggaran
Tabel 3.94. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.95. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023
Tabel 3.96. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel 3.97. Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.98. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.99. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.100. Realisasi Anggaran
Tabel 3.101. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Tabel 3.102. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD 2019 - 2023
Tabel 3.103. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Tabel. 3.104. Ikhtisar Capaian Kinerja Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 3.105. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 3.106. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel 3.107. Realisasi Angaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 3.108. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
Tabel 3.109. Perbandingan Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara) Tahun 2019 s/d 2023
Tabel 3.110. Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 3.111. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
Tabel. 3.112. Realisasi Angaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021
Tabel 3.113. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021
Tabel 3.114. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021
Tabel 3.115. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Bone
Gambar 1.2 Kondisi PNS Berdasarkan Eselon Jabatan Struktural

Gambar 2.1. Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi
Gambar 2.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Gambar 2.3. Standar PenilaianKinerja

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023
Gambar 3.3. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.4. Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Gambar 3.6. Realisasi Anggaran
Gambar 3.7. Realisasi Kinerja
Gambar 3.8. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023
Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Gambar 3.10.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.11.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023
Gambar 3.12.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
gambar 3.13.tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/ kegagalan pencapaian kinerja
Gambar 3.14.Target dan Realisasi Kinerja 2021
Gambar 3.15.Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya
Gambar 3.16.Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.17.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
GAMBAR 3.18.REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA/REALISASI KINERJA KABUPATEN/KOTA SEKITAR
Gambar 3.19.Realisasi Anggaran Tahun 2021
Gambar 3.20.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.21.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023
Gambar 3.22.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.23.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.24.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 - 2023
Gambar 3.25.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.26.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.27.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.28.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.29.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.30.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Gambar 3.31.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023
Gambar 3.32.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya
Gambar 3.32.Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Angka Kemiskinan Kabupaten Bone 2017-2021
Grafik 3.2. Perkembangan Rasio Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020
Grafik 3.3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Setara Tahun 2021 (Persen)
Grafik 3.4. Kasus Kekerasan Perempuan tahun 2021
Grafik 3.4. Kasus Kekerasan Anak tahun 2021

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB 1

A. PENDAHULUAN
B. ORGANISASI
C. ISU-ISU STRATEGIS
D. ASPEK STARATEGIS ORGANISAIS

# PENDAHULUAN

## A. UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan dengan mendasarkan pada indikator kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan di tahun sebelumnya. LKjIP ini mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan oleh masing-masing perangkat daerah setiap tahunnya. Pelaporan hasil pencapaian merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang penggunaannya oleh masing-masing instansi.

Prinsip akuntabilitas yang disampaikan pemerintah ini merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya. Bentuk akuntabilitas pemerintah berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusunnya. Diharapkan dari hasil penyusunan laporan ini dapat memberikan kontrol terhadap pencapaian hasil kinerja pemerintah dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini dikeluarkan sebagai penjabaran atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Perpres ini, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Dokumen perencanaan ini disusun oleh masing-masing SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Perjanjian kerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kriteria indikator kinerja yang ada dalam perjanjian kerja telah memenuhi unsur spesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (time bound) dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Perjanjian kerja ini akan menjadi patokan untuk mengukur besarnya target pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, metode yang dilakukan adalah Pertama, dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Kedua, dengan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran kinerja ini kemudian dilaporan dalam bentuk laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, metode yang dilakukan adalah Pertama, dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Kedua, dengan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran kinerja ini kemudian dilaporan dalam bentuk laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Dari hasil penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan kinerja ini menjadi salah satu bahan untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja.

## Gambaran Umum Kabupaten Bone

### Kondisi Geografi

Secara geografi Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang terletak pada pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone yang memiliki luas wilayah mencapai 4.559 km2 atau 7,3% total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13'- 5°06' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.

Secara administratif, Kabupaten Bone mempunyai batas daerah sebagai berikut :

- **Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng.**
- **Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.**
- **Sebelah Timur : Teluk Bone.**
- **Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru**

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Bone

Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketinggian antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat (250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha.

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bone bervariasi mulai dari datar, landai hingga daerah kemiringan yang curam. Daerah yang memiliki kemiringan datar hingga landai banyak terdapat di daerah dengan kontur wilayah pantai atau dataran rendah, daerah ini terletak di sepanjang bagian timur Kabupaten Bone hingga di sebagian daerah bagian utara. Adapun daerah dengan kemiringan curam berada pada bagian Selatan dan Barat yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 76%-85% dengan temperatur berkisar 24,6° c – 28,7° c. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata<1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.

Bagian timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai. Pada Tahun 2016, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

Wilayah administrasi Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bone Tahun 2021**

| KECAMATAN | DESA | KELURAHAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| Tanete Riattang | - | 8 | 8 |
| Tanete Riattang Barat | - | 8 | 8 |
| Tanete Riattang Timur | - | 8 | 8 |
| Bengo | 9 | - | 9 |
| Tellu Limpoe | 11 | - | 11 |
| Amali | 14 | 1 | 15 |
| Tellu Siattinge | 15 | 2 | 17 |
| Lamuru | 11 | 1 | 12 |
| Lappariaja | 9 | - | 9 |
| Cenrana | 15 | 1 | 16 |
| Cina | 11 | - | 12 |
| Dua Boccoe | 21 | 1 | 22 |
| Awangpone | 17 | 1 | 18 |
| Barebbo | 17 | 1 | 18 |
| Mare | 17 | 1 | 18 |
| Ajangale | 12 | 2 | 14 |
| Palakka | 15 | - | 15 |
| Ulaweng | 14 | 1 | 15 |
| Sibulue | 19 | 1 | 20 |
| Salomekko | 7 | 1 | 8 |
| Kahu | 19 | 1 | 20 |
| Bontocani | 10 | 1 | 11 |
| Kajuara | 17 | 1 | 18 |
| Tonra | 11 | - | 11 |
| Ponre | 9 | - | 9 |
| Libureng | 15 | 5 | 20 |
| Patimpeng | | | 10 |

27 KECAMATAN · 328 DESA · 44 KELURAHAN · 372 JUMLAH

**372 Pemukiman**

**Terdiri dari 27 Kecamatan dibagi menjadi 44 Kelurahan dan 328 Desa**

# KONDISI DEMOGRAFI

**48,94%**

**Penduduk Pria**

Jumlah penduduk Kabupaten Bone laki-laki 397.971 jiwa

**51,06%**

**Penduduk Wanita**

Jumlah penduduk Kabupaten Bone wanita 415.239 jiwa

Penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2021 sebanyak 813.211 jiwa yang terdiri dari laki-laki 397.972 jiwa dan perempuan 415.239 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 48,94% penduduk laki-laki dan 51,06% penduduk perempuan. Data terinci mengenai hal dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2.**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Tahun 2021**

| KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | PRIA | WANITA | PRIA+WANITA |
|---|---|---|---|---|
| Bontocani | 11 | 9.148 | 8.962 | 18.110 |
| Kahu | 20 | 20.267 | 21.267 | 41.534 |
| Kajuara | 18 | 18.311 | 18.882 | 37.193 |
| Salomekko | 8 | 8.279 | 8.433 | 16.712 |
| Tonra | 11 | 7495 | 7.785 | 15.280 |
| Patimpeng | 10 | 9.022 | 9.365 | 18.387 |
| Libureng | 20 | 15.776 | 16.106 | 31.882 |
| Mare | 18 | 14.552 | 14.940 | 29.492 |
| Sibulue | 20 | 17.556 | 18.623 | 36.179 |
| Cina | 12 | 14.202 | 14.864 | 29.066 |
| Ponre | 9 | 7.628 | 7.821 | 14.449 |
| Barebbo | 18 | 14.812 | 15.729 | 30.541 |
| Ponre | 9 | 7.628 | 7.821 | 14.449 |
| Lappariaja | 9 | 13.486 | 13.798 | 27.284 |
| Lamuru | 12 | 13.059 | 13.424 | 26.483 |
| Tellu Limpoe | 11 | 8.464 | 7.976 | 16.440 |
| Bengo | 9 | 13.308 | 13.847 | 27.155 |
| Ulaweng | 15 | 13.343 | 13.921 | 27.264 |
| Palakka | 15 | 12.743 | 13.604 | 26.347 |
| Awangpone | 18 | 16.714 | 18.063 | 34.777 |
| Tellu Sittinge | 17 | 22.586 | 23.892 | 46.478 |
| Amali | 15 | 10.174 | 11.212 | 21.386 |
| Ajangale | 14 | 13.702 | 14.707 | 28.409 |
| Dua Boccoe | 22 | 16.341 | 17.584 | 33.925 |
| Cenrana | 16 | 13.056 | 13.695 | 26.751 |
| Tanete Riattang | 8 | 25.091 | 27.507 | 53.408 |
| T.R. Barat | 8 | 24.964 | 25.911 | 50.875 |
| T.R. Timur | 8 | 23.083 | 23.321 | 46.404 |
| JUMLAH | 372 | 397.972 | 415.239 | 813.211 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bone, 2021*

# B. ORGANISASI

Dalam menjalankan organisasi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan perangkat daerah dalam menyelenggarakan berbagai administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah. Dalam penetapan perangkat daerah, pembentukannya disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone. Perangkat daerah ini bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan evaluasi kelembagaan akibat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sekaligus melakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan UPT, menetapkan perangkat daerah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

B. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

C. Inspektorat Daerah Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

D. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan p emerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang m elaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan penataan ruang;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

7. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
8. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. Dinas Ketenagakerjaan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Tipe melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
21. Dinas kebudayaan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
23. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
24. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

25. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
26. Dinas Peternakan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
27. Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
28. Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

E. Badan

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidangkepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahanbidang kesatuan bangsa dan politik.

F. UPT RSUD Tenriawaru dan UPT RSUD Datu Pancaitana

1. Kecamatan Tanete Riattang merupakan Kecamatan Tipe A
2. Kecamatan Tanete Riattang Barat merupakan Kecamatan Tipe A
3. Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan Kecamatan Tipe A
4. Kecamatan Bengo merupakan Kecamatan Tipe A
5. Kecamatan Tellu Limpoe merupakan Kecamatan Tipe A
6. Kecamatan Amali merupakan Kecamatan Tipe A
7. Kecamatan Tellu Siattinge merupakan Kecamatan Tipe A
8. Kecamatan Lamuru merupakan Kecamatan Tipe A
9. Kecamatan Lappariaja merupakan Kecamatan Tipe A
10. Kecamatan Cenrana merupakan Kecamatan Tipe A

11. Kecamatan Cina merupakan Kecamatan Tipe A
12. Kecamatan Dua Boccoe merupakan Kecamatan Tipe A
13. Kecamatan Awangpone merupakan Kecamatan Tipe A
14. Kecamatan Barebbo merupakan Kecamatan Tipe A
15. Kecamatan Mare merupakan Kecamatan Tipe A
16. Kecamatan Ajangale merupakan Kecamatan Tipe A
17. Kecamatan Palakka merupakan Kecamatan Tipe A
18. Kecamatan Ulaweng merupakan Kecamatan Tipe A
19. Kecamatan Sibulue merupakan Kecamatan Tipe A
20. Kecamatan Salomekko merupakan Kecamatan Tipe A
21. Kecamatan Kahu merupakan Kecamatan Tipe A
22. Kecamatan Bontocani merupakan Kecamatan Tipe A
23. Kecamatan Kajuara merupakan Kecamatan Tipe A
24. Kecamatan Tonra merupakan Kecamatan Tipe A
25. Kecamatan Ponre merupakan Kecamatan Tipe A
26. Kecamatan Libureng merupakan Kecamatan Tipe A
27. Kecamatan Patimpeng merupakan Kecamatan Tipe A

SCAN ME

**Scan QR Code untuk melihat dokumen Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bone telah melakukan penyetaraan Jabatan, dimana jumlah jabatan struktural yang telah disetarakan dan dilakukan pelantikan ke jabatan fungsional tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 422 Orang, Juga telah melakukan penyusunan peta proses bisnis, dan inovasi daerah dan kedepannya di tahun 2022 akan dilakukan penyusunan anjab, ABK, Evjab, dan Peta Jabatan baru khususnya jabatan pelaksana. Adapun data pendukung sebagai berikut :

1.Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 447 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, tanggal 2 September 2021 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 448 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang telah menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

SCAN ME

**Scan QR Code untuk melihat dokumen SK Penetapan Lintas Fungsi**

SCAN ME

**Scan QR Code untuk melihat dokumen SK Penetapan Peta Proses Bisnin**

SCAN ME

**Scan QR Code diatas untuk melihat dokumen Kepmendagri Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota**

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

**Scan QR Code dibawah untuk melihat dokumen Daftar Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi**

SCAN ME

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sebanyak 8.222 orang yang dikelompokkan berdasarkan eselon Jabatan Struktural sebagai berikut :

**Gambar 1.2**
**Kondisi PNS Berdasarkan Eselon Jabatan Struktural**

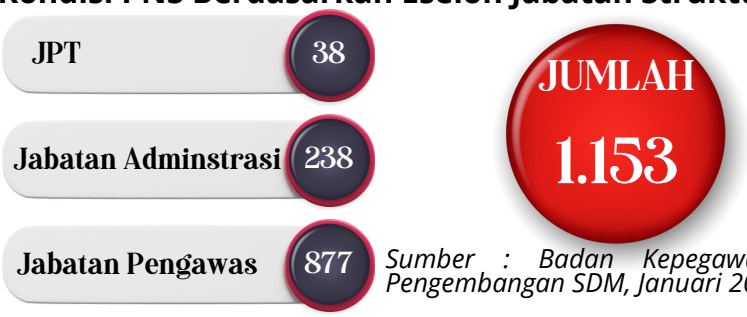


*Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Januari 2022*

**Tabel 1.3.**
**Kondisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang**

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| | | Pria | Wanita | |
| | **IV** | **1.219** | **2.064** | **3.283** |
| 1. | IV/e | 0 | 0 | 0 |
| 2. | IV/d | 5 | 2 | 7 |
| 3. | IV/c | 56 | 73 | 129 |
| 4. | IV/b | 712 | 1.231 | 1.943 |
| 5. | IV/a | 446 | 758 | 1.204 |
| | **III** | **1.298** | **2.658** | **3.956** |
| 6. | III/d | 434 | 738 | 1.172 |
| 7. | III/c | 293 | 720 | 1.013 |
| 8. | III/b | 282 | 772 | 1.054 |
| 9. | III/a | 289 | 428 | 717 |
| | **II** | **484** | **469** | **953** |
| 10. | II/d | 210 | 259 | 469 |
| 11. | II/c | 149 | 144 | 293 |
| 12. | II/b | 94 | 61 | 155 |
| 13. | II/a | 31 | 5 | 36 |
| | **I** | **30** | **0** | **30** |
| 14. | I/d | 21 | 0 | 21 |
| 15. | I/c | 4 | 0 | 4 |
| 16. | I/b | 5 | 0 | 5 |
| 17. | I/a | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **3.031** | **5.191** | **8.222** |

**Persentase PNS Berdasarkan Golongan**

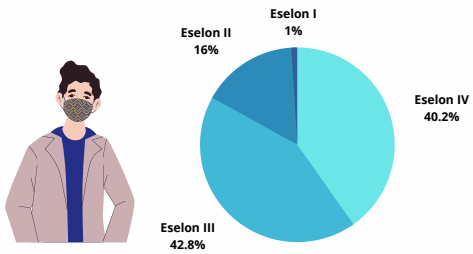


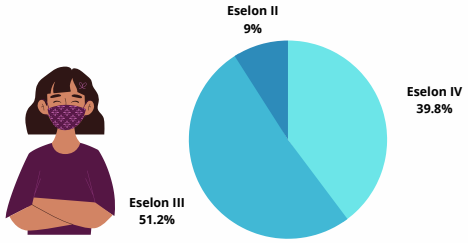


**Tabel 1.4.**
**Kondisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| | | Pria | Wanita | |
| 1. | SD | 14 | 0 | 14 |
| 2. | SMP | 39 | 1 | 40 |
| 3. | SMA/SMK/Sederajat | 557 | 418 | 975 |
| 4. | D1 | 6 | 13 | 19 |
| 5. | D2 | 77 | 195 | 272 |
| 6. | D3 | 86 | 487 | 573 |
| 7. | D4 | 20 | 136 | 156 |
| 8. | S.1 | 1.857 | 3.604 | 5.461 |
| 9 | S.2 | 373 | 336 | 709 |
| 10. | S.3 | 2 | 1 | 3 |
| | Jumlah | 3.031 | 5.191 | 8.222 |

**Persentase PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

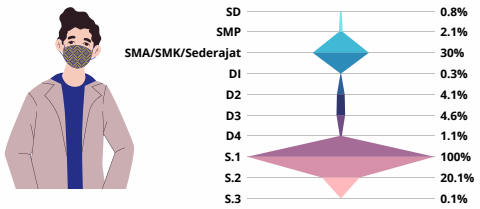


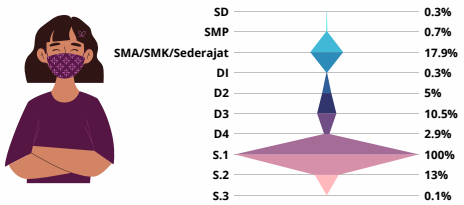

**Tabel 1.5.**
**Kondisi PNS yang Pensiun Tahun 2021**

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| | | Pria | Wanita | |
| | **IV** | 140 | 213 | 353 |
| 1. | IV/e | - | - | - |
| 2. | IV/d | 11 | 4 | 15 |
| 3. | IV/c | 63 | 108 | 171 |
| 4. | IV/b | 43 | 71 | 114 |
| 5. | IV/a | 23 | 30 | 53 |
| | **III** | 29 | 14 | 43 |
| 6. | III/d | 10 | 2 | 12 |
| 7. | III/c | 6 | 6 | 12 |
| 8. | III/b | 5 | 1 | 6 |
| 9. | III/a | 8 | 5 | 13 |
| | **II** | 9 | 0 | 9 |
| 10. | II/d | 2 | - | 2 |
| 11. | II/c | 4 | - | 4 |
| 12. | II/b | 2 | - | 2 |
| 13. | II/a | 1 | - | 1 |
| | **I** | 1 | 1 | 2 |
| 14. | I/d | 1 | 1 | 2 |
| 15. | I/c | - | - | - |
| 16. | I/b | - | - | - |
| 17. | I/a | - | - | - |
| | **Jumlah** | 179 | 228 | 407 |

**Persentase PNS Berdasarkan Eselon**

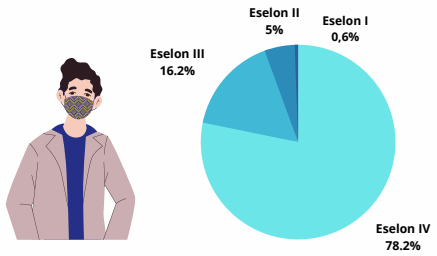

**Tabel 1.6.**
**Kondisi Data Penerimaan CPNS Tahun 2021**

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|---|---|
| | | Pria | Wanita | |
| 1. | **D3** | 10 | 65 | 75 |
| 2. | **D4** | - | - | - |
| 3. | **S.1** | 37 | 74 | 111 |
| 4. | **Jumlah** | 47 | 139 | 186 |

> Jabatan Struktural yang disetarakan Ke Jabatan Funfsional Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yaitu **"Jabatan Pengawas"** Berjumlah 422 Orang

## C. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut :

- Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
- Masih tingginya dan meningkatnya angka kemiskinan.
- Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk.
- Meningkatnya angka pengangguran dan Rendahnya tingkat produktivitas pekerja.
- Masih tingginya angka kriminalitas.
- Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (outline respon) organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja perangkat daerah harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perencanaan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan alternatif yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi perangkat daerahdalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh perangkat daerah dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal.Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan bidang urusan pada perangkat daerah.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja aparatur sipil negara pada perangkat daerah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal: pertama, aspek input/sumber daya berupa Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output/hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perangkat daerah, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB 2

A. TUJUAN DAN SASARAN
B. STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
D. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam upaya pencapaian rencana strategik. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone telah membuat suatu bentuk ketetapan daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta indikator yang harus dicapai sebagai ukuran keberhasilan dari perencanaan yang diaplikasikan.

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan selama 5 Tahun ke depan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 adalah:

**"Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni "Masyarakat Bone yang Mandiri", "Masyarakat Bone yang Berdaya Saing", dan "Masyarakat Bone yang Sejahtera". Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri,** dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing,** dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera,** mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima Tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

**Tabel 2.1.**
**Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi**

| No. | MISI | PENJELASAN MISI | POKOK MISI |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) | Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN | Mandiri |
| 2. | Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat | Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Mandiri/ Sejahtera |
| 3. | Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya | Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah | Sejahtera |
| 4. | Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan | Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangkan infrastruktur dasar | Mandiri |
| 5. | Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik | Meningkatkan arus investasi dan pengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik | Berdaya Saing |
| 6. | Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat | Sejahtera |

*Sumber: Perubahan RPJMD Kab.Bone 2018-2023*

# A. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan mengalami perubahan yang tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**
**Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi**

**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**

**Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN**

- Berkurangnya kasus KKN

**Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat**

**Menurunkan angka Kemiskinan**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
- Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan
- Tersedianya Lapangan Pekerjaan
- Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan

**Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya**

**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif**

- Membaiknya Layanan Pendidikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat
- Membaiknya Layanan Kesehatan kepada seluruh Lapisan Masyarakat
- Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

**Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan**

**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan**

- Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

**Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik**

**Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik**

- Meningkatnya Daya Tarik Investasi
- Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik

**Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat**

- **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum**
- **Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat**

- Membaiknya Penegakan Hukum
- Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

*Sumber: Perubahan RPJMD Kab.Bone 2018-2023*

# B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bone, telah ditetapkan strategi yang akan ditempuh untuk lima Tahun ke depan berdasarkan masing-masing misi dan dituangkan dalam tabel berikut ini :

**Gambar 2.2.**
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**

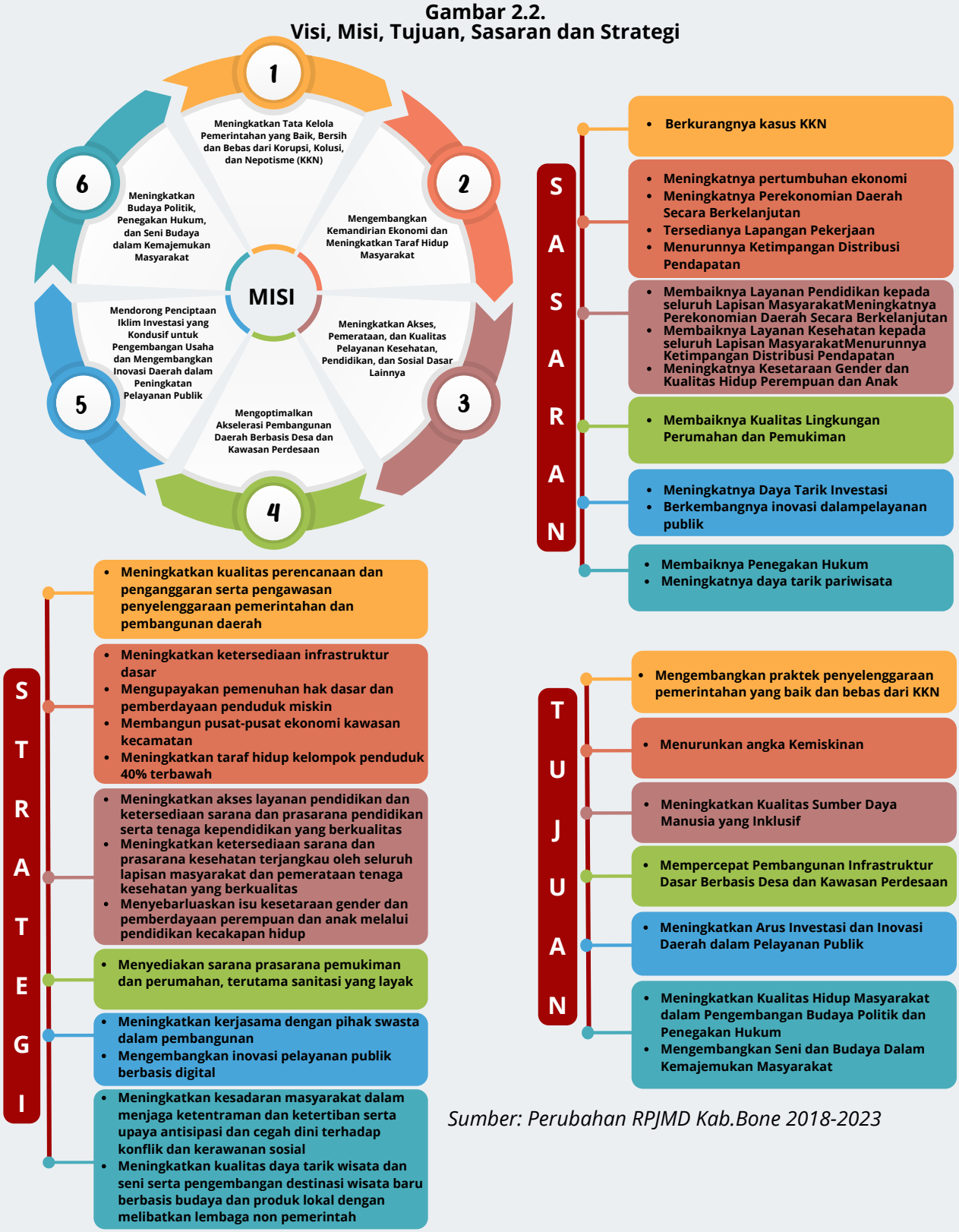


*Sumber: Perubahan RPJMD Kab.Bone 2018-2023*

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam lima Tahun mendatang disesuaikan dengan masing-masing strategi yang telah dipilih. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Terdapat sejumlah strategi yang telah dirumuskan untuk mecapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Tabel 2.2.**
**Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan**

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN 2021 | ARAH KEBIJAKAN 2022 | ARAH KEBIJAKAN 2023 |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah | • Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi<br>• Peningkatan efektifitas pengawasan | • Peningkatan kualitas pelayanan publik<br>• Peningkatan efektifitas pengawasan | • Peningkatan kualitas pelayanan publik<br>• Peningkatan efektifitas pengawasan |
| Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar | Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota | Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota | Pemerataan pembangunan infrastruktur kecamatan luar kota |
| Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin | Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan TKPKD | Peningkatan akses ekonomi, kesehatan dan sosial dasar | Peningkatan akses ekonomi, kesehatan dan sosial dasar |
| Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan | Pengembangan industri kecil dan menengah | Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah | Pengembangan industri kecil dan menengah |
| Meningkatkan taraf hidup kelompok penduduk 40% terbawah | Penyediaan bantuan social dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil | Penyediaan bantuan sosial dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil | Penyediaan bantuan sosial dan penguatan ekonomi usaha mikro dan kecil |

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan akses layanan pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan yang berkualitas | • Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktid baik untuk menjangkau yang belum terjangkau<br>• Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan | • Akselerasi implementasi program dan kebijakan termasuk diseminasi praktik-praktid baik untuk menjangkau yang belum terjangkau<br>• Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh kecamatan | • Pemantapan dan reviu kapasitas kelembagaan dalam perencanaan Pendidikan di semua jenjang<br>• Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, di seluruh kecamatan |
| Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas | • Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan<br>• Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil | • Akselerasi Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan<br>• Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil | • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh kecamatan<br>• Pemerataan tenaga medis di desa-desa terpencil |
| Menyebarluaskan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui pendidikan kecakapan hidup | Pelibatan berbagai pelaku pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak | Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah | Peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah |
| Menyediakan sarana prasarana pemukiman dan perumahan, terutama sanitasi yang layak | Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih | Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih | Penyediaan sanitasi yang layak dan air bersih |
| Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan | Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital | Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital | Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital |
| Mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital | Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital | Akselerasi pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital | Pembangunan sistem pelayanan publik berbasis digital |
| Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial | Pemantapan pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat | Akselerasi pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat | pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat |
| Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan seni serta pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal dengan melibatkan lembaga non pemerintah | Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal | Akselerasi pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal | Pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal |

*Sumber: Perubahan RPJMD Kab.Bone 2018-2023*

# C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KAB BONE

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bone**

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | *Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN* | Indeks Reformasi Birokrasi | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| | Berkurangnya Kasus KKN | Proporsi OPD yang Bebas dari KKN | Jumlah OPD yang Bebas dari KKN / Jumlah Total OPD x 100% |
| 2. | *Menurunkan Angka Kemiskinan* | Persentase Penduduk Miskin | $p_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$<br>Dimana:<br>α = 0<br>Z = Garis Kemiskinan<br>$Y_i$ = Rata-Rata Pengeluaran per kapita Sebulan Penduduk yang Berada di bawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3,…..q), $y_i$<Z<br>Q = Banyaknya Penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan<br>n = Jumlah Penduduk |
| | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$<br>Dimana:<br>t+1 = Tahun Pengamatan PDRB<br>t = Tahun Pengamatan PDRB Sebelumnya |
| | Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Per Kapita | PDRB / Penduduk Pertengahan Tahun |
| | Tersedianya Lapangan Pekerjaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Angkatan Kerja x 100% |
| | Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan | Indeks Gini | $G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$<br>$P_i$ = Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke-i<br>$Q_i$ = Persentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas ke-i<br>Nilai *gini ratio* Berkisar antara 0 dan 1, jika:<br>G < 0,3 = Ketimpangan Rendah<br>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang<br>G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi |
| 3. | *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif* | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | IPM = 1/3 [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$]<br>Dimana:<br>$X_{(1)}$ : Indeks Harapan Hidup<br>$X_{(2)}$ : Indeks Pendidikan = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3(Indeks Rata-Rata Lama Sekolah)<br>$X_{(3)}$ : Indeks Standar Hidup Layak<br>Indeks $X_{(i)} = X_{(i)} - X_{(i)min} / [X_{(i)maks} - X_{(i)min}]$<br>Dimana: |

Tabel 2.5.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Bone

| No. | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan/Formulasi Penghitungan |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | | | $X_{(1)}$ : Indikator ke-I (I = 1, 2, 3)<br>$X_{(2)}$ : Nilai Maksimum Sekolah $X_{(i)}$<br>$X_{(3)}$ : Nilai Minimum Sekolah $X_{(i)}$ |
| | Membaiknya Layanan Pendidikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | $I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ |
| | Membaiknya Layanan Kesehatan kepada seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Kesehatan | $I_{kesehatan} = \frac{AHH . AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ |
| | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender | IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-Laki |
| 4. | *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan* | Indeks Desa Membangun | IDM = 1/3(IS x IE x IL)<br>Keterangan:<br>IS : Indeks Sosial<br>IE : Indeks Ekonomi<br>IL : Indeks Lingkungan |
| | Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman | Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri | Jumlah Desa Maju Mandiri Tahun n / Jumlah Desa Berkembang Tahun n-1 x 100% |
| 5. | *Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik* | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | Jumlah Penanaman Modal Tahun n / PDRB Tahun n x 100% |
| | Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMDN/PMA | Jumlah Penanaman Modal |
| | Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik | Indeks Inovasi Daerah | Penilaian Indeks Inovasi Daerah oleh Kementrian Dalam Negeri |
| 6. | *Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum* | Angka Kriminalitas | Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Dalam Satu Tahun |
| | Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | Jumlah Laporan Pengaduan Tahun (n) – Jumlah Laporan Pengaduan Kriminalitas Tahun (n-1) / Jumlah Laporan Kriminalitas Tahun (n-1) x 100% |
| 7. | *Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat* | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Tahun n / Total APBD Tahun n x 100% |
| | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata | Jumlah Wisatawan | Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara |

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan tekad pemerintah kabupaten dalam menjalankan amanat masyarakat untuk membentuk kinerja terhadap seluruh rencana agar dilaksanakan secara baik dan bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi bagian yang penting dan sekaligus sebagai bagian dari tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serentak SeKabupaten Bone di Novena Hotel Januari 2022**

Adapun wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang telah menyesuaikan adanya perubahan RPJMD dan Perubahan Indikator Kinerja Utama adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.**
**Keterkaitan Antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi**

| No. MISI | PENJELASAN MISI | SATUAN | TARGET 2021 |
|---|---|---|---|
| **Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn)** | | | |
| *Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN* | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | B |
| Berkurangnya Kasus KKN | Proporsi OPD yang Bebas dari KKN | Persen | 90 |
| **Misi 2 Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat** | | | |
| *Menurunkan Angka Kemiskinan* | Persentase Penduduk Miskin | Persen | 10,00 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 6,68 |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Per Kapita | Rp Juta | 52,60 |
| Tersedianya Lapangan Pekerjaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 3,30 |
| Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan | Indeks Gini | Indeks | 0,370 |
| **Misi 3 Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya** | | | |
| *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif* | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 66,17 |
| Membaiknya Layanan Pendidikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | Indeks | 60,40 |
| Membaiknya Layanan Kesehatan kepada seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Kesehatan | Indeks | 72,78 |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | 93,48 |
| **Misi 4 Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan** | | | |
| *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan* | Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,6519 |
| Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman | Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri | Persen | 12,8 |
| **Misi 5 Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik** | | | |
| *Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik* | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | Persen | 32,82 |
| Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMDN/PMA | Rp Miliar | 175 |
| Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 1.050 |
| **Misi 6 Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat** | | | |
| *Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum* | Angka Kriminalitas | Kasus | 883 |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | Persen | 97,99 |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | Persen | 2,70 |
| Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata | Jumlah Wisatawan | Orang | 516.000 |

*Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bone Tahun 2021*

## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2,742,159,275,261.00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah. Secara rinci rencana anggaran Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5.**
**Program dan Pagu Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021**

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | ***Belanja Daerah*** | ***2,742,159,275,261*** |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,168,405,894,335 |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | 146,719,838,210 |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1,096,593,000 |
| 4 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 278,048,416,260 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 7,289,688,395 |
| 6 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 182,823,000 |
| 7 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 126,640,000 |
| 8 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 15,783,432,500 |
| 9 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 9,824,764,000 |
| 10 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 4,143,769,043 |
| 11 | Program Penataan Bangunan Gedung | 6,861,463,691 |
| 12 | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 5,399,178,447 |
| 13 | Program Penyelenggaraan Jalan | 423,477,354,606 |
| 14 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 802,547,400 |
| 15 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 17,002,499,335 |
| 16 | Program Pengembangan Permukiman | 11,037,720,866 |
| 17 | Program Kawasan Permukiman | 2,009,328,000 |
| 18 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 3,006,970,000 |
| 19 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 4,324,470,000 |
| 20 | Program Penanggulangan Bencana | 2,370,922,496 |
| 21 | Program Pemberdayaan Sosial | 59,742,000 |
| 22 | Program Rehabilitasi Sosial | 371,652,642 |
| 23 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1,018,139,687 |
| 24 | Program Penanganan Bencana | 501,010,000 |
| 25 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 74,409,971 |
| 26 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 10,000,000 |
| 27 | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 420,073,000 |
| 28 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 57,076,850 |
| 29 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 209,238,450 |
| 30 | Program Hubungan Industrial | 52,670,450 |
| 31 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 286,631,000 |
| 32 | Program Perlindungan Perempuan | 340,300,500 |
| 33 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 107,116,500 |
| 34 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | 36,788,200 |
| 35 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 121,792,100 |
| 36 | Program Perlindungan Khusus Anak | 42,816,500 |
| 37 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1,247,715,000 |
| 38 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1,165,910,000 |
| 39 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 85,320,000 |
| 40 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 100,240,000 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|
| 41 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 390,500,000 |
| 42 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 456,768,800 |
| 43 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | 30,000,000 |
| 44 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 60,000,000 |
| 45 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 110,000,000 |
| 46 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 85,000,000 |
| 47 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 54,000,000 |
| 48 | Program Pengelolaan Persampahan | 5,601,490,050 |
| 49 | Program Pendaftaran Penduduk | 31,118,000 |
| 50 | Program Pencatatan Sipil | 42,805,000 |
| 51 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 46,154,000 |
| 52 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 16,182,000 |
| 53 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 6,763,728,250 |
| 54 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 552,615,950 |
| 55 | Program Pengendalian Penduduk | 856,291,000 |
| 56 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 5,630,564,650 |
| 57 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1,444,275,000 |
| 58 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 140,250,000 |
| 59 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 1,190,749,400 |
| 60 | Program Aplikasi Informatika | 1,554,187,250 |
| 61 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 108,530,300 |
| 62 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 97,002,100 |
| 63 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 35,831,700 |
| 64 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 42,368,000 |
| 65 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 51,136,000 |
| 66 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 231,022,150 |
| 67 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | 22,717,000 |
| 68 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 179,316,300 |
| 69 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 35,240,000 |
| 70 | Program Promosi Penanaman Modal | 169,662,000 |
| 71 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 693,660,200 |
| 72 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 259,337,500 |
| 73 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 2,095,000 |
| 74 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 694,140,950 |
| 75 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 2,744,800,000 |
| 76 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 155,118,450 |
| 77 | Program Pengembangan Kebudayaan | 148,240,000 |
| 78 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 32,500,000 |
| 79 | Program Pembinaan Sejarah | 253,890,000 |
| 80 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 818,000,000 |
| 81 | Program Pengelolaan Permuseuman | 656,000,000 |

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) |
|---|---|---|
| 82 | Program Pembinaan Perpustakaan | 10,868,432,100 |
| 83 | Program Pengelolaan Arsip | 51,472,650 |
| 84 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 31,956,500 |
| 85 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1,116,958,450 |
| 86 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2,291,029,050 |
| 87 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1,874,068,582 |
| 88 | Program Pemasaran Pariwisata | 424,998,700 |
| 89 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 56,788,100 |
| 90 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 8,932,918,042 |
| 91 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 17,314,153,000 |
| 92 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 402,455,550 |
| 93 | Program Penyuluhan Pertanian | 1,020,655,452 |
| 94 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 126,580,000 |
| 95 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 11,910,000 |
| 96 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 746,788,000 |
| 97 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 44,908,000 |
| 98 | Program Pengembangan Ekspor | 61,416,000 |
| 99 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 27,894,000 |
| 100 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 17,164,000 |
| 101 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | 62,884,000 |
| 102 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1,006,744,000 |
| 103 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | 20,844,000 |
| 104 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 19,844,000 |
| 105 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 14,437,483,000 |
| 106 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 3,056,130,570 |
| 107 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 15,696,726,800 |
| 108 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 797,978,300 |
| 109 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,319,369,750 |
| 110 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 480,235,129,590 |
| 111 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1,449,164,630 |
| 112 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 4,163,622,000 |
| 113 | Program Kepegawaian Daerah | 1,383,129,720 |
| 114 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2,877,372,300 |
| 115 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 305,914,600 |
| 116 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 2,783,154,500 |
| 117 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 284,595,000 |
| 118 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 409,085,186 |
| 119 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 13,016,253,800 |
| 120 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1,391,250,000 |
| 121 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 319,079,300 |
| 122 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 237,800,250 |
| 123 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1,429,273,805 |
| 124 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 789,035,600 |
| 125 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 194,891,950 |
| 126 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 2,339,729,000 |

*Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bone Tahun 2021*

## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

**Gambar 2.3.**
**Standar PenilaianKinerja**

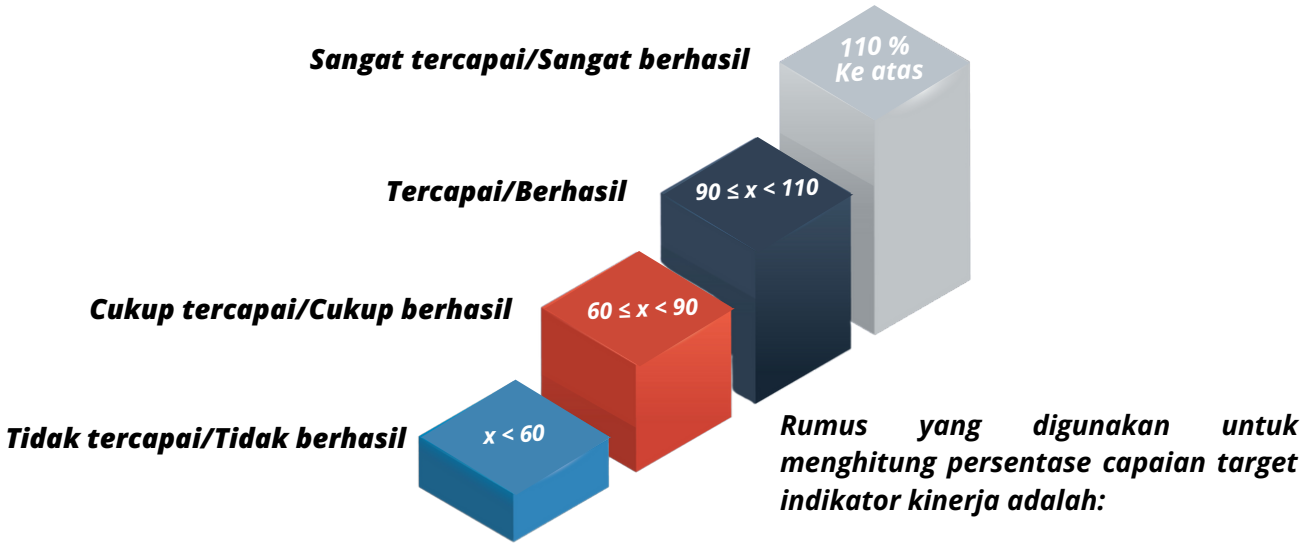


**Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target x 100%**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB 3

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
## B. REALISASI ANGGARAN

# AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/rencana masing-masing misi Kabupaten Bone dengan cara mencapainya melalui tujuan/sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

**Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan indikator :**

**Tujuan 1 :**
**Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN, dengan indikator :**
**Indeks Reformasi Birokrasi**

Untuk pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

*Gambarl 3.1.*
*Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

| Tujuan/ Sasaran Strategis | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 | REALISASI 2021 | CAPAIAN 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | B (60-70) | B* (67-70) | 103,47% | BERHASIL |

*Sumber: Perubahan RPJMD Kab.Bone 2018-2023*

** Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri*

Sosialisasi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi, di Novena Hotel 24 Mei 2021

Berdasarkan data di atas, target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone Tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, dengan nilai setelah dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dicapai nilai 67,26 atau predikat B dari target (60-70) sehingga diperoleh capaian sebesar 103,47% atau kategori **Berhasil.** Nilai ini masih bersifat sementara, karena belum dilakukan evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN", dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.1.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | C >30-50 | C 36,72 | C 43,72 | B* 67,26 | - | - | 73,44% | 87,44% | 103,47 % | - | - |

*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

** Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" dengan indikator "nilai Indeks Reformasi Birokrasi"mengalami peningkatan trend realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

**3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2018 - 2023 seperti dalam gambar di bawah ini:

***Gambar 3.2.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023***

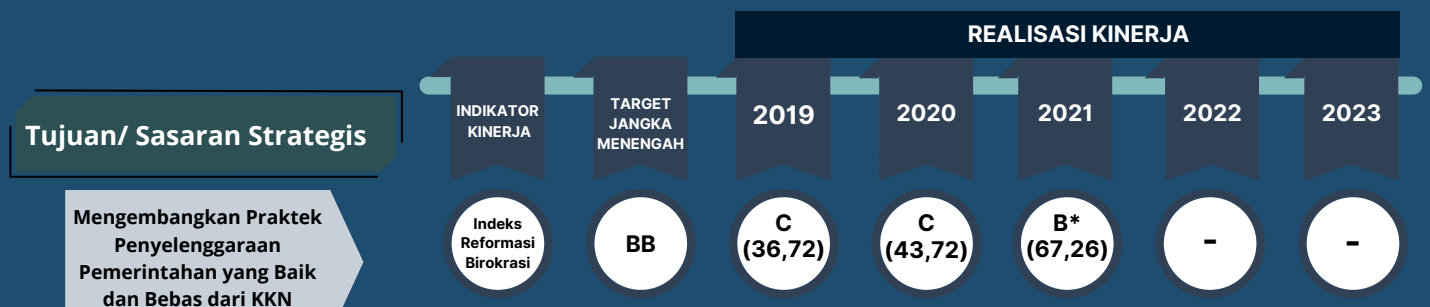


*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

** Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri*

Berdasarkan gambar 3.2. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" dengan indikator "nilai Indeks Reformasi Birokrasi" belum memenuhi target RPJMD, namun mengalami trend peningkatan dibandingkan dua tahun terakhir.

**4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana gambar berikut:

*Gambar 3.3.*
*Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya*

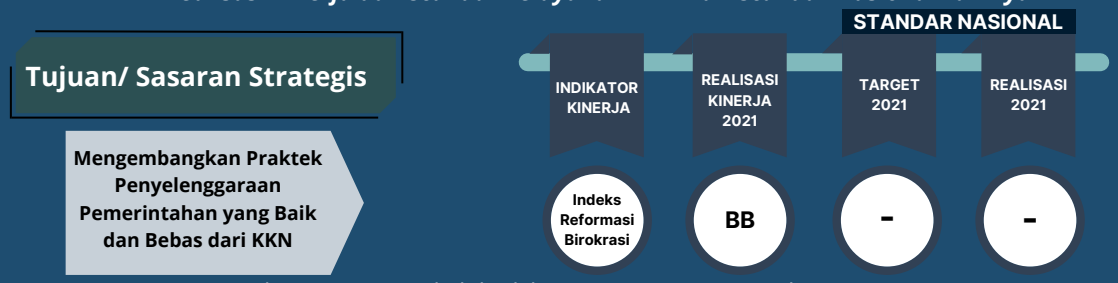


*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

Berdasarkan gambar 3.3. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" dengan indikator "nilai Indeks Reformasi Birokrasi" tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena tidak tidak termasuk dalam SPM ataupun standar nasional lainnya.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

*Gambar 3.4.*
*Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021*

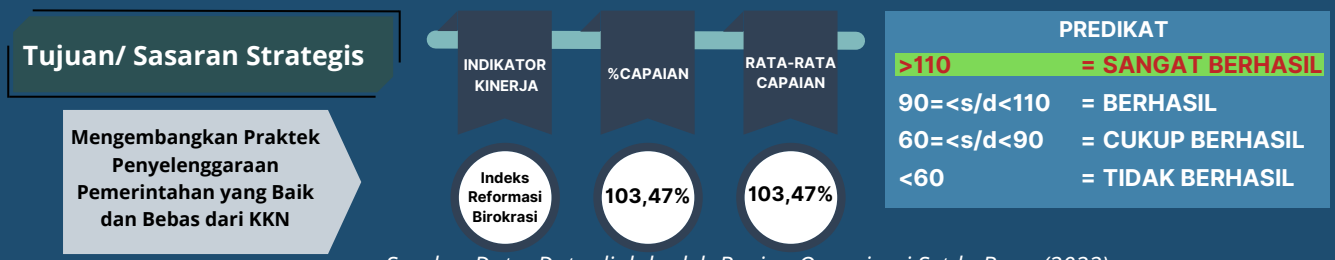


*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

Berdasarkan data pada gambar 3.4. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tujuan Pemerintah Kabupaten Bone Indeks Reformasi Birokrasi dalam kategori Sangat Berhasil, meskipun data ini masih bersifat sementara yang merupakan penilaian mandiri dari Insepektorat Daerah Kabupaten Bone.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Tujuan 1: Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN** | Dari gambar 3.4. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" dengan 1 indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capaian rata-rata 103,47%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut: |

## Indeks Reformasi Birokrasi

**Definisi** : mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas sesuai hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi dalam kategori **Berhasil,** yaitu tercapai 103,47% dengan realisasi sebesar 67,26 dari target 60-70 hal ini karena:

1. Pelaksanan reformasi birokrasi sudah menyentuh seluruh perangkat daerah, yang pada tahun 2020 hanya menyentuh 10 prioritas perangkat daerah dan tahun 2021 sudah menyentuh seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Bone.
2. Agen perubahan pada perangkat daerah telah mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada organisasinya, terbukti pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bone melalui agen perubahan, membuat 119 inovasi dan salah satunya masuk dalam top 99 kipp (kompetisi inovasi pelayanan publik) Kementerian PNRB tahun 2021 yaitu gemar limas (gerakan masyarakat lisu massikola) oleh Bappeda Kabupaten Bone.
3. Telah dilakukan deregulasi kebijakan yang menghambat kinerja organisasi, seperti pada dokumen perubahan RPJMD Kab Bone yang diselasakan dengan kebijakan pusat dan provinsi sulsel, dan juga terkait perizinan oss (one single submission) berbasis resiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah kami selaraskan dan diterapkan dalam pelayan kami.
4. Peta proses bisnis telah kami susun yang memperlihatkan kesesuaian efektivitas hubungan organisasi.

**Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:**

1. Masih terdapat perangkat daerah belum memiliki rencana aksi pelaksanan reformasi birokrasi baik yang menggambarkan sasaran dan ukuran keberhasilan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
2. Masih ada agen perubahan belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan dalam organisasi;
3. Penyusunan perencanaan pengembangan potensi pegawai belum dilakukan secara menyeluruh;
4. Belum ada kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, whistle blowing system (wbs), pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah belum berjalanb secara efektif pada perangkat daerah;
5. Belum ada pembangunan zona integritas pada unit kerja; dan
6. Masih terdapat implementasi pelayanan publik di OPD belum optimal.

**Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan "Indeks Reformasi Birokrasi" antara lain:**

1. Melakukan sosialisasi "Peningkatan Reformasi Birokrasi" kepada seluruh perangkat daerah dan asistensi pengisian LKE PMPRB kepada perangkat daerah;
2. Peningkatan peran agen perubahan melalui sosialisasi dan pembuatan rencana aksi agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah;
3. Dilakukan penyusunan analis kebutuhan diklat PNS;
4. Dilakukan pengintegerasian pengawasan melalui SPIP (Sistem Pengendalian Internl Pemerintah);
5. Telah dilakukan pencanangan zona integritas pada unit kerja perangkat daerah Kabupaten Bone;
6. Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan *e-Government.*

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

*Gambar 3.5.*
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Tujuan/Sasaran Pemerintah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu: Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 103,47% dan capaian anggaran 93,29%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 6,71% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 10,18%.

### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai Tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" sebagai berikut:

***Tabel 3.2.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | 103,47%* | Kegaiatan Penataan Organisasi | Persentase Realisasi Penataan Administrasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam pelaksanaan penetaan organisasi yang terdiri dari: akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik serta kelembagaan |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 100 | 100 | 100 | Peningkatan kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah strategis |
| | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 100 | 100 | 100 | Pembuatan dokumen analis jabatan pada perangkat daerah yang mengalami perubahan SOTK akibat penyeteraan jaabtan admnistrasi ke fungsional |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 100 | 100 | 100 | Penguatan TIM SAKIP Kabupaten, Peningkatan Rencana Aksi pelaksanan ROAD MAP RB Kab. Bone |

*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Bone (2022)*

Berdasarkan tabel 3.2. tentang analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan 1 : "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN"**

**Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi** dengan target B (60-70) telah Berhasil tercapai sebesar B (67,2)* atau tercapai 112,7%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Kegiatan/Sub Kegiatan:

- Kegiatan Penataan Organisasi
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

## REALISASI ANGGARAN

*Gambar 3.6.*
*Realisasi Anggaran*

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" setelah perubahan sebesar Rp. 1.114.866.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana gambar sebagai berikut:

### Sasaran 1.1

**Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),** dengan indikator:

**Proporsi OPD yang bebas dar KKN**

Untuk pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

***Pencanagan Pembangunan Zona Integritas***
*Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilaya Birokrasi Bersih dan Melayani (WWBM) Di Hotel Novena, 27 September*

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

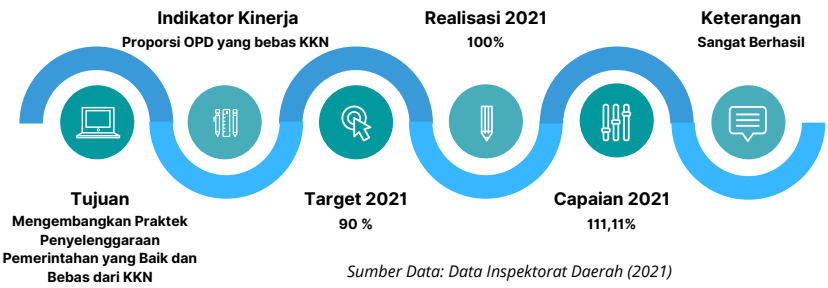


*Sumber Data: Data Inspektorat Daerah (2021)*

Berdasarkan data di atas, target Indeks Proporsi OPD yang bebas KKN Kabupaten Bone Tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, Berdasarkan data terakhir yang diolah dari data penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, serta Kehakiman/Pengadilan), diperoleh kondisi bahwa selama tahun 2021, proporsi atau persentase OPD yang bersih dari temuan KKN sebesar 100,% (tersaji pada tabel diatas) dengan capaian sebesar 111,11 % atau kategori **Sangat Berhasil,** dimana tidak ada kasus tindak pidana KKN pada OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone yang penanganannya telah diproses di pengadilan dengan putusan yang telah inkra atau berkekuatan hukum tetap.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian sasaran "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)", dengan indikator "Proporsi Perangkat Daerah yang Bebas KKN" apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.3.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Proporsi Perangkat Daerah yang Bebas KKN | | 100% | 98,48% | 100% | - | - | 118% | 109% | 111,11% | - | - |

*Sumber Data: Data Inspektorat Daerah (2021)*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran "Berkuranya Kasus Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN)" mengalami peningkatan trend realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalahdengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

***Tabel 3.4.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Proporsi OPD yang Bebas KKN | 98 | 100% | 98,48% | 100% | - | - |

*Sumber Data: Data Inspektorat Daerah (2021)*

Berdasarkan tabel 3.4. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan Sasaran "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)" dengan indikator "Proporsi OPD yang Bebas KKN" telah memenuhi target RPJMD.

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.5.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Realisasi Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2021 |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Proporsi OPD yang Bebas KKN | 100% | - | - |

*Sumber Data: Data diolah oleh Bagian Inspektorat Bone (2022)*

Berdasarkan tabel 3.5. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)" dengan indikator "Proporsi OPD yang Bebas KKN" tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena tidak termasuk dalam SPM ataupun standar nasional lainnya.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

*Tabel 3.6.*
*Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021*
*dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023*

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | | | 111,11% | ✓ | | | |
| | Proporsi OPD yang Bebas KKN | 111,11% | | ✓ | | | |

*Sumber Data: Data diolah oleh Inspektorat Bone (2021)*

Berdasarkan data pada tabel 3.6. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Kabupaten Bone dengan Indeks Proporsi OPD yang Bebas KKN dalam kategori Sangat Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran : Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

Dari tabel 3.13. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)" dengan indikator "Proporsi OPD yang Bebas KKN" menunjukkan predikat Sangat Berhasil yang mempunyai nilai capain rata- rata 111, 11 % Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Proporsi OPD yang Bebas KKN

**Definisi :** Persentase yang diperoleh dari jumlah OPD yang bebas dari KKN Berdasarkan data Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang mengambarkan sejauh mana OPD yang ada dalam lingkup Instansi Pemerintah kabupaten Bone telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, bersih dari KKN.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Proporsi OPD yang Bebas KKN dalam kategori Sangat Berhasil, yaitu tercapai 100%. dengan realisasi sebesar 111,11 dari target 90 hal ini karena:

- Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dan seluruh unsur penyelenggara daerah pada OPD.
- Upaya pencegahan KKN melalui proses pengendalian dan pengawasan internal yang intensif oleh seluruh Pimpinan OPD hingga ke jajaran pimpinan terendah;
- pembinaan dan pengawasan secara berkala berbasis resiko oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengedepankan pencegahan dalam proses pengawasan hukum atas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- Padatnya jadwal dan beban kerja pengawasan pada tahun 2021 yang belum sebanding dengan kuantitas dan kompetensi aparatur pengawasan yang ada;
- Masih terdapat beberapa potensi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sementara diatangani oleh APH berdasarkan laporan pengaduan masyarakat.

1. Munyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko dan koordinasi pelaksanaan yang efektif, efisien dan ekonomis secara berkelanjutan dengan seluruh OPD dan Pemerintah Desa dalam Lingkup Pemerintah Kab. Bone, baik dalam bentuk penjaminan mutu (Audit Internal) Maupun jasa konsultatif (Pendapingan/asistensi);
2. Koordinasi dan kerja sama dengan APH untuk penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana KKN yang sementara dalam proses hukum melalui perjanjian kerja sama (PKS) anatara Pemerintah Daerah Kab. Bone dengan Kejalsaan Negeri Watampone dan Kepolisian Resort Bone. Peningkatan peran agen perubahan melalui sosialisasi dan pembuatan rencana aksi agen perubahan pada masing-masing perangkat daerah.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Inspektorat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.7.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 -2023***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Predikat | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian% | |
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | Proporsi OPD yang Bebas KKN | 90% | 100% | 111,11% | 15.878.393.741 | 14.514.511.912 | 91,4 | |

*Sumber Data: Data diolah oleh Inspektorat Bone (2021)*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengananggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Sasaran Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana.

Berdasarkan kinerja yaitu: Indikator Proporsi OPD yang Bebas dari KKN dengan capaian kinerja 111,11% dan capaian anggaran 91%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 9% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 19,71%.

**DATA**

**111,11%**
Capaian Kinerja

**91%**
Capaian Anggaran

**9%**
Efisiensi Anggaran

**19,71%**
Efisiensi Pengguna Sumber Daya

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai Sasaran "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)" sebagai berikut:

**Tabel 3.8.**
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**
**yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bail dan Bebas KKN | Proporsi OPD yang Bebas KKn | 108% | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut OPD dan PemDes atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP | 85% | 85% | 100% | Peningkatan koordinasi antara OPD dan Pemdes dengan APIP agar rekomendasi dapat lebih cepat ditindaklanjuti |
| | | | | Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat dan Kasus Tertentu Lainnya yang ditindaklanjuti | 97% | 80% | 82% | Melaksanakan Koordinasi dengan Pihak pengadu dan Aparat Penegak Hukum lebih intens |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggara an Pengawasan Internal berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | 85% | 88% | 104% | Peningkatan pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasa internal |
| | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT | 400 | 256 | 64% | Melakukan evaluasi terhadap target LHP sesuai Pemeriksaan yang berdasarkan PKPT |
| | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT | 180 | 232 | 129% | Melakukan evaluasi terhadap target LHP sesuai Pemeriksaan yang berdasarkan PKPT |
| | | | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT | 2 | 2 | 100% | Melakukan peningkatan Jumlah Pemeriksaan Kinerja terhadap OPD |
| | | | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT | 1 | 1 | 100% | Penigkatan kualitas laporan keuangan pemda |
| | | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggara an Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT | 144 | 144 | 100% | Meningkatkan koordinasi dengan Pihak Desa untuk peningkatan kulitas pemerintahan desa |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal yang Terlaksana | 1 | 1 | 100% | kegiatan dan target pengawsan internal |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Laporan Inventarisasi beserta Monev Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik | 4 | 7 | 175% | Melakukan Koordinasi dan komunikasi dengan OPD terkait hasil temuan BPK dan Tindak Lanjut LHP APIP |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Realisasi Pelaksanaan Penyelenggara an Pengawasan Tujuan Tertentu berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | 85% | 97% | 114% | Peningkatan realisasi pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan tujuan tertentu |
| | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu lainnya sesuai kewenangan APIP | 4 | 4 | 100% | Melakukan peningkatan penanganan laporan masyarakat sesuai kemenangan APIP |
| | | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang berpotensi/me nimbulkan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah | 80% | 71% | 89% | Melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD dan Pemdes terkait hasil temuan |
| | | | | Persentase Elemen Penilaian (Assessment) Kapablitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan | 83% | 0% | 0% | Melakukan evaluasi dan pertemuan berkala untuk penilaian kapabilitas APIP |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Realisasi Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi berdasarkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | 85% | 59% | 69% | Melakukan peningkatan pelaksanaan pendampingan dan asistensi kepada obrik |
| | | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/ Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT | 8 | 8 | 100% | Melakukan peningkatan asistensi dan pendampingan OPD dan Pemdes |
| | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/ Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT | 2 | 6 | 300% | Melakukan peningktan target terhadap pendampingan asisten dan penilaian Reformasi Birokrasi |
| | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 7 | 5 | 71% | Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi |
| | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan/ Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT | 3 | 2 | 67% | Meningkatkan penyelesaian Laporan Hasil pendapimgan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Key Process Area (KPA) yang telah memenuhi kelengkapan Dokumen Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 | 80% | 75% | 94% | Melakukan peningkatan kelengkapan dokumen penunjang Kapabilitas APIP Level 3 |
| | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Key Process Area (KPA) Elemen Kapabilitas APIP Level 3 dengan kebijakan teknis/ dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/ terupdate secara lengkap | 20 | 18 | 90% | Melakukan peningkatan penyusunan dokumen dokumen infrastruktur pengawasan yang tersusun/ terupdate secara lengkap |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Programpenunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Inspektorat Daerah | 85% | 66% | 78% | Melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan capaian kinerja indikator program |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95% | 88% | 93% | Melakukan peningkatan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 5 | 5 | 100% | Melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun | 1 | 1 | 100% | Melakukan peningkatan kualitas dokumen RKA-SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun | 1 | 1 | 100% | Peningkatan kualitas dolumen DPA-SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun | 1 | 1 | 100% | Peningkatan kualitas dolumen perubahan DPA-SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | 8 | 6 | 75% | Melakukan peningkatan kualitas dokumen evaluasi dan pelaporan capain kinerja |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu | 95% | 100% | 105% | Melakukan peningkatan kualitas penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/ Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah | 26 | 26 | 100% | Melakukan penigkatan kualitas pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun | 1 | 1 | 100% | Melakukan peningkatan kualitas dokumen pelaporan keuangan tahunan |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun | 24 | 24 | 100% | Melakukan peningkatan kualitas dokumen pelaporan keuangan periodik |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan | 95% | 95% | 100% | Melakukan penigkatan persentase jumlah ASN yang berkinerja baik |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan | 173 | 173 | 100% | Melakukan penigkatan kualitas pengadaan pakaian dinas |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi | 36 | 54 | 150% | Peningkatan jumlah dan target jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana terkait Teknis Pengawasan Internal | 3 | 3 | 100% | Melakukan peningkatan jumlah dan target kegiatan pelatihan kantor sendiri (PKS) |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 95% | 103% | 108% | Peningkatan kualitas pemenuhan pelayanan administrasi umum |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan sesuai rencana kebutuhan | 4 | 3 | 75% | Meningkatkan kualitas penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan | 12 | 12 | 100% | Melakukan peningkatan kualitas penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan | 4 | 4 | 100% | Melakukanpeningkat an penyediann peralatan rumah tangga |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencanan kebutuhan per bulan | 12 | 12 | 100% | Peningkatan jumlah penyediann logistik makanan dan minuman bagi pegawai |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan Barang cetakan & penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kabutuhan | 12 | 12 | 100% | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencanan kebutuhan | 12 | 12 | 100% | Peningkatan target dan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggara nya koordinasi dan konsultasi yang dihadiri/dilaks anakan oleh Aparat Perangkat daerah | 50 | 125 | 250% | Meningkatkan jumlah target koordinasi dan konsultasi |
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Penyediaan Aplikasi IT Pemerintahan | 1 | 0 | 0% | Pengadaan penyediann Aplikasi IT |
| | | | | Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Pengelolaan Website Perangkat Daerah | 12 | 12 | 100% | Peningkatan jumlah jasa pengelola website |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 60% | 55% | 92% | Melakukan peningkatan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan | 54 | 56 | 104% | Melakukan peningkatan jumlah pengadaa meubeler kantor |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan | 74 | 74 | 100% | Melakukan peningkatan jumlah pengadaan dan perlengkapan kantor |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | Melakukan peningkatan kualitas pemenuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi/ informasi (telepon, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan | 36 | 36 | 100% | Peningkatan jumlah jasa komunilasi/ informasi kantor |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran | 12 | 12 | 100% | Peningkatan jumlah pembayaran jasa tenaga pelayanan umum |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik | 65% | 63% | 97% | Peningkatan persentase barang milik daerah yang dipelihara |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan | 4 | 4 | 100% | Peningkatan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan |
| | | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubeleur Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan | 40 | 22 | 55% | Peningkatan meubeler yang di pelihara |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan | 56 | 50 | 89% | Peningkatan pememeliharaan gedung kantor |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan | 3 | 3 | 100% | Peningkatan Pekerjaan Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor yang lebih efektif |
| | | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Paket Pemeliharaan Rutin Sarana/ Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan | 3 | 2 | 67% | Peningkatan rehabilitasi sarana pendukung gedung kantor |

Sumber Data: Data Inspektorat 2021

Berdasarkan tabel 3.8. tentang analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran** : "Berkurangnya Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)"

**Indikator :** Proporsi OPD yang Bebas KKN

Dengan target 90 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 111,11% dengan Kategori Sangat Berhasil. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat pada Anggaran Inspektorat Daerah tahun 2021:

**Program penyelenggaraan pengawasan**

***Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal***

- Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- Sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- Sub kegiatan Pengawasan Desa
- Sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

***Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

***Kegiatan Pendampingan dan Asistensi***

- Sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan***

- Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

- Sub kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

## Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

1. Penguatan Manajemen kinerja melalui Implementasi SAKIP dan SPIP yang lebih baik;
2. Peningkatan penyelenggaraan pengawasan dalam bentuk asistensi dan pendampingan kepada OPD dan Pemdes dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Peningkatan intensitas koordinasi antara tim penyelesaian tindak lanjut dengan OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi;
4. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta penerapan reward dan punishmen atas kinerja aparat pengawsan Inspektorat daerah Kab. Bone; dan
5. Peningkatan kapabilitas APIP agar memenuhi standar IACM (Internal Audit Capability Model).

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" setelah perubahan sebesar Rp. 15.878.393.741 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

***Tabel 3.9.***
***Realisasi Anggaran***

| Uraian | Jumlah(Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| **Tujuan:** Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN | | | |
| **Kegiatan** | | | |
| • Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2.424.550.500 | 1.643.398.850 | 67,78% |
| • Penyelenggaran Pengawasan dengan tujuan tertentu | 358.604.000 | 228.693.200 | 63,77% |
| • Pendampingan dan asistensi | 191.565.000 | 88.471.000 | 46,18% |
| • Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 93.030.000 | 45.600.000 | 49,02% |
| • Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.504.500 | 18.059.750 | 68,14% |
| • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.779.466.905 | 9.666.898.599 | 98,85% |
| • Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 712.980.000 | 633.800.000 | 88,89% |
| • Administrasi umum Perangkat Daerah | 978.180.598 | 924.076.097 | 94,47% |
| • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 611.426.238 | 610.446.238 | 99,84% |
| • Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 274.286.000 | 264.680.247 | 96,5% |
| • Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | 427.800.000 | 390.387.931 | 91,25% |
| **TOTAL** | **15.878.393.742** | **14.514.511.912** | **91,4%** |

**Misi 2 : Mengembangkan Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**

**Tujuan 2 : Menurunkan Angka Kemiskinan,**dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin

Sosialisasi Persiapan Pembentukan Puskesos-SLRT Kab/Kota Se-Indonesia
Jakarta 11 Februari 2021

Untuk pernyataan kinerja tujuan di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### 1.Target dan realisasi kinerja tahun 2021

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan atau kekurangan dalam berbagai kondisi hidup. Kemiskinan berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh setiap hari atau setiap bulannya dalam memenuhi tingkat konsumsi utamanya dalam memenuhi kebutuhan dasar.

***Tabel 3.10.***
***Target dan Realisasi Kinerja 2021***

| Tujuan/ Sasaran | Indeks Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 10.00 | 10.52 | 94.8% | Berhasil |

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 Publikasi BPS Bone 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 94,8% atau dengan kategori **Berhasil.**

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Perbandingan capaian kinerja tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin dengan beberapa tahun sebelumnya digambarkan pada tabel di bawah ini :

***Tabel 3.11.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 10,55 | 10,05 | 10,68 | 10,52 | - | - | 100,29% | 93,20% | 94,8% | - | - |

Sumber Data : Publikasi BPS Bone, 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tujuan menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin Pemerintah Kabupaten Bone kurun waktu 2019-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perbandingan Capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan.

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

Perbandingan capaian kinerja tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin dengan target jangka menengah digambarkan pada tabel di bawah ini :

***Tabel 3.12.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 9,80 | 10,05 | 10,68 | 10,52 | - | - |

Sumber Data: Diolah Bappeda Kab.Bone 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin Pemerintah Kabupaten Bone jika melihat target jangka menengah masih terdapat selisih 0,72% dari realisasi tahun 2021.

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

Perbandingan capaian kinerja Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Bone dengan target dan realisasi Nasional digambarkan pada tabel di bawah ini:

***Tabel 3.13.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan***
***Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2021 | Realisasi 2021 |
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 10,52 | 9.2 - 9.7% | 9.71% |

Sumber Data: Diolah Bappeda Kab.Bone 2022

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kabupaten Bone dibandingkan dengan realisasi nasional tahun 2021 terdapat selisih 0,81 %.

## 5.Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin tahun 2021 terlihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.14.***
***Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Realisasi Kinerja >110 Sangat Berhasi | 90=<s/d<110 Berhasi | 60=<s/d<90 Cukup Berhasi | <60 Tidak Berhasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunkan angka kemiskinan | | | 94,8% | | | ✓ | |
| | Persentase penduduk miskin | 94,8% | | | | ✓ | |

Sumber Data: Diolah Bappeda Kab.Bone 2022

***Grafik 3.1.***
***Angka Kemiskinan Kabupaten Bone 2017-2021***

Sumber Data : Publikasi BPS Bone, 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.14. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan denganindikator persentase penduduk miskin Tahun 2021 dalam kategori Berhasil, dan grafik 3.1. menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja persentase penduduk miskin sebagai berikut:

**Tujuan : Menurunkan Angka Kemiskinan, dengan indikator:**

Persentase Penduduk Miskin

**Defenisi :** Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator persentase penduduk miskin Tahun 2021 dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 94,8%, dengan realisasi sebesar 10,52% dari target 10,00%, hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Jumlah produksi petani mengalami peningkatan yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan nilai tukar petani. Harga produksi naik lebih besar dari harga konsumsinya sehingga pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.
2. Adanya penurunan harga eceran tertinggi beberapa komoditas pokok seperti beras, telur, ayam dan sebagainya.
3. Rata-rata pengeluaran perkapita pada desil satu meningkat karena adanya bantuan perlindungan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah desa karena pandemic covid 19.
4. Rendahnya angka inflasi secara umum.

Indeks kedalaman kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan (P1) di Kabupaten Bone dalam periode tahun 2017-2020 menunjukkan Indeks kedalaman (P1) kemiskinan di Kabupaten Bone menunjukkan nilai kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan indek serupa di Sulawesi Selatan, akan tetapi dalam dua tahun terakhir kondisi sebaliknya terjadi dimana rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone lebih rendah dibandingkan nilai indikator serupa di Sulawesi Selatan. Berdasarkan perkembangan nilai indeks kesenjangan kemiskinan selama periode 2017-2020, terlihat bahwa nilai indeks kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone cenderung menurun namun sampai pada tahun 2019, di tahun 2020 meningkat lagi yang diakibatkan oleh dampak pandemic covid-19, sedangkan di Sulawesi Selatan cenderung menurun.

Gambaran perkembangan rasio kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2020 tersaji pada gambar berikut:

*Grafik 3.2.*
*Perkembangan Rasio Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020*

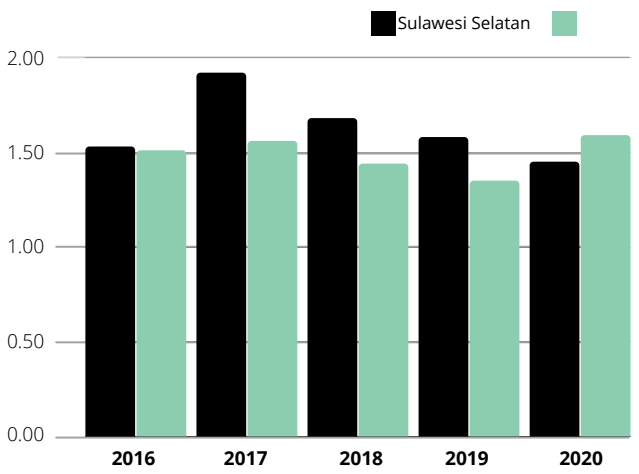


Sumber Data: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2021

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk menurunkan Persentase Angka Kemiskinan antara lain :

1. Melalui intervensi program yang penanggulangan kemiskinan berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
2. Mengupdate dan Menggunakan data terpadu kemiskinan untuk mengindentifikasi kelompok sasaran; dan
3. Sinkronisasi RPJMDes dan RPJMD Kabupaten untuk pencapaian tujuan SDG's Desa yaitu Desa tanpa kemiskinan.

## 6.Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone pada tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dalam pelaksanaan program :

***Tabel 3.15.***
***Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ SasaranStrategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capain(%) | Pagu | Realisasi | Capain(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i(e-h) |
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 10.25 | 10.00 | 94,8% | 5,129,911,582.00 | 3,798,083,226.00 | **96.21%** | -1,41% |

Sumber Data : Hasil Evaluasi RKPD 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021Pemerintah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu: capaian kinerja 94,8% dan capaian anggaran 96,21%, menunjukkan bahwa tidak ada efesiensi penggnaan sumber daya sebesar.

## 7.Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

***Tabel 3.16.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunkan angka kemiskinan | Persentase penduduk miskin | 94,8% | | | | | | |
| | | | Program pelayanan penanaman modal | Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Izin Sesuai SOP | 100 | 67,44 | 67,44 | Survey kepuasan pelayanan publik |
| | | | Progam pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | Presentase Ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi | 100 | 100 | 100 | Inovasi peningaktan kualitas |
| | | | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten | 100 | 108,7 | 108,7 | Inovasi peningaktan kualitas |
| | | | Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 100 | 112,91 | 112,91 | Inovasi peningaktan mutu |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 | 196,65 | 196,65 | Inovasi peningaktan mutu |
| | | | Program perencanaan dan pembangunan industry | Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembagan Sarana Pertanian | 100 | 100 | 100 | Inovasi peningaktan mutu |
| | | | Program perizinan dan pendaftaran perusahaan | Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100 | 82,09 | 82,09 | Kerjasama investasi |
| | | | Program pengembangan UMKM | Produksi Perikanan Tangkap | 100 | 150,52 | 150,52 | Realokasi anggaran |
| | | | pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Produksi Perikanan Budidaya | 100 | 95,88 | 95,88 | Inovasi pengelolaan dan kerjasama produksi dan pemasaran |
| | | | Program diversisifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 100 | 100 | 100 | Inovasi peningkatan kualitas |
| | | | Program pengelolaan perikanan tangkap | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100 | 16,67 | 16,67 | Tim terpadu |
| | | | Program pengelolaan perikanan tangkap | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100 | 16,67 | 16,67 | Tim terpadu |
| | | | Program pengelolaan perikanan budidaya | Persentase Peninkatan Produktivitas usaha mikro, kecil, menengah | - | - | - | Akselerasi program untuk mencapai target akhir periode RPJMD |
| | | | Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku | 100 | 51,00 | 51,00 | Inovasi dan promosi |
| | | | Program perekonomian dan pembangunan | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 50 | 50 | 50 | Mengembangkan inovasi |
| | | | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawsan dengan jumlah izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan instansi terkait | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program pengembangan ekspor | Cakupan Peningkatan Promosi Produk Unggulan | 85 | 100 | 125 | Inovasi peningkatan kualitas produk |
| | | | Progam peningkatan sarana distribusi perdagangan | Cakupan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan | 70 | 100 | 142 | Inovasi peningkatan kualitas produk |
| Meningkatnya kinerja perekonomian daerah secara berkelnajutan | Pendapatan perkapita | 52.60 * | Program pemberdayaan sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | | | | Pemutakhiran data terpadu |
| | | | Program perlindungan dan jaminan sosial | Persenta sewarga Negara korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | Pemutakhiran data |
| Tersedianya lapangan pekerjaan | Tingkat penganggura n terbuka | 4.15 | Program pelatihan kerja & produktifitas tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja bersetifikat Kompetensi | 35 | 35 | 100 | Peningkatan target sasaran |
| | | | Program penempatan tenaga kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten | 60 | 60 | 100 | Peningkatan target sasasran |
| | | | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKN) | Persentase Peningkatan Kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 100 | 169,17 | 169,17 | Anggaran di realokasi ke program lain |
| | | | Program pelayanan izin usaha simpan pinjam | Persentase Capaian Penilaian Koperasi Berprestasi | 100 | 70 | 70 | Peningkatan pelayanan simpan pinjam sektor UMKM |
| | | | Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Peningkatan harga Barang Kebutuhan pokok | 85 | 100 | 117 | Inovasi stabilisasi harga pasar |

Sumber Data : Hasil Evaluasi RKPD 2021

*Angka sementara hasil proyeksi

Berdasarkan tabel 3.16. tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan 2 : "Menurunkan Angka Kemiskinan**
**Indikator :** Persentase Penduduk Miskin
dengan target 10,00% telah **Berhasil** tercapai sebesar 10,52 atau capaian sebesar 94,8%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

1. Program pelayanan penanaman modal;
2. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
3. Proogram penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
5. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Program perencanaan dan pembangunan industri;
7. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
8. Program pengembangan UMKM;
9. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
10. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
11. Program pengelolaan perikanan tangkap;
12. Program pengelolaan perikanan budidaya;
13. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
14. Program perekonomian dan pembangunan;
15. Program pengembagan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
16. Program pengembangan ekspor;
17. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
18. Program pemberdayaan sosial;
19. Program perlindungan dan jaminan sosial;
20. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
21. Program penempatan tenaga kerja;
22. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
23. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan
24. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

## Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Mensinkronisasikan RPJMDES dengan RPJMD Kabupaten untuk mencapai salah satu tujuan SDG's Desa yaitu tanpa Kemiskinan;
2. Sinkronisasi data desa sesuai dengan Pepres 104 tahun 2021; Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan;
3. Validasi dan verifikasi data bantuan sosial;
4. Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin;
5. Bantuan modal usaha untuk UMKM; dan
6. Usaha Padat Karya.

# REALISASI ANGGARAN

***Tabel 3.17.***
***Realisasi Anggaran***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Tujuan 2 Menurunnya Angka Kemiskinan<br>**Program** | | | |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | 693.660.200,00 | 660.576.700,00 | 95,23% |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | 100% |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1.247.715.000,00 | 1.238.980.000,00 | 99,29% |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.165.910.000,00 | 1.155.850.000,00 | 99,13% |
| Program Perekonomian dan Pembangunan | 3.056.130.570,00 | 2.938.087.469,00 | 96,13% |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 5.229.946.375,00 | 5.171.427.175,00 | 98,88% |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 17.176.785.300,00 | 15.729.027.900,00 | 91,57% |
| Program Pengelolaan PerikananTangkap | 1.112.028.450,00 | 1.032.442.450,00 | 92,84% |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.286.099.050,00 | 2.269.189.050,00 | 99,26% |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 4.930.000,00 | 4.930.000,00 | 100% |
| Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 402.455.550,00 | 311.161.400,00 | 77,31% |
| Program Pengembangan UMKM | - | - | - |
| Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 57.788.100,00 | 56.536.700,00 | 97,83% |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1.006.774.000,00 | 983.253.416,00 | 97,66% |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | 20.844.000,00 | 18.080.000,00 | 86,73% |
| Program Pengembangan Ekspor | 61.416.000,00 | 52.526.400,00 | 85,52% |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.111.000,00 | 654.249.779,00 | 58,37% |
| Program Pemberdayaan Sosial | 59.742.000,00 | 59.742.000,00 | 100% |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.018.139.687,00 | 1.017.739.687,00 | 99,96% |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 57.076.850 | 41.620.850 | 72,92% |
| Program Penempatan Tenaga Kerja | 209.238.450 | 186.433.850 | 89,10% |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | 179.286.300,00 | 133.393.700,00 | 74,39% |
| Program PelayananIzin Usaha Simpan Pinjam | 35.831.700,00 | 35.831.700,00 | 100% |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 44.908.000,00 | 44.908.000,00 | 100% |
| **Total** | **35,129,911,582.00** | **33,798,083,226.00** | **96.21%** |

Sumber Data: Diolah Bappeda Kab.Bone 2022

**Sasaran 2.1 :**
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator :**

**Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

***Tabel 3.18.***
***Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,68 | 52,40% | 10,68 | Tidak Berhasil |

*Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan data di atas, target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, yaitu dengan realisasi. *3-4% dari target sebesar 7,78% atau capaian sebesar 52,40% atau kategori Tidak Berhasil.

**2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Berdasarkan data di bawah, dapat dijelaskan bahwa capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 diproyeksikan naik pada angka kisaran 3-4%.

***Tabel 3.19.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 8.91 | 7.01 | -0.25 | *3-4 | - | - | 79,56% | -2.72% | 52,40% | - | - |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Proyeksi Bappeda Tahun 2021*
**) 2021 Data Proyeksi*

**3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan tabel 3.20. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah memiliki selisih sebesar4,53-3,53.

***Tabel 3.20.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7.53 | 7.01 | -0.25 | *3-4 | - | - |

Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021
*) 2021 Data Proyeksi

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya dan Daerah Sekitar

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah dengan membandingkan dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.21.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2021 | Realisasi 2021 |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | *3-4 | 3,5 - 4 | 3,69 |

*Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan tabel 3.21. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja realisasi kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone dengan proyeksi realisasi kinerja 3-4%, kurang lebih sama dengan realisasi nasional sebesar 3,69% dan tetap berada pada target nasional sebesar 3.5-4%.

Perbandingan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tergambar pada grafik di bawah ini:

***Grafik 3.3.***
***Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Setara Tahun 2021 (Persen)***

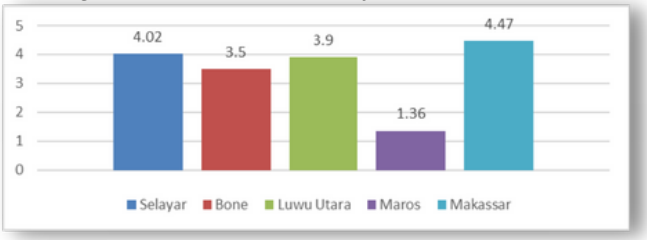


*Sumber Data: BPS Kab. Bone (2022) dan Proyeksi BappedaTahun 2021*
**) 2021 Data Proyeksi*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2021 denga angka proyeksi *3,5-4 % masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros 1,36 % dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.22.***
***Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Standar Nasional | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | | | 52,40 | | | | ✓ |
| | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 52,40 | | | | | |

*Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021*

Berdasarkan data pada tabel 3.22. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone dalam kategori Tidak Berhasil. Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 2.1. :**
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**
**Indikator : Pertumbuhan Ekonomi**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan predikat Tidak Berhasil yang mempunyai nilai capain 52,40%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

**Definisi :** Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat, yang dihitung berdasarkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi dalam kategori Tidak Berhasil, yaitu tercapai dengan proyeksi 3-4% dari target 7,78% dengan realisasi sebesar 52,40%. Capaian ini didukung oleh sektor seperti gambar di bawah ini:

***Tabel 3.23.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya***

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**
**KAB. BONE TAHUN 2020**

| Lapangan Usaha | Distribusi Persentase PDRB (Persen) | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** | **49.34** | **47.20** | **47.07** |
| Pertambangan dan Penggalian | 3.64 | 3.65 | 3.73 |
| Industri Pengolahan | 6.35 | 6.98 | 6.87 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Pengadaan Air | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Konstruksi | 10.16 | 10.64 | 10.83 |
| Real Estate | 3.39 | 3.36 | 3.49 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12.11 | 12.60 | 12.21 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2.22 | 2.32 | 2.07 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.51 | 0.53 | 0.49 |
| Informasi dan Komunikasi | 1.50 | 1.52 | 1.68 |
| Jasa Keuangan | 3.02 | 2.98 | 3.01 |
| Jasa Perusahaan | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.23 | 4.61 | 4.61 |
| Jasa Pendidikan | 2.18 | 2.22 | 2.46 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0.85 | 0.89 | 1.02 |
| Jasa lainnya | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan PDRB (Persen) | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Pertanian Kehutanan dan Perikanan** | **8.82** | **3.33** | **-0.95** |
| Pertambangan dan Penggalian | 10.98 | 9.28 | 1.85 |
| Industri Pengolahan | 2.42 | 16.62 | -1.91 |
| Pengadaan Listrik, Gas | 6.36 | 4.08 | 5.37 |
| Pengadaan Air | 8.67 | 6.80 | 8.38 |
| Konstruksi | 8.44 | 9.60 | 2.03 |
| Real Estate | 4.66 | 6.12 | 5.10 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 11.87 | 9.77 | -2.92 |
| Transportasi dan Pergudangan | 11.45 | 11.49 | -12.39 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 12.89 | 8.91 | -9.80 |
| Informasi dan Komunikasi | 11.84 | 9.32 | 11.63 |
| Jasa Keuangan | 6.38 | 2.99 | 2.58 |
| Jasa Perusahaan | 9.86 | 10.62 | -8.71 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11.56 | 15.99 | -0.21 |
| Jasa Pendidikan | 9.92 | 7.61 | 10.33 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 9.77 | 9.96 | 12.63 |
| Jasa lainnya | 12.89 | 9.75 | -9.66 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | **8.91** | **7.01** | **-0.25** |

*Sumber: BPS Tahun 2021*

Berdasarkan gambar di atas, peyebab keberhasilan dan kegagalan indikator pertumbuhan ekonomi:

1. Terjadi indikasi transformasi ekonomi pada tahun 2020, dimana dominasi sektor pertanian mengalami pertumbuhan negative, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Bone bertumbuh negatif yaitu -0,25%;
2. Pada saat pandemic covid 19 anggaran-anggaran difokuskan pada sektor kesehatan sehingga sektor ini yang bertumbuh sangat signifikan kendatipun tidak memberi pengaruh besar pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone, karena bukan merupakan sektor dominan dalam pembentukan PDRB; dan
3. Adanya dampak bencana non-alam Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional terkoreksi yang berdampak sistemik pada perekonomian Kabupaten Bone.

"Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabuapten Bone untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar;
2. Mengupayakan peningkatan sentra industry pengolahan; dan
3. Meningkatkan sumber permodalan bagi Industri Kecil Menengah."

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonimi' dengan indikator "Pertumbuhan Ekonomi" pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.24.***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,68% | *3-4% | 52,40% | 33.525.688.595,00 | 32.278.413.439,00 | 96,27% | -43,87 |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat efesiensi sumber daya.

### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.25.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 52,40% | Program Pelayanan Penanaman Modal | Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Izin Sesuai SOP | 100 | 67,44 | 67,44 | - Survey kepuasaan publik |
| | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Presentase Ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten | 100 | 108,7 | 108,7 | |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 100 | 112,91 | 112,91 | |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 | 196,65 | 196,65 | Realokasi |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembagan Sarana Pertanian | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100 | 82,09 | 82,09 | • Kerjasama investasi<br>• Realokasi anggaran |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | 100 | 150,52 | 150,52 | |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya | 100 | 95,88 | 95,88 | |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100 | 16,67 | 16,67 | Membentuk tim tanggap |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Peninkatan Produktivitas usaha mikro, kecil, menengah | - | - | - | |
| | | | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku | 100 | 51,00 | 51,00 | • Pameran<br>• Festival<br>• Digital marketing |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 50 | 50 | 50 | |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawsan dengan jumlah izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan instansi terkait | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Cakupan Peningkatan Promosi Produk Unggulan | 100 | | | |
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 | | | |

*Sumber Data: Diolah Bappeda Tahun 2022*

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengembangan UMKM
- Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat efesiensi sumber daya.

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan;
- Meningkatkankerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan;
- Menemukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui peningkatan nilai tambha hasil pertanian;
- Pembaruan sector pertanian berbasis teknologi;
- Peningkatan investasi ; dan
- Pembangunan infrasturktur berkelanjutan.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi" dengan indikator : Pertumbuhan Ekonomi setelah perubahan sebesar Rp. 33.525.688.595,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.26.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | 33.525.688.595,00 | 32.278.413.439,00 | 96,27% |
| **Program** | | | |
| • Program Pelayanan Penanaman Modal | 33.525.688.595,00 | 32.278.413.439,00 | 95,23% |
| • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | 100% |
| • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1.247.715.000,00 | 1.238.980.000,00 | 99,29% |
| • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.165.910.000,00 | 1.155.850.000,00 | 99,13% |
| • Program Perekonomian dan Pembangunan | 3.056.130.570,00 | 2.938.087.469,00 | 96,13% |
| • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 5.229.946.375,00 | 5.171.427.175,00 | 98,88% |
| • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 17.176.785.300,00 | 15.729.027.900,00 | 91,57% |
| • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1.112.028.450,00 | 1.032.442.450,00 | 92,84% |
| • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.286.099.050,00 | 2.269.189.050,00 | 99,26% |
| • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 4.930.000,00 | 4.930.000,00 | 100% |
| • Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 402.455.550,00 | 311.161.400,00 | 77,31% |
| • Program Pengembangan UMKM | - | - | -% |
| • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 57.788.100,00 | 56.536.700,00 | 97,83% |
| • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1.006.774.000,00 | 983.253.416,00 | 97,66% |
| • Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | 20.844.000,00 | 18.080.000,00 | 86,73% |
| • Program Pengembangan Ekspor | 61.416.000,00 | 52.526.400,00 | 85,52% |
| • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.111.000,00 | 654.249.779,00 | 58,37% |
| **Total** | **33.525.688.595,00** | **32.278.413.439,00** | **96,27%** |

*Sumber Data: Diolah Bappeda Tahun 2022*

**Sasaran 2.2. :**

**Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan,** dengan indikator: **Pendapatan Perkapita**

Penyerahan bantuan kepada kelompok usaha bersama

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

Berdasarkan data di samping, target Pendapatan Perkapita Kabupaten Bone Tahun 2021 dengan realisasi *52,60 juta dari target 55,70 juta sehingga capaian diperoleh sebesar 100% atau kategori Berhasil.

**Gambar 3.7.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Diolah Bappeda Tahun 2022
*) 2021 Data Proyeksi

## 2.Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

**Gambar 3.8.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023**

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | DAT AWAL 2018 |
|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita | 43,87 |

| REALISASI KINERJA | | CAPAIAN KINERJA | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,50 | 2019 | 100,02% |
| 2020 | 47.98 | 2020 | 92,98% |
| 2021 | *52.60 | 2021 | *100% |
| 2022 | - | 2022 | - |
| 2023 | - | 2023 | - |

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Diolah Bappeda Tahun 2022
*) 2021 Data Proyeksi

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh gambar sebagai berikut:

Berdasarkan data di samping, dapat dijelaskan bahwa capaian Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator kinerja Pendapatan Perkapita Kabupaten Bone berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019, 2020 dan 2021.

## 3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 3.9.**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023**

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET JANGKA MENENGAH |
|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (juta rupiah) | 58.80 |

| REALISASI KINERJA | |
|---|---|
| 2019 | 47,50 |
| 2020 | 47.98 |
| 2021 | *52.60 |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021)

Berdasarkan gambar 3.9. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita pada tahun 2021 belummemenuhi target RPJMD dengan selisih angka Rp 6,2 juta.

### 4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana gambar berikut:

Berdasarkan gambar 3.10. di bawah, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita disandingkan dengan realisasi nasional yaitu berada di bawah realisasi nasional dengan selisih 10,4 juta.

**Gambar 3.10.**
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional Target 2021 | Standar Nasional Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (juta rupiah) | *52.60 | - | 62,2 |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

### 5.Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita terlihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.27. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Pendapatan Perkapita Kabupaten Bone dalam kategori Berhasil. Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

***Tabel 3.27.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | | | *100% | | ✓ | | |
| | Pendapatan Perkapita (juta rupiah) | *100% | | | ✓ | | |

*Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021*

**Sasaran : Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan**

Dari tabel 3.27. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan/sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capaian rata-rata *100%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Pendapatan Perkapita**

  Definisi : Pendapatan Perkapita adalah merupakan besarnya pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk di Kabupaten Bone dihitung dari produk domestik regional bruto yang dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Bone dalam satuan juta rupiah/jiwa.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Pendapatan Perkapita dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai *100 %. Dengan realisasi sebesar *Rp. 52.60 juta dari target Rp. 52,60 juta Hal ini karena:

- Adanya dampak bencana non-alam Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional korkoreksi yang berdampak sistemik pada perekonomian Kabupaten Bone.
- Akibat dari terkoreksinya sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dimana sebagian besar PDRB Kabupaten Bone disumbang dari sektor tersebut, turut menkonfirmasi realisasi PDRB perkapita.

**Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan Pendapatan Perkapita, antara lain:**

### 6.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.28.***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (%) | 52,60 juta | *52.60 juta | *100 % | 34.603.570.282,00 | 33.355.895.126,00 | 96,39% | 3,69 |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Data Proyeksi Bappeda Kab.Bone Tahun 2021*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan pencapaian sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan dengan indikator Pendapatan Perkapita dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 96,39%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 3,69% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 3,69%.

**7.Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.29.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (%) | 100 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Izin Sesuai SOP | 100 | 67,44 | 67,44 | Survey kepuasaan publik |
| | | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Presentase Ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten | 100 | 108,7 | 108,7 | |
| | | | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 100 | 112,91 | 112,91 | |
| | | | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Ketersediaan Bahan Perumusan Pengoordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan | 100 | 196,65 | 196,65 | Realokasi |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Realisasi Penyediaan & Pengembagan Sarana Pertanian | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Realisasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100 | 82,09 | 82,09 | • Kerjasama investasi<br>• Realokasi anggaran |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (%) | 100 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | 100 | 150,52 | 150,52 | Realokasi |
| | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya | 100 | 95,88 | 95,88 | Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan |
| | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 100 | 16,67 | 16,67 | Membentuk tim tanggap |
| | | | Program Pengembangan UMKM | Persentase Peninkatan Produktivitas usaha mikro, kecil, menengah | - | - | - | |
| | | | Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku | 100 | 51,00 | 51,00 | • Pameran<br>• Festival<br>• Digital marketing |
| | | | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 50 | 50 | 50 | |
| | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawsan dengan jumlah izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan instansi terkait | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Program Pengembangan Ekspor | Cakupan Peningkatan Promosi Produk Unggulan | 100 | | | |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Cakupan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan | 100 | | | |
| | | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 100 | | | |
| | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase warga Negara korban Bencana Kab/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100 | | | |

*Sumber Data : Evaluasi RKPD Kab. Bone 202*

Berdasarkan tabel 3.29. tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut : Sasaran "Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan" Indikator : Pendapatan Perkapita dengan target 52,60 telah Berhasil tercapai sebesar *52.60 atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Perekonomian dan Pembangunan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengelolaan Perikanan TangkapProgram Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengembangan UMKM
- Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publiK pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas SDM pengelola penerimaan daerah;
2. Mengoptimalkan bantuan modal usaha terutama UMKM;
3. Mempermudah layanan perizinan untuk berusaha;
4. Meningkatkan KUBE dan usaha padat karya;
5. Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Meningkatkan aspek dayasaing komoditas pertanian;
7. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha;
8. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan daerah;
9. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi;
10. Pemberian stimulus ekonomi (insentifpajak dan retribusi, insentif UMKM, dan dana desa untuk kegiatan padat karya tunai);
11. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan
12. Menyelenggarakan pasar murah untuk bahan kebutuhan pokok.
13. Mengoptimalkan bantuan perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu;
14. Melakukan upayap emenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Sasaran "Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan" setelah perubahan sebesar Rp 34.603.570.282,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Sasaran 2.3. :**
**Tersedianya Lapangan Pekerjaan, dengan indikator :**
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

**Tabel 3.30.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | 34.603.570.282,00 | 33.355.895.126,00 | 96,39% |
| **Program** | | | |
| • Program Pelayanan Penanaman Modal | 693.660.200,00 | 660.576.700,00 | 95,23% |
| • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | 100% |
| • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 1.247.715.000,00 | 1.238.980.000,00 | 99,29% |
| • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.165.910.000,00 | 1.155.850.000,00 | 99,13% |
| • Program Perekonomian dan Pembangunan | 3.056.130.570,00 | 2.938.087.469,00 | 96,13% |
| • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 5.229.946.375,00 | 5.171.427.175,00 | 98,88% |
| • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 17.176.785.300,00 | 15.729.027.900,00 | 91,57% |
| • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 1.112.028.450,00 | 1.032.442.450,00 | 92,84% |
| • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 2.286.099.050,00 | 2.269.189.050,00 | 96,13% |
| • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 4.930.000,00 | 4.930.000,00 | 100% |
| • Program Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 402.455.550,00 | 311.161.400,00 | 77,31% |
| • Program Pengembangan UMKM | - | - | - |
| • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 57.788.100,00 | 56.536.700,00 | 97,83% |
| • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1.006.774.000,00 | 983.253.416,00 | 97,66% |
| • Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | 20.844.000,00 | 18.080.000,00 | 86,73% |
| • Program Pengembangan Ekspor | 61.416.000,00 | 52.526.400,00 | 85,52% |
| • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1.111.000,00 | 654.249.779,00 | 58,37% |
| • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 59.742.000,00 | 59.742.000,00 | 100% |
| • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1.018.139.687,00 | 1.017.739.687,00 | 99,96% |
| **Total** | **34.603.570.282,00** | **33.355.895.126,00** | **96,39%** |

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Sasaran "Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan" setelah perubahan sebesar Rp 34.603.570.282,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sebagaimana gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.10.**
***Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***

*Sumber Data: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2022*

Berdasarkan Gambar Capaian Kinerja Tahun 2021 diatas capaian Kinerja sasaran "Tersedianya Lapangan Pekerjaan" dengan indikator "Tingkat Pengangguran Terbuka" Pemerintah Kabupaten Bone adalah 74,24 atau dengan kriteria Cukup Berhasil.

Berdasarkan Gambar Capaian Kinerja Tahun 2021 diatas capaian Kinerja sasaran "Tersedianya Lapangan Pekerjaan" dengan indikator "Tingkat Pengangguran Terbuka" Pemerintah Kabupaten Bone adalah 74,24 atau dengan kriteria Cukup Berhasil.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Pengembangan Standarisasi Kompetensi Dan Produktivitas Pencari Kerja Maret 2021

## 2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Adapun Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya diperoleh matriks sebagai Berikut:

**Tabel 3.31.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tersedianya Lapangan Pekerjaan | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,40 | 3.01 | 3,20 | 4,15 | - | - | 81,43 | 86,75 | 74,24 | - | - |

*Sumber Data: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2022*

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisai kinerja pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) beberapa tahun sebelumnya bersifat fluktuatif.

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaiaman tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023:

**Gambar 3.11.**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023**

*Sumber Data: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2022*

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** belum mencapai target jangka menengah sebesar 3,00%.

**4. Realisasi Kinerja dan Standar pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya.**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaiaman tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023:

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone

**Gambar 3.12.**
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 |
|---|---|---|
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | Pendapatan Perkapita (juta rupiah) | *52.60 |

| Standar Nasional Target 2021 | Standar Nasional Realisasi |
|---|---|
| - | 62,2 |

*Sumber Data: BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2022*

Berdasarkan Gambar di atas, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kabupaten Bone masih tetap berada di bawah realisasi nasional.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.32.***
***Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Meningkatnya Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan | | | *100% | | ✓ | | |
| | Pendapatan Perkapita (juta rupiah) | *100% | | | ✓ | | |

*Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone 2022*

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka**

Definisi : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Angkatan Kerja.

- Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka** dalam kategori **cukup berhasil,** yaitu tercapai 74,24% dengan realisasi sebesar 4,15 dari target 3,30%. Terkait keberhasilan pada indikator ini Pemerintah Kabupaten Bone menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bekerjasama dengan berbagai pihak baik dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui quota pelatihan Balai Pelatihan Kerja Kota Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Watampone, Pemerintah Kecamatan/Desa/ Kelurahan.
- Melaksanakan Pembinaan tgerhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Program Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja) seperti Program Kartu Prakerja dan Subsidi Upah Bagi Pekerja.
- Melaksanakan sosialiasi sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi GEMAR LIMAS (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola) sebagai inovasi Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini dilaksanakan oleh Bappeda.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Adanya Pandemi Covid-19 dari 2020 mengakibatkan kurangnya investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berefek pada kurang lapangan kerja.
2. Dalam mendukung pemerintah pusat terkait penanganan Pandemi Covid-19, Dinas Ketenagakerjaan melakukan refocusing anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian indikator ini secara maksimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain:

1. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui kuota pelatihan Balai Pelatihan Kerja Kota Makassar, Lembaga Pemasyarakatan Watampone, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan dan Desa dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja.
2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
3. Melaksanakan Fasilitasi Program Pemerintah Pusat (Kementerian Tenaga Kerja) seperti Program Kartu Prakerja dan Subsidi Upah Bagi Pekerja.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketenagakerja kabupaten bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.33.***
***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,30 | 4.15 | 74,24 | 266.315.300 | 228.054.700 | 85,63 | -11,39 |

*Sumber Data: BPS Bone Tahun 2021 dan Data Olah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone tidak memiliki efisiensi.

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.34.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka | 74,24 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja bersetifikat Kompetensi | 35 | 35 | 100 | Meningkatkan Presentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi |
| | | | Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Persentase LPK yang terakreditasi | 35 | 35 | 100 | Meningkatkan presentase LPK yang terakreditasi |
| | | | Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang mengikuti pembinaan | 20 | 20 | 100 | Meningkatkan jumlah LPKS yang mengikuti pembinaan |
| | | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten | 60 | 60 | 100 | Meningkatkan presentase Tenaga Kerja yang ditempat |
| | | | Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan pelayanan antar kerja di daerah | 100 | 100 | 100 | Meningkatkan Pelayanan antar kerja daerah |
| | | | Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah kelompok usaha produktif yang mendapatkan pembinaan tenaga kerja mandiri | 1 | 1 | 100 | Meningkatkan pembinaan Tenaga Kerja Mandiri |
| | | | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Persentase Pelayanan Informasi Pasar Kerja | 100 | 100 | 100 | Meningkatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja |
| | | | Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi Pasar Kerja Online | 1 | 1 | 100 | Meningkatkan Pelaksanaan Layanan dan Penyediaan IPK online |
| | | | Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase PMI yang mengikuti pembinaan | 100 | 100 | 100 | Meningkatkan pembinaan bagi PMI |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi calon pekerja migran indonesia | 50 | 50 | 100 | Meningkatkan sosialisasibagi CPMI |

Sumber Data : RPJMD Perubahan, Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran : Tersedianya Lapangan Pekerjaan**
**Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka**

Dengan Target Kinerja 3,30% telah Cukup Berhasil tercapai sebesar 4,15% atau tercapai 74,24%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta;
2. Memaksimalkan peran perangkat Daerah (Dinas Ketenagakerjaan) dalam memberikan fasilitasi dan informasi terkait program-program pemerintah pusat maupun propinsi yang dapat dilakukan dalam pencapaian kinerja;
3. Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha;
4. Kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan pekerja sektor formal;
5. Menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal;
6. Memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK; dan
7. Memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

# REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Tujuan "Tingkat Pengangguran Terbuka" setelah perubahan sebesar Rp. 266.315.300.- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35.
Realisasi Anggaran

| URAIAN | JUMLAH (RP) ANGGARAN | JUMLAH (RP) REALISASI | % |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** : Tingkat pengangguran terbuka | | | |
| **Program** | | | |
| • Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja | 57.076.850 | 41.620.850 | 72,92% |
| • program penempatan tenaga kerja | 209.238.450 | 186.433.850 | 89,10% |
| **total** | **266.315.300** | **228.054.700** | **85,63%** |

**Sasaran 2.4.: Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan,** dengan indikator: **Indeks Gini**

Pemberian Modal Usaha Kepada UMKM Kab. Bone Tahun 2021

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

***Tabel 3.36.***
***Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini | 0.370 | *0.37 | 100% | Berhasil |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone dan Proyeksi Bappeda Kab.Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan data di samping, target Indeks Gini Kabupaten Bone Tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, yaitu *0.37 dari target sebesar 0.37, sehingga capaian diperoleh 100% atau kategori Berhasil.

dalam tabel berikut:

**2.Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.37.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Capaian Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini | 0.41 | 0.370 | 0.404 | *0.37 | - | - | 102.63% | 93,89% | *100% | - | - |

*Sumber Data : BPS Kab. Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator kinerja Indeks Gini Kabupaten Bone dalam jangka waktu 2019-2021 bersifat fluktuatif.

**3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dengan indikator Indeks Gini dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.38.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini (%) | 0.363 | 0.37 | 0.40 | *0.37 | - | - |

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Proyeksi Bappeda Kab. Bone (2021)
*) 2021 Data Proyeksi

Berdasarkan tabel 3.38. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator Indeks Gini pada tahun 2021 belum memenuhi target RPJMD dengan selisih pencapaian sebesar 0,007.

**4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator Indeks Gini dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional dan provinsi sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.39.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan***
***Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Provinsi 2021 | Nasional 2021 |
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini (%) | *0.370 | 0,377 | 0,381 |

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) Proyeksi Bappeda Kab. Bone (2021)
*) 2021 Data Proyeksi

Berdasarkan tabel 3.39. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator Indeks Gini disandingkan dengan realisasinasional dan provinsi memiliki nilai yang lebih kecil.

## 5.Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Berdasarkan data pada tabel 3.40. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Gini Kabupaten Bone dalam kategori Berhasil. Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja indeks gini dijelaskan sebagai berikut:

***Tabel 3.40.***
***Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | | | 100 | | ✓ | | |
| | Indeks Gini (%) | 100 | | | ✓ | | |

**Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Dari tabel 3.40. di samping, terlihat bahwa pencapaian sasaran Menurunnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan indikator Indeks Gini menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Indeks Gini**

Definisi : Indeks Gini adalah ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai indeks gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan apabila nilai indeks gini mendekati satu (1).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indeks Gini dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar *0.370 dari target 0.370. Namun terdapat beberapa hambatan dalam pencapaiannya:

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untukmengatasi hal tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan taraf hidup kelompok 40% terbawah;
2. Mengoptimalkan bantuan modal usaha terutama UMKM;
3. Mempermudah layanan perizinan untuk berusaha;
4. Meningkatkan Kelompok Usaha Bersama dan usaha padat karya;
5. Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Melakukan monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan
7. Menyelenggarakan pasar murah untuk bahan kebutuhan pokok.

**6.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai sasaran strategis Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator Indeks Gini yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.41.***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini (%) | 0.370 | *0.370 | 100 | 260.026.000,00 | 214.133.400,00 | 82,35% | 17,65 |

*Sumber Data : BPS Kab. Bone (2021) Proyeksi Bappeda Kab. Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan program dalam mencapai sasaran strategis Menurunnya Ketimpangan Pendapatan dengan indikator Indeks Gini terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

Indikator Indeks Gini dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 82,35%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 17,65% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 17,65%

**7.Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.42.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | Indeks Gini (%) | 100 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | Persentase Peningkatan Kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 100 | 169,17 | 169,17 | Realokasi Anggaran |
| | | | Program Pelayanan Izin Usaha SImpan Pinjam | Persentase Capaian Penilaian Koperasi Berprestasi | 100 | 70 | 70 | Peningkatan pelayanan koperasi simpan pinjam |
| | | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Peningkatan harga Barang Kebutuhan Pokok | 85 | 100 | 117 | |

Berdasarkan gambar 3.13. tentang analisa program yang menunjang kebehasilan /kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut: Sasaran: "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan" Indikator : Indeks Gini dengan target 0.370 telah Berhasil tercapai sebesar *0.370 atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

**gambar 3.13.**
**tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/ kegagalan pencapaian kinerja**

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Mengoptimalkan bantuan modal usaha terutama UMKM;
- Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- Meningkatkan Kelompok Usaha Bersama dan usaha padat karya;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat;
- Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- Melakukan monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan
- Menyelenggarakan pasar murah untuk bahan kebutuhan pokok.

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Sasaran "Menurunnya Ketimpangan Pendapatan" setelah perubahan sebesar Rp.260.026.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.43.**
**Realisasi Anggaran**

| URAIAN | JUMLAH (RP) | | % |
|---|---|---|---|
| | ANGGARAN | REALISASI | |
| **Sasaran :** Menurunnya Ketimpangan Pendapatan | 260.026.000,00 | 214.133.400,00 | **82,35%** |
| **Program** | | | |
| • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | 179.286.300,00 | 133.393.700,00 | 74,39% |
| • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 35.831.700,00 | 35.831.700,00 | 100% |
| • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 44.908.000,00 | 44.908.000,00 | 100% |
| **TOTAL** | **260.026.000,00** | **214.133.400,00** | **82,35%** |

**Misi 3 : Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Dasar Lainnya**

**Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, dengan Indikator:**

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk pernyataan kinerja tujuan tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Gambar 3.14.**
**Target dan Realisasi Kinerja 2021**

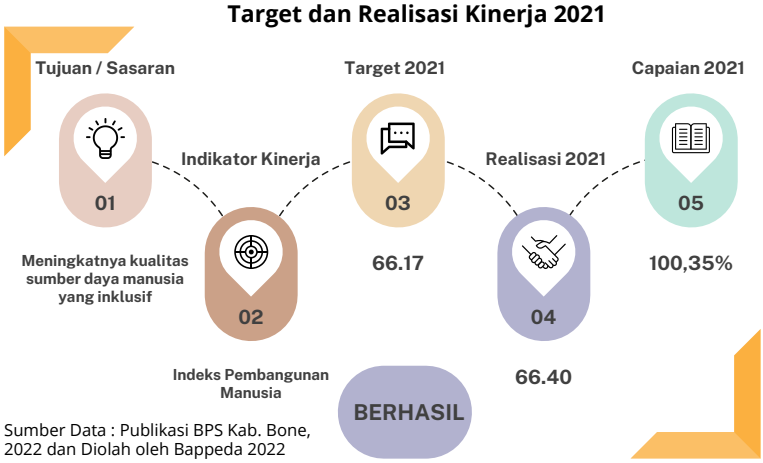


Sumber Data : Publikasi BPS Kab. Bone, 2022 dan Diolah oleh Bappeda 2022

*Peningaktan Pembangunan Manusia melalui Pencegahan Stunting dan Penanganan Gizi Buruk*

Untuk pernyataan kinerja tujuan tersebut di samping IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dari gambar disamping memperlihatkan bahwa target IPM ingin dicapai pada tahun 2021 yaitu 66,17 terpenuhi dengan realisasi 66.40 dengan capaian 100,35% atau predikat Berhasil.

### 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator Indeks Pembangunan Manusia apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.44.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | Indeks Pembangunan Manusia | 65.04 | 65.67 | 66.06 | 66.40 | - | - | 100.04 | 99,23 | 100,35 | - | - |

*Sumber Data : Publikasi BPS Bone, 2022 dan Diolah oleh Bappeda 2022*

Berdasarkan tabel 3.44 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan tujuan bahwa tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" capaian tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif dan cenderung naik.

### 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

***Tabel 3.45.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | Indeks Pembangunan Manusia | 67.01 | 65.67 | 66.06 | 66.40 | - | - |

Sumber data : Publikasi BPS Kab. Bone, 2022 dan Diolah oleh Bappeda 2022

Berdasarkan tabel 3.45. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan tujuan bahwa tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" belum memenuhi target RPJMD dengan selisih 0,61, namun mengalami trend peningkatan dibandingkan dua tahun terakhir.

### 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" dibandingkan dengan realisasi kinerja nasional dan provinsi sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.46.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan***
***Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Provinsi 2021 | Nasional 2021 |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | Indeks Pembangunan Manusia | 66.40 | 72,24 | 72,29 |

Sumber data : Publikasi BPS Kab. Bone, 2022

Berdasarkan tabel 3.46. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja tujuan tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" masih berada di bawah realisasi provinsi dan nasional.

### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan "Indikator Indeks Pembangunan Manusia" kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.47.***
**Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | | | **100,35%** | | ✓ | | |
| | Indeks Pembangunan Manusia | **100,35%** | | | ✓ | | |

Sumber data: Diolah oleh Bappeda 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.47. di samping, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan "Indikator Indeks Pembangunan Manusia" dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif"dengan "Indikator Indeks Pembangunan Manusia".**

Dari tabel 3.47., terlihat bahwa pencapaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capain rata-rata 100,35%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Strategi percepatan IPM Kabupaten Bone kurun waktu 2 tahun terkahir sebagai berikut:

- Optimalisasi pemamfaatan dana desa melalui singkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Implementasi inovasi Gerakan masyarakat Lisu Massikola (GEMAR LIMAS) atau program penanganan anak tidak sekolah melalui penguatan sistem database desa/kelurahan (SDDK);
- Mengoptimalkan fungsi kelembagaan Pusat kegiatan Belajar masyarakat (PKBM);
- Menginisiasi terciptanya sekolah ramah anak dan sekolah sehat serta sekolah penggerak;
- Mengoptimalkan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
- Mendorong terwujudnya layanan posyandu yang holistik dan integratif;
- Mendorong terciptanya desa peduli ibu dan anak;
- Menginisiasi terbitnya Perda pencegahan perkawinan anak;
- Memastikan layanan jaminan Kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu;
- Mengoptimalkan bantuan perlindungan sosial bagi kepala keluarga yang desil satu;
- Mengoptimalkan bantuan modal usaha terutama UMKM;
- Mempermudah layanan perizinan untuk berusaha;
- Meningkatkan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) khusus penduduk miskin dan usaha padat karya;
- Meningkatkan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- Meningkatkan aspek daya saing komoditas pertanian.

### 6. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

**Gambar 3.15.**
**Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

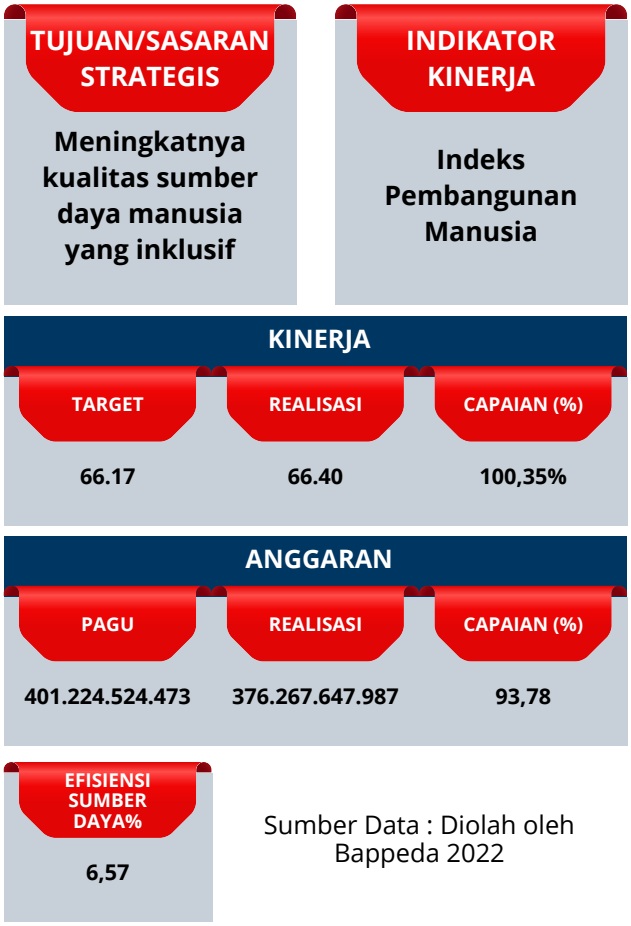


Sumber Data : Diolah oleh Bappeda 2022

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia" Pemerintah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu: capaian kinerja 100,35% dan capaian anggaran 93,78%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 6,22% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 6,57%.

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia", sebagai berikut:

***Tabel 3.48.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/KegagalanPencapaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif | Indeks Pembangunan Manusia | 100,35% | | | | | | |
| Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat | Indeks pendidikan | 60.16 | Program pengelolaan pendidikan | Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/ MTs) (SPM) | 100 | 92,98 | 92,98 | Melakukan sosialisasi "gerakan kembali bersekolah, pencegahan pernikahan anak, sekolah ramah anak, sekolah sehat, pencegahan stunting dengan bersinergi semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, akses dan pemerataan layanan Pendidikan |
| | | | Program pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM) | 100 | 92,34 | 92,34 | |
| Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Indeks kesehatan | 72.63 | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Angka kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Balita Gizi Buruk | 63,00<br>6,44<br>0,28 | 84,23<br>2,06<br>0,11 | 66,3<br>168<br>157,7 | penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pembahasan penyebab kasus kematian ibu dan anak sejak di masyarakat sampai di fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi | 100 | 100 | 100 | Pembinaan dan Pengawasan tenaga serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan |
| | | | sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 1. Persentase pemenuhan sediaan farmasi<br>2. Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan | 100 | 100 | 100 | Peningkatan ketersediaan obat , bahan habis pakai ditambah stok penyangga (buffer stock) |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Persentase pemenuhan sediaan makanan dan minuman | | | | |
| | | | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100 | 100 | 100 | Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 200 sekolah sebagai pilot projet percontohan untuk 27 Kecamatan |
| *Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak* | Indeks pemberdayaan gender | 97,9 | Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase Indikator (PUG) Peningkatan Strategi Pembangunan Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%) | 90,50 | 100 | 110,50 | Peningkatan jumlah Lembaga pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kab.Bone |
| | | | Program pemenuhan hak anak (PHA) | Persentase Persentase anak korban kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%) | 90,02 | 100 | 111,09 | Pengembangan pelembagaan pemenuhan hal anak Kewenangan Kab.Bone |

*Sumber Data: Diolah oleh Bappeda 2022*

Berdasarkan tabel 3.48. tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan "Indikator Indeks Pembangunan Manusia", disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif"**
**Indikator : "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"**

dengan target 66,17 telah Berhasil tercapai sebesar 66,40 dengan capaian 100,35%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Program pengelolaan pendidikan
- Program pendidik dan tenaga kependidikan
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan uoaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- Program pemenuhan hak anak (PHA)

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil tujuh analisis di atas, upaya perbaikan pencapaian Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan Indikator "Indeks Pembangunan Manusia", disarankan beberapa hal antara lain:

1. Program di bidang Pendidikan masih dibutuhkan program Pendidikan gratis, program pengembalian anak putus sekolah untuk dapat bersekolah kembali;
2. Program di bidang kesehatan perlu meningkatkan Kesehatan ibu dan anak, pernurunan stunting dan program jaminan Kesehatan masyarakat yang tepat sasaran; dan
3. Diperlukan peningkatan peran perempuan dan anak dalam segala aspek pembangunan dan program perbaikan infrastruktur dan kewirausahaan kepada masyarakat yang mempunyai hasrat untuk membuka usaha, serta tetap mempertahankan iklim yang kondusif untuk melakukan usaha, terutama bagi kelompok usaha wanita.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Tujuan "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif" dengan "Indikator Indeks Pembangunan Manusia" setelah perubahan sebesar Rp. 401.224.524.473,00 (Empat Ratus Satu Miliyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.49.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif | **401.224.524.473** | **376.267.647.987** | **93,78** |
| **Program** | | | |
| • Program pengelolaan pendidikan | 146.719.838.210 | 137.344.188.606 | 82,13% |
| • Program pendidik dan tenaga kependidikan | 1.096.593.000 | 1.090.933.000 | 99,48% |
| **Program** | | | |
| • Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 263,492,369,608 | 246,497,111,768 | 93,55 |
| • Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 8,008,886,393 | 7,289,688,395 | 91,02 |
| • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 553.338.378 | 182,823,000 | 33,04 |
| • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 140.274.701 | 126,640,000 | 90,28 |
| **Program** | | | |
| • Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan | 286.631.000 | 286.631.000 | 100% |
| • Program pemenuhan hak anak (PHA) | 121.792.100 | 121.162.100 | 99.4827 |
| **Total** | **34.603.570.282,00** | **33.355.895.126,00** | **96,39%** |

**Sasaran 3.1. : Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat,** dengan indikator **Indeks Pendidikan**

Untuk pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### 1.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

*Tabel 3.50.*
*Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021*

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | 60,40 | 60,15 | 99,59% | Berhasil |

*Sumber Data: BPS Kab. Bone dan Proyeksi Bappeda Kab.Bone (2021)*
**) 2021 Data Proyeksi*

Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1 Pada Kegiatan Lokakarya 9

Berdasarkan data di atas, target Indeks Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021 diperoleh realisasi sebesar 60,15 dari target sebesar 60,40, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,59% atau kategori Berhasil.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat", dengan indikator "Indeks Pendidikan" apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.51.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | 58,43 | 58,82 | 59,61 | 60,15 | - | - | - | - | 99,59 | - | - |

*Sumber Data: Data BPS (2021) dan Data olah Dinas Pendidikan (2021)*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat", dengan indikator "Indeks Pendidikan" capaiannya tidak dapat disandingkan karena merupakan IKU baru dari Perubahan RPJMD. Namun realisasi kinerjanya mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat", dengan indikator "Indeks Pendidikan" dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.52.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018-2023***

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | 61,98 | 58,82 | 59,61 | 60,15 | - | - |

Sumber Data: BPS Kab. Bone (2021) dan Proyeksi Bappeda Kab. Bone (2021)
*) 2021 Data Proyeksi

Berdasarkan tabel 3.52. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat", dengan indikator "Indeks Pendidikan" belum memenuhi target RPJMD dengan selisih angka 1,83.

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaranstrategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.53.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Realisasi Nasional 2021 |
|---|---|---|---|
| Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | 60,15 | 66,01 |

Sumber Data: Data BPS (2021) dan Data olah Dinas Pendidikan (2021)

Berdasarkan tabel 3.68. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi nasional pada sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" masih di bawah realisasi nasional.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

**Sasaran Strategi** | **Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat**

**% Capaian** | **99,59%**

**Gambar 3.16. Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021**

**Indikator Kinerja** | **Indeks Pendidikan**

**Rata-rata Capaian** | **99,59%**

**Predikat** 90=<s/d,110 | **Berhasil**

Berdasarkan data pada gambar 3.16. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" dalam kategori **Berhasil.**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran : Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat**

Dari gambar 3.16. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata 99,59%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Indeks Pendidikan**
**Definisi : Indeks** Pendidikan adalah komponen yang menyusun **Indeks** Pembangunan Manusia (IPM), yang diperoleh Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indeks Pendidikandalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 60,15 dari target 60,40 sehingga capaiannya 99,59%. Hal ini karena:

1. Mengupayakan penerbitan regulasi dan implementasi tentang penanganan anak tidak sekolah, yang memungkinkan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berkonstribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah yang akan berpengaruh langsung terhadap rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
2. Melakukan perbaikan/melengkapi fasilitas /sarana sekolah, melakukan perbaikan terhadap kualitas Pembelajaran melalui pemanfaatan sumber daya yang ada yang berpengaruh langsung terhadap Harapan lama sekolah.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- Masih banyak masyarakat yang putus sekolah yang membutuhkan program paket, baik paket A, Paket B dan Paket C serta Pendidikan Kecakapan Hidup;
- Belum tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

**UPAYA** yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan "Indeks Pendidikan" antara lain:

- Melakukan sosialisasi "gerakan kembali bersekolah, pencegahan pernikahan anak, sekolah ramah anak, sekolah sehat, pencegahan stunting dengan bersinergi semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, akses dan pemerataan layanan Pendidikan;
- Mengembangkan Sosialisasi program Pendidikan Guru Penggerak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di dalam dan sekitar sekolah dengan tujuan untuk menggalang kekuatan dan potensi di lingkungan untuk bersama-sama menggerakkan pemahaman dan pengetahuan terkait pembelajaran berpusat pada murid;
- Melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan terkait IT (Ms Office, Google Sites, Blog, Video Pembelajaran) dengan tujuan untuk mempersiapkan sekolah menghadapai era digital yang pada akhirnya berdampak pada murid; dan
- Penambahan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran sesuai standar Pendidikan.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

***Tabel 3.54.***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | Indeks Pendidikan | 60,40 | 60,15 | 99,59%* | 146.719.838.210 | 138.435.121.606 | 94,35 | 5,24 |

*Sumber Data: Data BPS (2021) dan Data olah Dinas Pendidikan (2021)*

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Pendidika dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

**"Indikator Indeks Pendidikan dengan capaian kinerja 99,59% dan capaian anggaran 94,35%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 5,65% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 5,24%"**

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai Sasaran "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan indikator "Indeks Pendidikan" sebagai berikut:

**Tabel 3.55.**
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**
**yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat* | Indeks Pendidikan | 99,59%* | Program Pengelolaan Pendidikan | Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM) | 100 | 92,98 | 92,98 | Melakukan sosialisasi "gerakan kembali bersekolah, pencegahan pernikahan anak, sekolah ramah anak, sekolah sehat, pencegahan stunting dengan bersinergi semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, akses dan pemerataan layanan Pendidikan |
| | | | | Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM) | 100 | 92,34 | 92,34 | |
| | | | | Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (SPM) | 100 | 4,06 | 4,06 | |
| | | | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualifikasi D-IV-S1 dan Bersertifikasi (%) | 76,50 | 91,62 | 119.76 | Memfasilitasi Tenaga Pendidik untuk melanjutkan Studi ke jenjang S.1 yang belum berstatus Sarjana Memfasilitasi Tenaga Pendidik untuk mengikuti seleksi PPG |

Sumber Data : Data BPS (2021) dan Data olah Dinas Pendidikan (2021)

Berdasarkan tabel 3.55. tentang analisa program yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran : "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Lapisan masyarakat"**

**Indikator : Indeks Pendidikan**
dengan target 60,40 telah Berhasil terealisasi sebesar 60,15 atau tercapai 99,59%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

**Upaya Perbaikan Berikutnya**
Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif**
**Sasaran : Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat.**

- Melakukan diklat bagi guru, kepala sekolah dan pengawas baik di jenjang TK maupun di jenjang SD/MI dan SMP/MTs;.
- Melakukan lomba berprestasi baik kepada Guru, Kepala sekolah dan Pengawas di TK, SD dan SMP untuk memberikan motivasi dalam peningkatan konfetensi ;
- Melakukan Diklat Laboran dan Pustakawan;
- Mengefektifkan pelaksanaan KKG, MGMP, KKKS, KKPS pada semua jenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- Membangun RKB, perpustakaan dan laboratorium bagi SMP, merehabilitasi ruang kelas dengan prinsip prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan aksesibiltas peserta didik serta anggaran yang tersedia;
- Menggalakkan sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak-anak sebagai sarana intelektual mencapai sukses kehidupan yang lebih layak; dan
- Menggalakkan kampanye gerakan kembali bersekolah, pencegahan pernikahan anak, sekolah ramah anak, sekolah sehat, pencegahan stunting dengan bersinergi semua stakeholder untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, akses dan pemerataan layanan Pendidikan.

# REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Tujuan "Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" setelah perubahan sebesar **Rp. 146.719.838.210.-** (Seratus Empat Puluh Enam Miliyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.56.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Tujuan :<br>Membaiknya Layanan Pendidikan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat | | | |
| **Program** | | | |
| • Pengelolaan Pendidikan | 146,719,838,210 | 137.344.188.606 | 82,13% |
| • Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.096.593.000 | 1.090.933.000 | 99,48% |
| **Program** | | | |
| **Total** | **34.603.570.282,00** | **33.355.895.126,00** | **96,39%** |

## Sasaran 3.2. :
## Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

**Indeks Kesehatan**

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Peningkatan derajat kesehatan dapat diukur dari tingkat mortalitas (kematian), mordibitas (kesakitan), dan fertilitas (kelahiran). Salah satu indikator perkembangan derajat kesehatan yaitu untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya, yang diukur melalui Indeks Kesehatan. Selanjutnya pengukuran kinerja Indeks Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 sebagai berikut:

Penyerahan Penghargaan Bidang Kesehatan, STBM Award dan konvergensi stunting Penyelenggaraan kabupaten/Kota Sehat

### 1.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepadaseluruh lapisan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Gambar 3.17.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

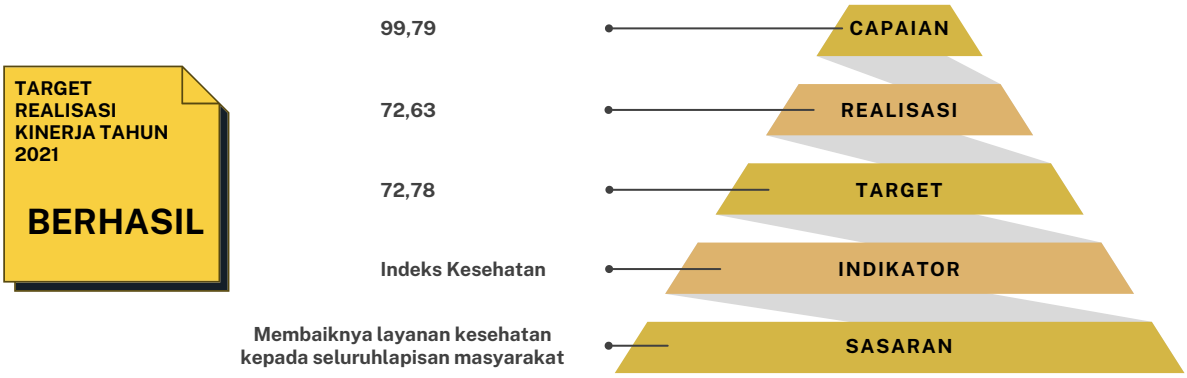


Sumber Data : BPS Kab. Bone Tahun 2021

Berdasarkan data di atas sasaran "Membaiknya layanan kesehatan kepada Seluruh Lapisan Masyarakat" dengan Indikator "Indeks Kesehatan" diperoleh realisasi sebesar 72,63 dari target 72,78 dan diperoleh capaian sebesar99,79% atau kategori Berhasil.

### 2.Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepadaseluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

***Tabel 3.57.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021***

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Indeks Kesehatan | 71.54 | 72.12 | 72.42 | 72.63 |

*Sumber Data : BPS Kab. Bone tahun 2021*

Dilihat dari tabel disamping sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepadaseluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan, Angka Indeks Kesehatan penduduk Kabupaten Bone mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu 2018-2021.

### 3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada RPJMD

Analisa berikutnya dalam mengukur kinerja sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepadaseluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan terhadap target jangka menengah seperti tabel dibawah ini :

***Tabel 3.58.***
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target RPJMD**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2010 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Indeks Kesehatan | 73,51 | 72,12 | 72,42 | 72,63 | 0 | 0 |

*Sumber Data : BPS Kab. Bone tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis "Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat" dengan indikator Indeks Kesehatan target jangka menengah belum mencapai target dengan seslisih angka0,88.

**4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan/Standar Nasional lainnya/Realisasi Kinerja Kabupaten/Kota sekitar**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan adalah dengan membandingkan dengan realisasi kinerja Kabupaten/Kota sekitar sebagaimana gambar berikut:

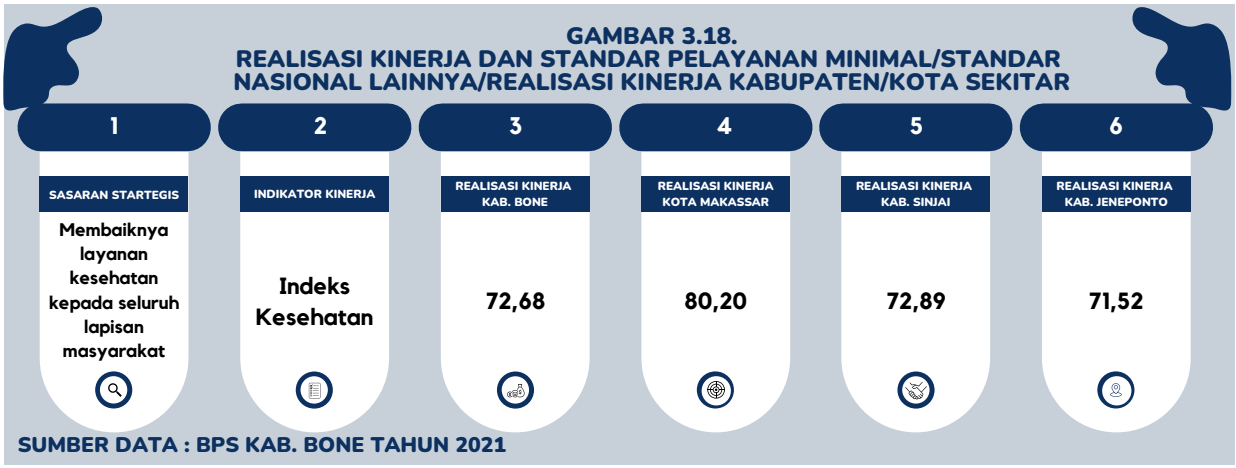


Dari gambar 3.18. di atas dapat dijelaskan bahwa dari indikator Kinerja "Indeks Kesehatan" Pemerintah Kabupaten Bone dengan perbandingan Kabupaten/Kota sekitar masih dibawah dari Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai, dan lebih tinggi dari Jeneponto.

**5.Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator Indeks Kesehatan dalam rangka pencapaian sasaran startegis Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dapat dilihat tabel ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.59.***
***Ikhtisar Capaian Kinerja Kab. Bone Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | | | **99,79%** | | ✓ | | |
| | Indeks Kesehatan | **99,79%** | | | ✓ | | |

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan Indikator Indeks Kesehatan di atas Indeks Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2021 berada pada predikat **Berhasil.**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan indikator Indeks Kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran : Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
- Indikator : Indeks Kesehatan
- Definisi : Indeks Kesehatan adalah suatu ukuran yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kesehatan dikategorikan Berhasil yaitu tercapai 99,79 dengan realisasi sebesar 72,68 dengan target 72,78. Hal ini disebabkan karena:

- Penekanan pada angka kematian Ibu/bayi/balita
- Pelayanan Kesehatan pada penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai standar
- Upaya promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten

Adapun Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan Indeks Kesehatan antara lain :

- Penyempurnaan kualitas perencanaan pembangunan kesehatan;
- Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Penyempurnaan kebijakan dan penganggaran di bidang kesehatan;
- Melaksanakan promosi dan edukasi terkait dengan perilaku hidup sehat dan gizi, serta meningkatkan kualitas penanganan terkait masalah tersebut;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerima layanan BPJS dan
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan.
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

## 6.Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah Sumber Daya Manusia, Sapras kantor dan anggaran dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berikut adalah tabel untuk menganalisis sumber daya Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

***Tabel 3.60.***
***Efesiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat | Indeks Kesehatan | 72,78 | 72,63 | 99,79 | 254,096,263,163 | 237,424,733,281 | 93,43 | 6,35 |

*Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Tahun 2021*

Berdasarkan tabel efesiensi sumber daya di atas, hasil analisis efesiensi penggunaan sumber daya (Anggaran) maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan sasaran Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat terdapat efesiensi anggaran dan efektivitas pengunaan dana berdasrakan kinerja yaitu Indeks Kesehatan dengan capaian 99,79% dan capaian anggaran 75,63%, menunjukkan bahwa efesiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,35%.

## 7.Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.61.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat* | Indeks Kesehatan | 99,59%* | Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 1. Angka kematian Ibu<br>2. Angka Kematian Bayi<br>3. Angka Balita Gizi Buruk | 63,00<br>6,44<br>0,28 | 84,23<br>2,06<br>0,11 | 66,3<br>168<br>157,7 | penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui pembahasan penyebab kasus kematian ibu dan anak sejak di masyarakat sampai di fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi | 100 | 100 | 100 | Pembinaan dan Pengawasan tenaga serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 4.Persentase pemenuhan sediaan farmasi 5.Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan 6.Persentase pemenuhan sediaan makanan dan minuman | 100 | 100 | 100 | Peningkatan ketersediaan obat , bahan habis pakai ditambah stok penyangga (buffer stock) |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | 100 | 100 | 100 | Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 200 sekolah sebagai pilot projet percontohan untuk 27 Kecamatan |

Berdasarkan tabel 3.61. tentang Analisa program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
- Indikator : Indeks esehatan

Dengan target 72,78 telah Berhasil tercapai sebesar 72,63 atau tercapai 99,79%. Indikator Indeks Kesehatan ini dapat terlaksana melalui Program :

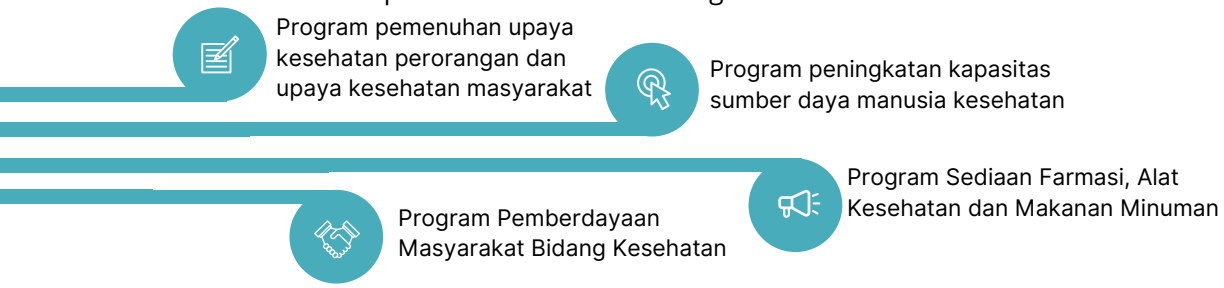


**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk mendorong Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- Pemenuhan Sarana Prasarana di Puskesmas maupun Puskesmas pembantu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
- Mendorong status puskesmas non rawat Inap meningkat menjadi Puskesmas Rawat Inap;
- Pendampingan Puskesmas melalui supervise dan monitoring terhadap penurunan Angka kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Stunting serta Penyakit menular dan tidak menular;
- Mendorong peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (seluruh penduduk tercover);
- Advokasi terhadap pihak terkait terhadap serta peningkatan fungsi koordinasi melalui upaya koordinas di tingkat desa maupun kecamatan untuk meminimalisir hambatan pelaksanaan kegiatan puskesmas;
- Percepatan pemenuhan vaksinasi tahap 2 untuk menekan resiko terpapar Covid-19.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Derah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dalam mewujudkan Misi ke 3 Kabupaten Bone "Meningkatkan akses,pemerataan, dan kualitaspelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya", Sasaran 3.2. "Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat" yang Indikatornya adalah Indeks Kesehatan. Setelah perubahan sebesar Rp. 254.096.263.163 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.62.
Realisasi Anggaran Tahun 2021

| Uraian | Jumlah (Rp) Anggaran | % Realisasi |
|---|---|---|
| **Sasaran :**<br>**Membaiknya Layanan Kesehatan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat**<br>**Indikator :**<br>**Indeks Kesehatan** | **254.096.263.163** | **76,97** |
| **Program** | | |
| • Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 246,497,111,768.00 | 93,55 |
| • Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | 7,289,688,395.00 | 91,02 |
| • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 182,823,000.00 | 33,04 |
| • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 126,640,000.00 | 90,28 |

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2021

**Sasaran 3.3. :**
**Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dengan indikator: Indeks Pemberdayaan Gender IPG**

### 1.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

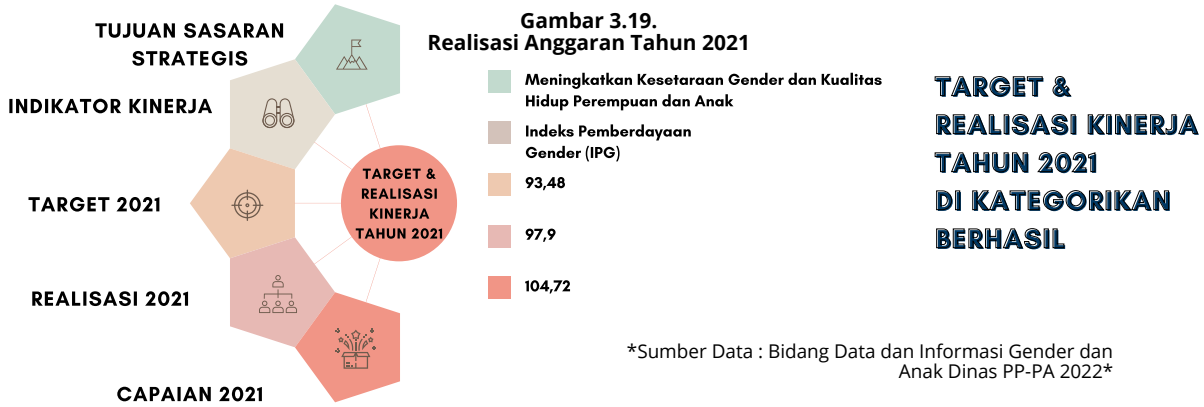


Gambar 3.19.
Realisasi Anggaran Tahun 2021

*Sumber Data : Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak Dinas PP-PA 2022*

Berdasarkan data di atas, target Indeks Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 telah Mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, dengan nilai setelah dilakukan Penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2021 dicapai nilai 104,72%.

## 2.Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Pemerintah KabupatenBone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian sasaran **"Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak"** dengan indikator dengan **"Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)"**, apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.63.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 IPG Indeks Pemberdayaan Gender**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | | 93,25 | 93,33 | 97,9 | - | - | 100 | 100 | 104,72 | - | - |

**Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2022**

**Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 belum diperoleh**

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan **"Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak"** dengan capaian telah mencapai target RPJMD, namun mengalami trend peningkatan setiap tahunnya.

## 3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerjatujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka MenengahKabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.64.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | 93,64 | 93,25 | 93,33 | 97,9 | - | - |

*Sumber Data: Dinas PP-PA Kab. Bone 2022*

Berdasarkan tabel 3.64. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2019-2021 untuk Sasaran **"Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak"**,dengan indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)"** telah mencapai target RPJMD tahun 2021, telah mengalami trend peningkatan setiap tahunnya.

## 4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tidak mempunyai realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional.

Berdasarkan dibawah dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dengan tujuan "Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak" dengan indikator "Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)" Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone bukan termasuk pemangku standar pelayanan minimal maupun standar pelayanan nasional sehinggah tidak bisa disandingkan.

***Gambar 3.20.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya***

*Sumber Data: Dinas PP-PA Kab. Bone 2022*

## 5.Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.65.***
**Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan indikator Kinerja**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | | | **104,72%** | | ✓ | | |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | **104,72%** | | | ✓ | | |

* Sumber data : Dinas PP-PA 2022 dan UPT P2TP2A Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.65. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran **"Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak" dalam kategori Berhasil.**

**Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:**

## Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

pada tabel 3.65. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak", dengan indikator Kinerja "Indeks Pemberdayaan Gender" Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capaian rata-rata 104,72%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IPM)**

**Definisi : Indek Pemberdayaan Gender (IPG) :** $\frac{\text{IPM Laki-laki}}{\text{IPM Perempuan}}$

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPM) dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 104,72%. dengan realisasi sebesar 97,9 % dari target 93,48% hal ini karena:

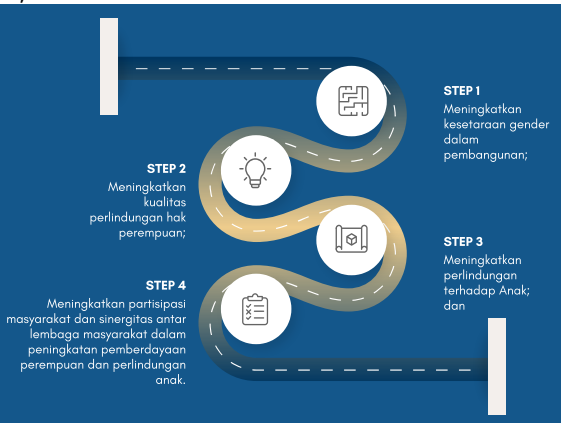


**Tabel. 3.64.**
**Data Jumlah Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bone 2021**

| No. | Jenis Kekerasan | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | KDRT | 77 | 25 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| 2. | Fisik | 44 | 22 | 45 | 0 | 17 | 0 |
| 3. | Fisikis | 16 | 2 | 13 | 0 | 12 | 4 |
| 4. | Penelantaran | 24 | 11 | 16 | 16 | 7 | 3 |
| 5. | Seksual | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 6. | Penganiayaan | 0 | 0 | 62 | 9 | 20 | 2 |
| 7. | Pemerkosaan | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | |
| 8. | Pencabulan | 0 | 0 | 39 | 11 | 9 | 5 |
| 9. | Persinahan | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | |
| 10. | Membawa lari Anak | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| 11. | Pencurian (ABH) | 24 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 12. | Penemuan Bayi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pembunuhan Bayi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Persetubuhan | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| 15. | Pengancaman (SIKIS) | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 16. | Perebutan Hak Asuh Anak | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 17. | Penelantaran Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Aborsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Menikah Tampa Izin | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Pemaksaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Pemerkosaan dibawa Umur | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | **Total** | **198** | **97** | **228** | **105** | **99** | **25** |

Sumber Data : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone 2022

**Grafik 3.4.**
**Kasus Kekerasan Perempuan tahun 2021**

Unit Pelayanan Terpadu P2PT2A
Data Korban Kekerasan Perempuan Tahun 2021

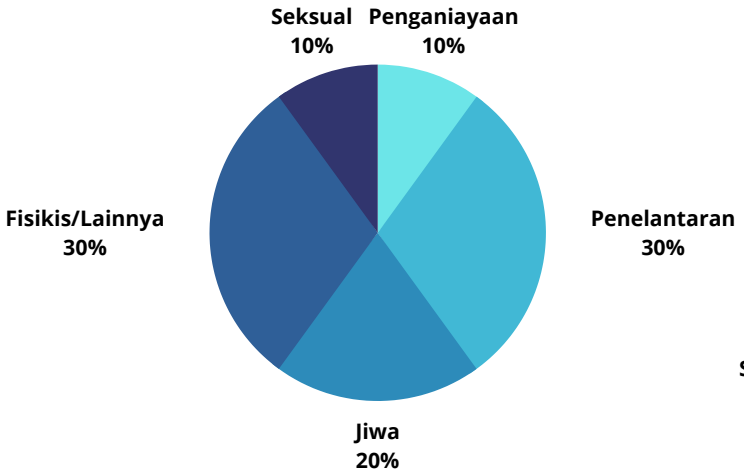


**Jenis Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021**

**Grafik 3.5.**
**Kasus Kekerasan Anak tahun 2021**

Unit Pelayanan Terpadu P2PT2A

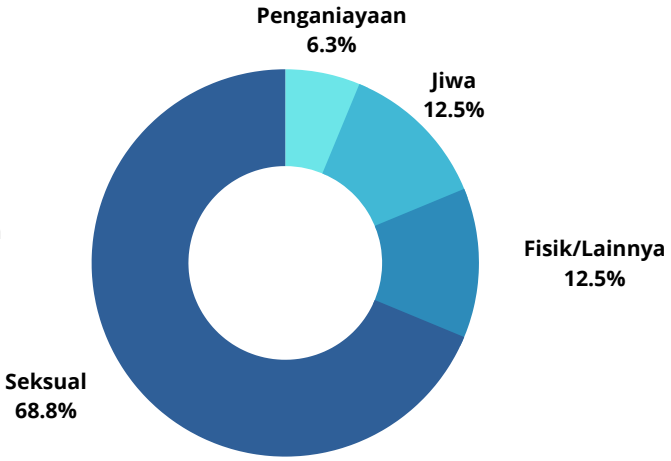


**Jenis Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021**

## Foto Dokumentasi Penghargaan Tingkat Nasional Anugrah Parahita Ekapraya (APE) preidikat utama

## Foto Dokumentasi Penghargaan Tingkat Nasional Kota Layak Anak KLA Pringkat Nindya

**Pencapaian di atas telah memenuhi target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:**

1. Informasi data untuk penyusunan dokumen perencanaan kurang faktual.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
3. Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
4. Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PP-PA.
5. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
6. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
7. Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja; dan
8. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.

**Beberapa Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk meningkatkan "Indeks Pemberdayaan Gender" antara lain :**

1. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
2. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
3. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak, Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
6. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
7. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Untuk lebih jelasnya melihat hasil capaian Kinerja peningkatan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dpa dilihat dari jenis kekerasan terhadap perempuan dibawah ini :

## 6.Efsiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

*Tabel. 3.65.*
*Capaian Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kinerja Anggaran Tahun 2021*

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | 93,48 | 97,9 | 104,72 | 408.423.100 | 408.360.100 | 99,98 | 4,74 |

**Sumber Data: Dinas PP-PA Kab. Bone 2022*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja denganangaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan indikator indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dengan capaian kinerja 104,72% dan capaian anggaran 99,98%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 0,02% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 4,74%.

**7.Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.68.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak* | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) | 104,72 | Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase Indikator (PUG) Peningkatan Strategi Pembangunan Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%) | 90,50 | 100 | 110,50 | Peningkatan jumlah Lembaga pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kab.Bone |
| | | | Program pemenuhan hak anak (PHA) | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%) | 90,02 | 100 | 111,09 | Pengembangan pelembagaan pemenuhan hal anak Kewenangan Kab.Bone |

**Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone*

Berdasarkan tabel 3.68. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** **Sasaran : Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)**

Dengan target 93.48% telah **Berhasil** tercapai sebesar 93.61% atau tercapai 101.13%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota
      b. Sub Kegiatan : Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kota pada tahun 2021 dengan melalui 9 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Indikator : Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar **Rp. 3.234.707.260** (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.69.**
**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021**

| Uraian | Jumlah (Rp) Anggaran | Jumlah (Rp) Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Sasaran : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** | **918.396.800** | **662.165.300** | **72,10** |
| **Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)** | **918.396.800** | **662.165.300** | **72,10** |
| **Program** | | | |
| • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 286.631.000 | 286.631.000 | 100% |
| • Program Perlindungan Perempuan | 340.300.500 | 93.846.450 | 27.57% |
| • Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 90.098.500 | 89.098.500 | 98.88% |
| • Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 36.788.200 | 33.900.800 | 92.15% |
| • Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | 121.792.100.00 | 121.162.100.00 | 99.4827 |
| • Program Perlindungan Khusus Anak | 42.816.500 | 37.556.450.00 | 87.7149 |
| **Total** | **918.396.800** | **662.165.300** | **72,10** |

**Misi 4 : Mengoptimalkan Akselerasi pembangunan daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan**

**Tujuan 4. :** Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan indikator:

> **Indeks Desa Membangun**

**Sasaran : Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman, dengan indikator:**

**> Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri**

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Berdasarkan data di samping, dapat di jelaskan bahwa pada tujuan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun sebesar 0,6519, realisasi sebesar 0,6769, capaian 103,83% dengan kategori Berhasil.

***Tabel 3.70.***
***Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021***

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | Indeks Desa Membangun | 0,6519 | 0,6769 | 103,83 | Berhasil |
| Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman | Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri | 12,8 | 28,46 | 222,34 | Berhasil |

*Sumber Data : Kemendes PDTT Tahun 2021*

Pada sasaran Membaiknya Kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman dengan indikator Persentase Desa berkembang Menjadi Mandiri sebesar 12,8, realisasi sebesar 28,5, capaian 222,66 % dengan kategori sangat berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Desa Mandiri dan Maju di bagi Jumlah Desa berkembang di kali 100%.Jumlah Desa Mandiri dan Maju Sebesar 74, Jumlah desa Berkembang sebesar 260.

**2.Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.71.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan | Indeks Desa Membangun | | 0,6297 | 0,6457 | 0,6769 | - | - | - | - | 103,83 | - | - |
| Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman | Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri | | 0,6297 | 9,82 | 28.46 | - | - | - | - | 222,34 | - | - |

*Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2022*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tujuan 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.**

**Indikator : Indeks Desa Membangun**

Realisasi tahun 2020 sebesar 0,6423 dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 0,6769 dengan capaian 103,83% sehingga dapat disimpukan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan karena realisasi tahun 2021 di atas dari tahun 2020.

**Sasaran 4.1. : Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman**

**Indikator : Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri**

Realisasi Tahun 2020 sebesar 9,82 dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 28,46 dengan capaian 222,34% sehingga dapat disimpukan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan karena realisasi tahun 2021 di atas dari tahun 2020.

Seminar Nasional
Mewujudkan Desa Unggul & Berkelanjutan Oktober 2021

### 3.Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target jangka menengah RPJMD

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 3.72. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerjaindikator Indeks Desa Membangun tahun 2021 sebesar 0,6769 atau 100% dari target akhir RPJMD sebesar 0.6716. Dan realisasi kinerja indikator Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri tahun 2021 sebesar 28,46% atau 156,28% dari target akhir RPJMD sebesar 18,21%. Dengan capaian yang sangat berhasil pada tahun 2021, diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada indikator ini berkelanjutan dan bersinergi.

**Tabel 3.72.**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RPJMD 2018 - 2023**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Renstra | Realisasi Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 |
| Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | Indeks Desa Membangun | 0,6716 | 0,6297 | 0,6457 | 0,6769 | - | - | - |
| Membaiknya Kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman | Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri | 18,21 | - | 9,82 | 28.46 | - | - | - |

*Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2022*

Kabupaten Bone , Desa Mallari Menjadi Percontohan Nasional Desa Inklusif pada Media TV, OKtober 2021

### 4.Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Gambar 3.21.**
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

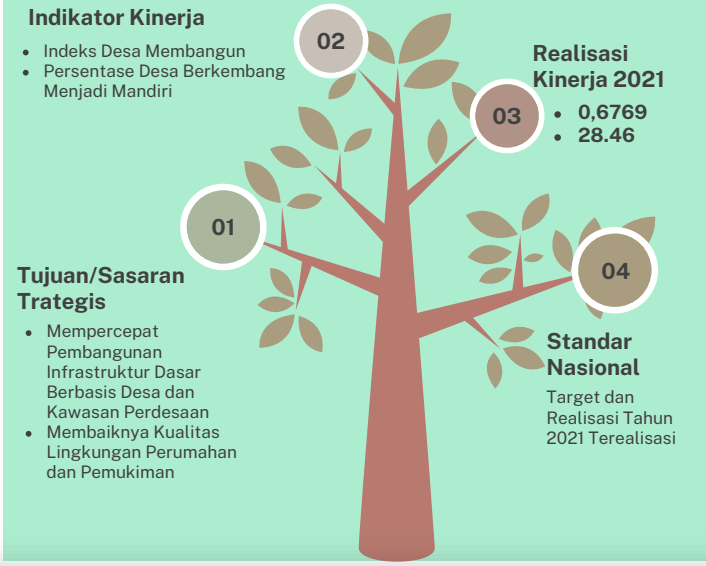


Berdasarkan Gambar 3.21. di samping, dijelaskan bahwa tujuan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan indikator Indeks Desa Membangun; dan sasaran Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dengan indikator Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri, tidak dapat dibandingkan dengan standar atau realisasi nasional, karena bukan merupakan SPM.

## 5.Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

*Tabel 3.73.*
*Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan*

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan | Indeks Desa Membangun | **103,83** | - | | ✓ | | |
| Membaiknya Kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman | Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri | **222,34** | - | ✓ | | | |

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2022

**"capaian indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone Indikator Indeks Desa Membangun dan Indikator Persentase Desa Berkembang menjadi Mandiri tahun 2021 dalam kategori Berhasil dan Sangat Berhasil"**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Tujuan 4. : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan**
Indikator : Indeks Desa Membangun
**Sasaran 4.1 : Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman**
Indikator : Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri

Dari tabel 3.73. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan dengan Indikator Indeks Desa Membangun menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 103,83% yang didukung oleh sasaran Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dengan indikator kinerja Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri yang menujukkan predikat Sangat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian 222,34%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**• Indeks Desa Membangun**

**Definisi** : Berhasil, Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Indeks Desa membangun memotret perkembangan kemandirian Desa yang bertujuan mengukur pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indesk Desa Membangun dalam kategori Berhasil, yaitu tercapai 103,83% dengan realisasi sebesar 0,6769 dari target 0,6519 hal ini karena Koordinasi dan Kerja sama Antara Tenaga Pendamping Profesional dan Pemerintah dari level desa, kabupaten, provinsi sampai pusat serta masyarakat, akademis, swasta yang bergerak sesuai kewenangan dan tupoksi masing-masing.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain Masih dalam era pandemi Covid 19 Pemerintah Pusat maupu Daerah masih berkontrasi dalam penangan pandemi covid 19, dengan melakukan refocusing anggaran dan pengaturan pola kerja WFH/WFO, dan Pembatasan Sosila berskala besar maupun lokal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk “meningkatkan Indeks Desa Membangun” antara lain Meningkatkan Nilai Variabel Indeks Ketahanan Sosial seperti pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, pendidikan serta aksesnya. Peningkatan Nilai Variabel Indeks Ketahanan Lingkungan dengan perlunya dilaksanakan mitigasi bencana secara lebih intensif.

**• Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri**

**Definisi :** Sangat Berhasil, Desa Berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan sedangkan Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri dalam kategori Sangat Berhasil, yaitu tercapai 222,34% dengan realisasi sebesar 28,46% dari target 12,8% hal ini karena Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait.

Pencapaian di atas telahSangat Berhasil, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih dalam era pandemi Covid 19 Pemerintah Pusat maupu Daerah masih berkontrasi dalam penangan pandemi covid 19, dengan melakukan refocusing anggaran dan pengaturan pola kerja WFH/WFO, dan Pembatasan Sosila berskala besar maupun lokal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan "Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri" antara lain:

1. Meningkatkan Nilai Variabel Indeks Ketahanan Sosial seperti pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, pendidikan serta aksesnya. Peningkatan Nilai Variabel Indeks Ketahanan Lingkungan dengan perlunya dilaksanakan mitigasi bencana secara lebih intensif.

## 6.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kabuapten Bonedalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel. 3.734***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis desa dan kawasan perdesaan** | **Indeks Desa Membangun** | **0,6716** | **0,6769** | **103,83** | **7.316.344.200** | **6.846.305.792** | **93.57** | **10.26** |
| **Membaiknya Kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman** | **Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri** | **18,21** | **28,46** | **222,34** | **7.316.344.200** | **6.846.305.792** | **93.57** | **128.77** |

**Sumber Data: Dinas PP-PA Kab. Bone 2022*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Tujuan/Sasaran Pemerintah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Indeks Desa Membangun dengan capaian kinerja 103,83% dan capaian anggaran 93,57%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 6,43% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 10,26%.
2. Indikator Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri dengan capaian kinerja 222,34% dan capaian anggaran 93,57%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 6,43% dan efesien penggnaan sumber daya sebesar 128,77%.

## 7.Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada Indikator Indeks Desa Membangun dan Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri sebagai berikut:

***Tabel 3.75.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan* | Indeks Desa Membangun | 103,83 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik | 100 | 100 | 100 | |
| *Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman* | Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri | 222,34 | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 328 | 328 | 100 | Pembinaan administrasi pemerintahan desa |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 984 | 984 | 100 | Pengadaan Server di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa | 1680 | 1680 | 100 | - |
| | | | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 | 1 | 100 | Penyelesaian masalah melalui tim khusus |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen penyusunan profil desa | 1 | 1 | 100 | • Perlunya pemahaman perangkat desa tentang tupoksi masing-masing perangkat desa<br>• Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu ditingkatkan |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa | 3 | 3 | 100 | • Dibutuhkan kesadaran bagi pemerintah desa akan pentingnya evaluasi perkembangan desa dan juga keikutsertaan dalam perlombaan desa sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah desa itu sendiri<br>• Perlunya pemahaman perangkat desa tentang tupoksi masing- masing perangkat desa<br>• Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu ditingkatkan<br>• Dibutuhkan kesadaran bagi pemerintah desa akan pentingnya evaluasi perkembangan desa dan juga keikutsertaan dalam perlombaan desa sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah desa itu sendiri. |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakan | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya. | 2 | 2 | 100 | 1. Masih perlu meningkatkan frekuensi pendampingan di desa dalam hal penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa<br>2. Meningkatkan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terlembagakan dengan baik |
| | | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa | 1 | 1 | 100 | 1. Perlu ditingkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan Pembinaan<br>2. Perlu adanya kajian atau analisis terhadap potensi pengembangan usaha BUMDES sebelum menentukan jenis usaha;<br>3. Perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi pengurus BUMDES melalui Pelatihan, Bimtek dan Orientasi Lapangan sesuai dengan jenis Usaha yang dikelola BUMDES. |
| | | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakan | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan | 100 | 100 | 100 | Pembinaan, Monev, Peningkatan Wawasan serta koordinasi sehingga bisa terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam kegiatan ekonomi produktif |

Sumber Data : Data di olah Oleh Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.75. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan 4 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan**

**Indikator : Indeks Desa Membangun**

Dengan target 0,6519 telah berhasil tercapai sebesar 0,6769 atau tercapai 103,83%

Sasaran 4.1 : Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Lingkungan

**Indikator : Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri**

**Dengan target 12,8% telah Berhasil tercapai sebesar 28,46% atau tercapai 222,34%.**

Kedua Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

**Upaya Perbaikan Berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan aset desa;
- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota;
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung Indesk Desa Membangun dan Persentase Desa Berkembang Menjadi Mandiri setelah perubahan sebesar Rp. 7.316.344.200 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.76.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| **Tujuan 4 :**<br>**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan**<br>**Indikator :**<br>**Indeks Desa Membangun** | | | |
| **Sasaran :**<br>**Membaiknya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman**<br>**Indikator :**<br>**Persentase Desa berkembang Menjadi Mandiri** | | | |
| **Program** | | | |
| • ·Program Administarsi Pemerintahan Desa | 6.763.728.250 | 6.298.685.237 | 93,12% |
| • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 552.615.950 | 547.620.555 | 99.10% |
| **Total** | **7.316.344.200** | **6.846305792** | **93.57%** |

**Misi 5 : Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik**

**Tujuan 5 : Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik, dengan indikator:**

Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB

**Sasaran 5.1 : Meningkatnya Daya Tarik Investasi, dengan indikator:**

Nilai PMA/PMDN (Milyar)

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

## 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasi pada Tahun 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.77.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian 2021 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | 32,82 | *0,76 % | 2,32% | Tidak berhasil |
| Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMA/PMDN (Milyar) | 175 | 278.269.682.501 | 159,01% | Sangat berhasil |
| Rata-rata Capaian | | | | 80,67 | Cukup Berhasil |

Data bersifat sementara, karena menggunakan data pembanding PDRB 2020 (data PDRB 2021 belum dirilis oleh BPS)

Sumber Data : Evaluasi RENJA Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja 80,67% dengan kategori pencapaian Cukup Berhasil yang didukung oleh 2 indikator yaitu Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB dengan capaian 0,32% dan Nilai PMA/PMDN (Milyar) dengan capaian 159,01%.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Adapun realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.78.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Capaian Kinerja 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | | 32,94 | 0,48 | 0,76 | - | - | - | - | 2,32 | - | - |
| Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMA/ PMDN (Milyar) | | 158.260.000.000 | 176.807.169.329 | 278.269.682.501 | - | - | 106% | 101% | 159,01% | - | - |

Sumber data : BPS dan DPMPTSP Tahun 2019-2021

***Data bersifat sementara, karena menggunakan data pembanding PDRB 2020 (data PDRB 2021 belum dirilis oleh BPS)**

Untuk Melihat Data Investrasi Tahun 20219

Untuk Melihat Data Investrasi Tahun 2020

Untuk Melihat Data Investrasi Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja Tahun 2019 - 2021 adalah sebagai berikut:

**Tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik, dengan indikator:**

**Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB**

Capaian kinerja Presentase penanaman Modal terhadap PDRB Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023, tetapi angka realisasi kinerja dapat dibandigkan yaitu perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan tahun 2021 mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2019 mengalami penurunan.

**Sasaran 5.1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi, dengan indikator:**

**Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Capaian Kinerja Indikator Nilai PMA/PMDN tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan.

**3. Realisasi kinerja yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

**Gambar 3.21.**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023**

| TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI KINERJA 2019 | REALISASI KINERJA 2020 | REALISASI KINERJA 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | 33,24 | 32,94 | 47.98 | *52.60 |
| Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMA/ PMDN (Milyar) | 225 | 158.260 | 176.807.169.329 | 278.269.682.501 |

***Data bersifat sementara, karena menggunakan data pembanding PDRB 2020 (data PDRB 2021 belum dirilis oleh BPS)**

Sumber data : BPS dan DPMPTSP Tahun 2019-2021

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

**Tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik, dengan indikator:**

**Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB**

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB tahun 2021 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tidak tercapai yaitu masih berada diangka 0,76% pada tahun 2021 dengan target jangka menengah sebesar 33,24%.

**Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi, dengan indikator:**

**Nilai PMA/PMDN (Milyar)**

Realisasi kinerja indikator Nilai PMA/PMDN tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah pada RPJMD telah melampaui target atau kategori sangat berhasil (124%).

**4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Berdasarkan gambar 3.22. di samping, dijelaskan bahwa realisasi kinerja tujuan "Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik' dan sasaran "Meningkatnya Daya Tarik Investasi" tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena tidak tidak termasuk dalam SPM ataupun standar nasional lainnya.

Gambar 3.22.
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya

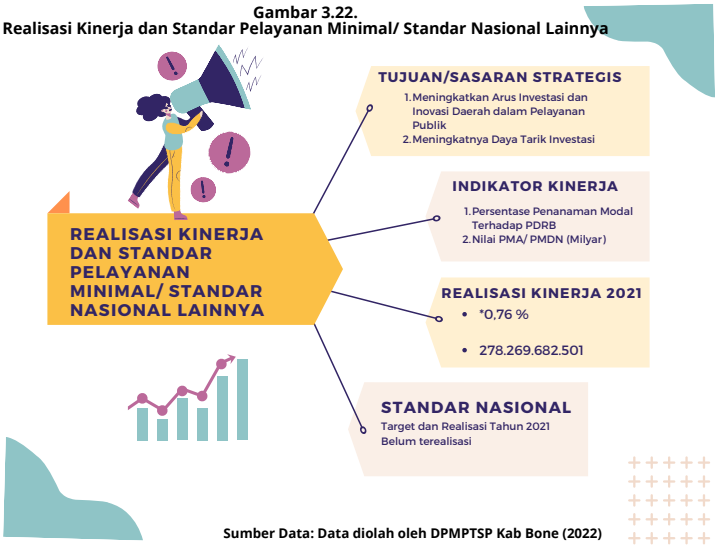


Sumber Data: Data diolah oleh DPMPTSP Kab Bone (2022)

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel Ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.79.***
***Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Indikator Kinerja***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | | | 2,32 | | | | ✓ |
| | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | 2,32 | | | | | ✓ |
| Meningkatnya Daya Tarik Investasi | | | 159,01% | ✓ | | | |
| | Nilai PMA/PMDN (Milyar) | 159,01% | | ✓ | | | |
| **Rata-rata** | | 80,67 | | | | ✓ | |

*Sumber Data: RKPD Tahun 2021 dan Evaluasi RKPD 2021*

***Data bersifat sementara, karena menggunakan data pembanding PDRB 2020 (data PDRB 2021 belum dirilis oleh BPS)**

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian dari tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB dan sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator Nilai PMA/PMDN diperoleh rata rata sebesar 80,67% dengan kategori **Cukup Berhasil.**

## Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja tujuan/sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Untuk Melihat Data Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

**Tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB.**

Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB adalah persentase yang diperoleh dari perbandingan jumlah Penanaman Modal tahun n (nilai PMDN/PMA) dengan PDRB tahun n dikali 100%.

Pencapaian keberasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB dan indikator Nilai PMA/PMDN didukung oleh:

- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara online yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha.
- Adanya dukungan Pemerintah pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui alokasi DAK non fisik untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Pengaplikasian Sistem Perizinan Berusaha secara online (OSS) dan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, yang memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi dengan kriteria yang tercantum dalam BAB III pasal 3 dengan jenis pemberian insentif dan kemudahan dapat dilihat pada bab VII pasal 23.
- Tertibnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang didukung dengan pengalokasian anggaran DAK.

Pekan Raya Sulawesi Selatan Tahun 2021

Kegiatan penyusunan strategis promosi penanaman modal melalui sosialisasi kemitraan pelaku usaha mikro kecil dan mengah dengan pelaku usaha besar

Hambatan pencapaian kinerja Tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penanaman Modal terhadap PDRB dan sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator nilai PMA/PMDN adalah:

- Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pemberian insentif/kemudahan penanaman modal belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
- Aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone belum tersedia.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif/Kemudahan Penanaman Modal.
- Menyiapkan aplikasi peta potensi penanaman modal Kabupaten Bone.

### 6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategs yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah Sumber Daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pemerintah kabupaten bone pada tabel tersebut :

1.Indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB dengan capaian kinerja 2,32% dan capaian anggaran 95% menunjukkan tidak ada efisiensi sumber daya.

2. Indikator nilai PMA/PMDN dengan capaian kinerja 159,01% dan capaian anggaran 95% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 5% realisasi anggaran dan efisiensi sumber daya sebesar 64%.

***Tabel 3.80.***
***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Sasasran | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | 32,82 | *0,76 | 2,32 | 695.755.200 | 662.671.700 | 95% | - |
| | Meningkatnya Daya Tarik Investasi | Nilai PMA/PMDN (Milyar) | 175 | 278.269.682.501 | 159,01 | 695.755.200 | 662.671.700 | 95% | 64 |

*Sumber data : BPS dan DPMPTSP Tahun 2019-2021*

***Data bersifat sementara, karena menggunakan data pembanding PDRB 2020 (data PDRB 2021 belum dirilis oleh BPS)**

**Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pemerintah kabupaten bone pada tabel tersebut :**

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) pemerintah kabupaten bone pada tabel tersebut :

- Indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB dengan capaian kinerja 2,32% dan capaian anggaran 95% menunjukkan tidak ada efisiensi sumber daya.
- Indikator nilai PMA/PMDN dengan capaian kinerja 159,01% dan capaian anggaran 95% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 5% realisasi anggaran dan efisiensi sumber daya sebesar 64%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisa terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB, sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator Nilai PMA/PMDN adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.81.**
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**
**yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| Tujuan | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik | | | Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB | 32,82 | *0,76 | | peningkatan inovasi pelayanan penanaman modal |
| | Meningkatnya Daya Tarik Investasi | | Nilai PMA/PMDN (Milyar) | 175 | 278.269. 682.501 | 159,01% | peningkatan promosi penanaman modal melalui media onine |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP | 80 | 85 | % | Peningkatan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan |
| | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan | 7500 | 4944 | 66% | Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan |
| | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin) | 1700 | 1259 | 74% | Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan |
| | | | Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok) | 1 | 1 | 100% | |
| | | | Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin) | 7500 | 4944 | 66% | |
| | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraa n perizinan (dok) | 1 | 1 | 100% | Peningkatan pengawasan perizinan |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok) | 1 | 1 | 100% | |

| Tujuan | Sasaran Strategis | Program/Kegiatan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok) | 1 | 1 | 100% | |
| | | Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah Laporan Layanan Konsultasi | 4 | 4 | 100 | Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat |
| | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan yang telah ditindaklanjuti | 4 | 4 | 100 | Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat |
| | | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Presentase ketersediaan Data dan Informasi Perizinsn dan Non Perizinan (persen) | 80 | 70 | 88% | Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha | 1 | 1 | 100% | Peningkatan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota |
| | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/ dikembangkan / dibangun | 1 | 1 | 100% | Peningkatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data perizinan dan non perizinan. |

Sumber Data : Evaluasi Renja Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

**Tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik, dengan indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB.**

**Dengan target 32,82% telah berhasil tercapai sebesar 0,76%, indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/sub kegiatan:**

- KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
- SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- SUB KEGIATAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL.
- SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTERGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

**Sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi, dengan indikator:**
**Nilai PMA/PMDN**

**Dengan target 175 Milyar telah berhasil tercapai sebesar 159,01%, indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/sub kegiatan:**

- KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
- SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

- SUB KEGIATAN PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL.
- -SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

- KEGIATAN PENGELOLAANDATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG TERINTERGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

## UPAYA PERBAIKAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Memaksimalkan kegiatan promosi penanaman modal melalui media online dan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan pameran baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta, provinsi dan pusat.
- Membuat aplikasi peta potensi investasi Kabupaten Bone.
- Meningkatkan inovasi pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk menciptakan pelayanan prima dan peningkatan indeks kepuasan masayarakat.

# REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendukung tujuan Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penanaman Modal Terhadap PDRB, sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator Nilai PMA/PMDN setelah perubahan sebesar Rp. 695.755.200 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.82.**
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

| Uraian | Jumlah | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| **Tujuan 1 : Meningkatkan Arus Investasi dan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Publik** | 662.671.700 | 662.671.700 | 95% |
| **Sasaran 1.1 Meningkatnya Daya Tarik Investasi** | 695.755.200 | 662.671.700 | 95% |
| **Program : Program Pelayanan Penanaman Modal** | 693.660.200 | 662.671.700 | 95% |
| **Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | 35.240.000 | 35.240.000 | 100% |
| **Sub Kegiatan :** | | | |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 424.720.000 | 182.282.700 | 96% |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal | 183.471.200 | 182.282.700 | 99% |
| Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan | 85.469.000 | 71.874.000 | 84% |
| **Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **2.095.000** | **2.095.000** | **100%** |
| **Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **2.095.000** | **2.095.000** | **100%** |
| **Sub Kegiatan :** | | | |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2.095.000 | 2.095.000 | 100% |
| ***Total*** | **693.660.200** | **662.671.700** | **95%** |

**Sasaran 5.2.:**
**Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik, dengan indikator :**

**Indeks Inovasi Daerah**

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Gambar 3.23.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sumber Data : Renstra Perubahan Balitbangda Kabupaten Bone 2018-2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, target Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 telah Berhasil yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 57.15 (Total Nilai Kematangan Inovasi sebesar 1154).

**Untuk Melihat Data Nilai Indeks Inovasi Kabupaten Bone oleh Kemendagri**

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian tujuan "Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik" dengan indikator "Indeks Inovasi Daerah" apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.83.**
**Realisasi Kinerja Tahun 2018-2021**

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik | Indeks Inovasi Daerah | - | - | 955 | 1154 | - | - | - | 100 % | 109.9 % | - | - |

*Sumber Data : Data diolah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone 2022*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran **"Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik"** dengan indikator **"Indeks Inovasi Daerah"** mengalami trend peningkatan realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021.

Penyerahan Hadiah kepada Pemenang Lomba Inovasi Pelayanan Publik, Agusutus 2021

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Gambar 3.23.**
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021**
**dengan target Jangka Menengah RPJMD 2018 - 2023**

Sumber Data : RPJMD-P 2018-2023 Kabupaten Bone dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.23. di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan Sasaran "Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik" dengan indikator "Indeks Inovasi Daerah" belum memenuhi target RPJMD 2018-2023, namun mengalami trend peningkatan selama dua tahun terakhir.

**4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.25.
Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/
Standar Nasional Lainnya

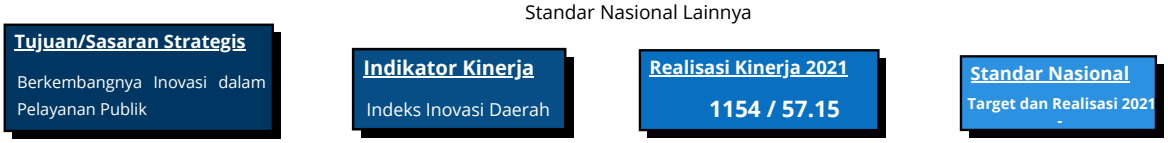


Sumber Data: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.25. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan Sasaran "Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik" dengan indikator "Indeks Inovasi Daerah" tidak dapat disandingkan dengan standard pelayanan minimal atau standard nasional lainnya, karena tidak termasuk dalam SPM ataupun standard nasional lainnya.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.84.***
***Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik | Indeks Inovasi Daerah | **109.9%** | **109.9%** | | ✓ | | |

*Sumber Data: Data diolah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone*

Berdasarkan data pada tabel 3.84. di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran BerkembangnyaInovasi dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Bone terhadap capaian indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran: Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik**

Dari tabel 3.110. di atas, terlihat bahwa pencapaian Sasaran "Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik" dengan indikator "Indeks Inovasi Daerah" menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata 109.9%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Indeks Inovasi Daerah**

**Definisi :** Berhasil, sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, dengan maksud mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Indeks Inovasi Daerah dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 109.9% dengan realisasi sebesar 1154 dari target 1050 hal ini karena:

**1. Pembentukan Organisasi Kelitbangan.**

Pemerintah Kabupaten Bone telah membentuk Organisasi Kelitbangan yang merupakan "collaborative think tank" antara pemerintah daerah Kabupaten Bone, dalam hal ini Balitbangda Kab. Bone bersama tenaga kelitbangan dari perguruan tinggi melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone

**2. Kegiatan Fasilitasi Inovasi Daerah.**

Kegiatan ini merupakan aktualisasi komitmen pemkab. Bone melalui Balitbangda untuk menumbuh kembangkan budaya inovasi dan menjaring Inovasi yang ada, serta memberikan penghargaan terhadap inovator di Kabupaten Bone. Kegiatan ini dilakukan Bersama-sama dengan perguruan tinggi dan telah menjadi agenda rutin Balitbangda setiap tahunnya.

Pencapaian di atas telah Mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman tentang inovasi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur sipil Negara di Kabupaten Bone baik bentuk-bentuk inovasi, syarat-syarat inovasi dan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh system penilaian Indeks Inovasi Daerah
2. Inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah, belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga Kurangnya Data Dukung terhadap inovasi daerah Kab. Bone
3. Belum adanya Kebijakan tentang kewajiban berinovasi Pada organisasi perangkat daerah dan kalangan Aparatur Sipil Negara.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Penilitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

*Tabel 3.85.*
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik | Indeks Inovasi Daerah | 1050 | 1154 | 109.9% | 274.450.600 | 271.825.600 | 99.04 | 10.86 |

*Sumber Data: BPS Bone Tahun 2021 dan Data Olah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

- Indikator Indeks Inovasi daerah dengan capaian kinerja 109.9% dan capaian anggaran 99.04%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran 0,96% dan efesien penggunaan sumber daya sebesar 10.86%.

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.86.**
**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik* | Indeks Inovasi Daerah | 109.9% | Program Penelitian dan Pengembangan daerah | Persentase capaian hasil penelitian, kajian dan pengembangan Inovasi Daerah | 100 | 100 | 100 | Peningkatan kegiatan dalam pengembangan inovasi dan teknologi |
| | | | Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi | Persentase realisasi pengembangan inovasi dan teknologi | 100 | 100 | 100 | |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif | Jumlah karya inovasi teknologi dan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan | 10 | 10 | 100 | Peningkatan jumlah karya inovasi teknologi dan inovasi daerah dari sector layanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya |
| | | | Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Jumlah inovasi daerah yang dihasilkan setiap tahun | 2 | 2 | 100 | Peningkatankualitas dan kuantitas inovasi daerah yang dihasilkan dan dilaporkan setiap tahun |

Sumber Data: Data diolah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone 2022

Berdasarkan tabel 3.83. di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran : "Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik"**
**Indikator : Indeks Inovasi Daerah**

dengan target Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 sebesar 1050 telah **Berhasil** tercapai sebesar 1154 atau tercapai 109,9%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi
- Sub kegiatan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
- Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

## UPAYA PERBAIKAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung sasaran **"Berkembangnya Inovasi dalam Pelayanan Publik"** dengan indikator **"Indeks Inovasi Daerah"** setelah perubahan sebesar Rp. 274.450.600 (Dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.87.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | Jumlah(Rp) | | % |
|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | |
| **Tujuan :** Meningkatkan arus investasi dan inovasi daerah dalam pelayanan publik | 274.450.600 | 271.825.600 | 99.04% |
| **Program:** Penelitian dan Pengembangan Daerah | 274.450.600 | 271.825.600 | 99.04% |
| **Kegiatan:** Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 274.450.600 | 271.825.600 | 99.04% |
| **Total** | **274.450.600** | **271.825.600** | **99.04%** |

***Misi 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat***

**Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum, dengan indikator :**
**Angka Kriminalitas**

Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Gambar 3.26.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

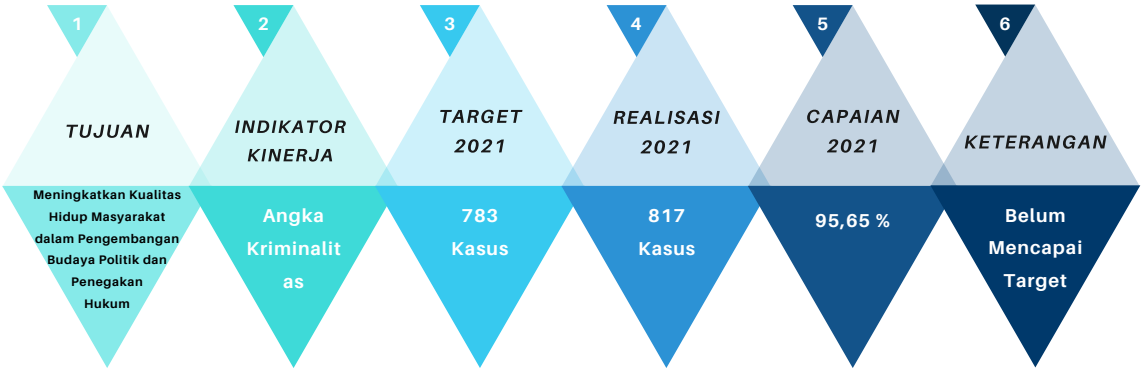


Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone tahun 2021

Berdasarkan data di atas, target Angka Kriminalitas tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, dengan realisasi 817 kasus kriminalitas atau dengan capaian 95,65 %.

Untuk Melihat Data Kriminalitas tahun 2021i

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.88.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | Angka Kriminalitas | 1.073 Kasus | 1.224 | 799 | 817 | - | - | 85,92% | 108,16% | 95,65% | - | - |

*Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone*

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dengan indikator "Angka Kriminalitas" mengalami peningkatan capaian kinerja pada tahun 2019 ke 2020, dan sedikit mengalami penurunan capaian kinerja di tahun 2021.

## 3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.89.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 - 2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | Angka kriminalitas | 634 | 1.224 | 799 | 817 | - | - |

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Penangan Demo tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima, Oktober 2021

Berdasarkan tabel 3.89. di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dengan indikator "Angka Kriminalitas" belum memenuhi target RPJMD, namun mengalami peningkatan realisasi kinerja pada tahun 2019 ke 2020, dan sedikit mengalami penurunan capaian kinerja di tahun 2021.

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 3.27.**
**Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Sumber Data: Polres Bone dan diolah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone

Berdasarkan gambar 3.27. di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dengan indikator "Angka Kriminalitas", tidak dapat disandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal atau Standar Nasional lainnya karena tidak termasuk dalam SPM atau standar nasional lainnya.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.90.***
***Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Rata-rata Capaian | Standar Nasional >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | Angka Kriminalitas | 95,65% | 95,65% | | ✓ | | |

*Sumber Data: Polres Bone dan diolah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone*

Berdasarkan data pada tabel 3.90. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

**Tujuan: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan**

Berdasarkan data pada tabel 3.90. di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dalam kategori Berhasil.

Dari gambar 3.27. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" dengan 1 indikator "Angka Kriminalitas" menunjukkan predikat Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata 95,65%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Angka Kriminalitas**

**Definisi :** Data/Angka yang menggambarkan kasus kriminalitas di Kabupaten Bone selama tahun 2021 yang di ambil dari Polres Bone dan diolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Angka Kriminalitas” dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 95,65% dengan realisasi sebesar 817 kasus dari target 783 kasus hal ini karena:

1. Adanya Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang dilakukan sehingga kasus kriminalitas dapat berkurang.
2. Adanya sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam hal ini adalah pihak Kepolisian dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah berjalan secara optimal.
3. Adanya sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia.

## Hambatan

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Belum adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait bahayanya tindakan kriminalitas.
2. Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan belum berhasil mencapai target.

## "Upaya

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerja dalam hal menekan angka kriminalitas antara lain:

1. Menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara bertahap tentang bahaya tindak kriminalitas di kalangan masyarakat.
2. Mengupayakan sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga dapat berjalan secara optimal.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikuttabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.91.***
***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian% | |
| Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | Angka Kriminalitas | 783 Kasus | 817 Kasus | 95,65% | 3.006.970.000 | 2.153.044.000 | 71,60% | 24,05% |

*Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu: Indikator Angka Kriminalitas dengan capaian kinerja 95,65%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 28,40% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 24,05%.

## 7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

***Tabel 3.92.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan***
***yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mening katkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | Angka kriminalitas | 95,65% | Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum masyarakat | 100% | 100% | 100% | Menyusun pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi terkait peningkatan ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan | 100% | 100% | 100% | Mengoptimalkan penanganan gangguan Trantibum melalui pengawasan secara rutin dan berkala |

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan | Jumlah personel yang dilibatkan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 330 Orang | 220 Orang | 66,67% | Meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambung an bukan hanya dilaku kan di Kota tetapi juga sampai ke pelosok desa |
| | | | Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia | Jumlah kegiatan peningkatan SDM | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 100% | Melaksanakan kegiatan peningkatan SDM yang bermutu dan berkualitas agar tercipta SDM yang unggul |
| | | | Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Jumlah petugas/ personel yang terlibat dalam penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 489 orang | 489 orang | 100% | Menambah jumlah personel dalam penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah orang yang ditangani dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 12 Orang | 12 Orang | 100% | Memaksimalkan kerjasama antar lembaga terkait agar dapat meminimalisir jumlah orang yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum |
| | | | Sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada | Jumlah masyarakat yang terlayani akibat dampak penegakan Perda dan Perkada | 2 Orang | 0 Orang (tidak ada yang terkena dampak dari penegaka n Perda) | 100% | Melakukan upaya-upaya pendekatan secara persuasif agar dapat meminimalisir warga yang dapat terkena dampak dari penegakan Perda dan Perkada |

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Bone dan Instansi/Lembaga yang terkait

Berdasarkan tabel 3.92. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum

Indikator 6.1: Angka Kriminalitas

dengan target 783 kasus telah Berhasil tercapai sebesar 817 kasus atau tercapai 95,83%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan :

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
- Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia

- Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada

### Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum**

- Dengan belum tercapainya target dari sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan lebih meningkatkan lagi kegiatan ini secara rutin dan berkesinambungan bukan hanya dilakukan di Kota tetapi juga sampai ke pelosok desa sehingga dapat berjalan secara optimal sehingga mencapai target.
- Mensosialisasikan Sistem Aplikasi Pengaduan dan Pelaporan Anggota (SAPPA Bone) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja hingga ke pelosok Desa agar masyarakat dapat dengan cepat dan mudah melaporkan kejadian-kejadian yang disinyalir akan menimbulkan kasus kriminalitas.

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung tujuan "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum" setelah perubahan sebesar Rp 3.006.970.000,- (Tiga miliar enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.93.**
**Realisasi Anggaran**

| Uraian | | Jumlah(Rp) Anggaran | Jumlah(Rp) Realisasi |
|---|---|---|---|
| **Tujuan 1:** | Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Politik dan Penegakan Hukum | | |
| **Program:** | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 3.006.970.000,- | 2.153.044.000,- |
| | **Total** | **3.006.970.000,-** | **2.153.044.000,-** |

**Persentase Realisasi Anggaran 71,60%**

**Sasaran 6.1.: Membaiknya Penegakan Hukum, dengan indikator : Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**

Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.28.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

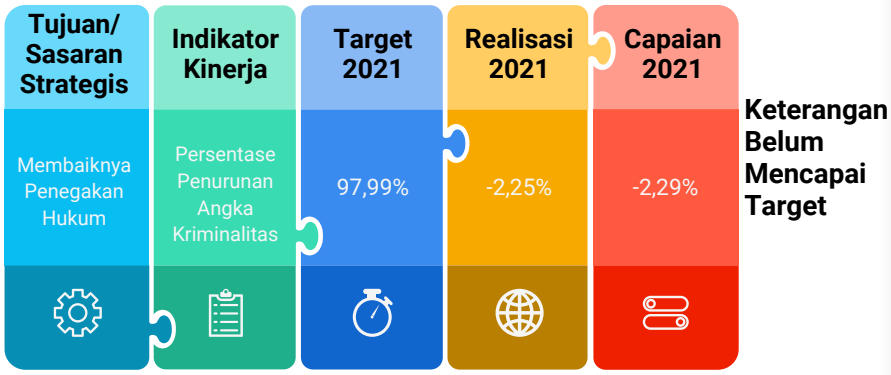


Sumber Data: Diolah Badan Kesbangpol Kab.Bone 2022

Rapat forkompinda dan SKPD terkait Strategi Pencegahan dan Penagangan Kamtibmas di Kabupaten Bone, Oktober 2021 Watampone

Berdasarkan data di atas, target Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Kabupaten Bone Tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun anggaran 2021, dengan realisasi 817 kasus kriminalitas pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 799 kasus kriminalitas sehingga diperoleh capaian persentase penurunan angka kriminalitas sebesar -2,29%.

**2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian sasaran "Membaiknya Penegakan Hukum", dengan indikator "Persentase Penurunan Angka Kriminalitas" apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.94.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | -14,7% | 53,19% | -2,25% | - | - | - | - | -2,29% | - | - |

Sumber Data: Diolah Badan Kesbangpol Kab.Bone 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran "Membaiknya Penegakan Hukum" dengan indikator "Persentase Penurunan Angka Kriminalitas" pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya karena ini merupakan indikator baru. Namun, realisasi kinerjanya bersifat fluktuatif jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, yaitu jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan.

### 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalahdengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.95.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | 90,06% | -14,7% | 53,19% | -2,25% | - | - |

Sumber Data: Diolah Badan Kesbangpol Kab. Bone 2022

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan sasaran “Membaiknya Penegakan Hukum” dengan indikator “Persentase Penurunan Angka Kriminalitas” belum mencapai target jangka menengah.

### 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.96.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan***
***Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Standar Nasional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Target 2021 | Realisasi 2021 |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalita | -2,25% | - | - |

Sumber Data: Diolah Bappeda Kab.Bone 2022

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran “Membaiknya Penegakan Hukum dengan indikator “Persentase Penurunan Angka Kriminalitas” tidak dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya, karena tidak termasuk dalam SPM ataupun standar nasional lainnya.

### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel 3.97.***
***Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Realisasi Kinerja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 | 90=<s/d<110 | 60=<s/d<90 | <60 |
| | | | | Sangat Berhasi | Berhasi | Cukup Berhasi | Tidak Berhasi |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | -2,29% | -2,29% | | | | ✓ ✓ |

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bone Persentase Penurunan Angka Kriminalitas dalam kategori Tidak Berhasil

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Membaiknya Penegakan Hukum**

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran "Membaiknya Penegakan Hukum" dengan indikator "Persentase Penurunan Angka Kriminalitas" menunjukkan predikat Tidak Berhasil yang mempunyai nilai capain rata-rata -2,29%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

| | |
|---|---|
| **D E F E N I S I** | mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan kantrantibmas yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang aman, tertib dan tentram melalu angka kriminalitas. |

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian persentase penurunan angka kriminalitas dalam kategori Tidak Berhasil, yaitu -2,29% dengan realisasi sebesar -2,2% dari target 97,99% hal ini karena:

- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait bahayanya kriminalitas.
- Belum Optimalnya Fungsi FKDM, FKUB dan FPK di Daerah sehingga dalam mencegah kasus kriminalitas itu masih kurang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk meningkatkan "Persentase Penurunan Angka Kriminalitas" antara lain:

- Menjadwalkan dan meningkatkan kegiatan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait bahayanya tindak kriminalitas.
- Aparat penegak hukum dan toko agama, masyarakat harus menjalin koordinasi untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam APBD Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Kab. Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.98.***
***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

| SasaranStrategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capain(%) | Pagu | Realisasi | Capain(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i(e-h) |
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | 97,99% | -2,25% | -2,29% | 260.170.000 | 251.603.200 | 96,71% | -99% |

***Sumber Data : Diolah Badan Kesbangpol Kab.Bone 2022***

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Sasaran "Membaiknya Penegakan Hukum" dengan indikator "Persentase Penurunan Angka Kriminalitas" Pemerintah Kabupaten Bone tidak memiliki efisiensi sumber daya.

**7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mencapai Tujuan "Membaiknya Penegakan Hukum" sebagai berikut:

***Tabel 3.99.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membaiknya Penegakan Hukum | Persentase Penurunan Angka Kriminalitas | -2,29% | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Cakupan Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 100% | 100% | 100% | memperbanyak sosialisasi tentang bahaya kriminal kepada masyarakat |

Sumber Data: Diolah Badan Kesbangpol Kab.Bone 2022

Berdasarkan tabel tentang analisa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran : "Membaiknya Penegakan Hukum"**

**Indikator : Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**

dengan target 97,99% kasus telah Tidak Berhasil dengan realisasi sebesar -2,25% kasus dengan capaian -2,29%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program:

- Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

## Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- Menjadwalkan dan meningkatkan kegiatan Sosialisasi Kepada masyarakat dan pengawasan dengan terhadap tindak kriminalitas berkeja sama dengan pihak terkait.
- Meningkatkan sinergitas Aparat penegak hukum dan toko agama, masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya.

## REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 untuk mendukung sasaran "Membaiknya Penegakan Hukum" setelah perubahan sebesar Rp. 260.170.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.100.**
**Realisasi Anggaran**

| URAIAN | JUMLAH (RP) ANGGARAN | JUMLAH (RP) REALISASI | % |
|---|---|---|---|
| **SASARAN** : MEMBAIKNYA PENEGAKAN HUKUM | | | |
| **PROGRAM** | | | |
| • Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 260.170.000,00 | 251.603.200,00 | 96,71% |
| **TOTAL** | **260.170.000,00** | **251.603.200,00** | **96,71%** |

Destinasi Wisata Tanjung Pallette Kab.Bone

**Tujuan 7:**
**"Mengembangkan Seni dan Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat"** dengan indikator :

**Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD**

Capaian Kinerja Kabupaten Bone menunjukan setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Bone yang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Kabupaten.

Pengukuran kinerja Kabupaten Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Bone Kabupaten Bone meliputi:

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Gambar 3.29.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

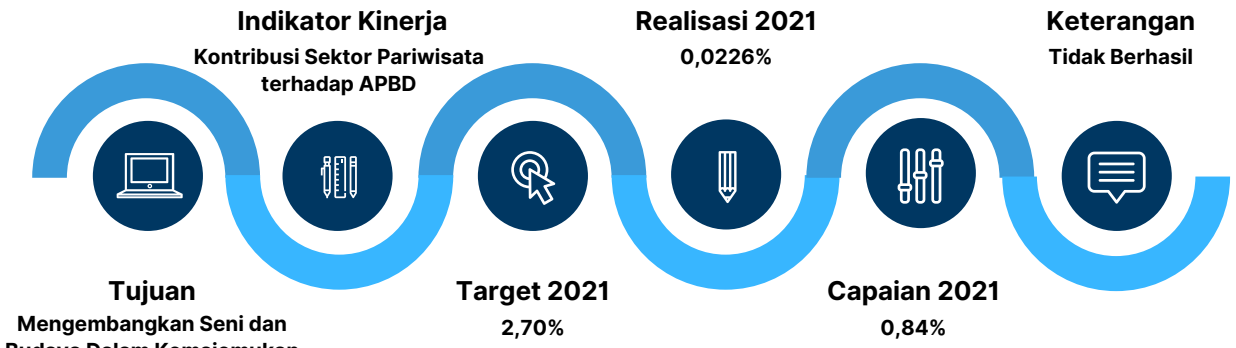


*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Kabupaten Bone dan Data Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021*

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja tujuan "Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat", dengan indikator "Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD" Kabupaten Bone Tahun 2021 sebesar 0,84% atau kategori Tidak Berhasil.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja tujuan dan sasaran dari Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.101.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2019 | Realisasi Kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | 0,0343% | 0,0343% | 0,0188% | 0,0226% | - | - | 104,72% | 68,14% | 0,84% | - | - |

*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Kabupaten Bone dan Data Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2019 - 2021*

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian "Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD" mengalami trend penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terkahir (2019-2021).

## 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

***Tabel 3.102.***
***Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021***
***dengan Target RPJMD 2019 - 2023***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Jangka Menengah | Realisasi Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | 2,90% | 0,0343% | 0,0188% | 0,0226% | - | - |

*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Kabupaten Bone dan Data Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2019 - 2021*

Berdasarkan data tabel 3.102. di atas, dapat dijelaskan bahwa: Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dengan tujuan Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat, serta indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD, Kontribusi Sektor Pariwisata dapat dilihat belum mencapai target, dari target perencaanaan di RPJMD tahun 2021.

## 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

***Tabel 3.103.***
***Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja 2021 | Realisasi Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2021 |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | 0,0226% | - | - |

Berdasarkan data tabel 3.103. di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tujunan Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat dengan Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD tidak dapat diketahui dan disandingkan karena Bukan termasuk pemangku standar pelayanan minimal (SPM) maupaun standar nasional di Kabupaten Bone.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan, kita lihat tabel ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut:

***Tabel. 3.104.***
***Ikhtisar Capaian Kinerja Kabupaten Bone Tahun 2021***

| Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian | Rata-rata Capaian | Predikat | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | >110 Sangat Berhasil | 90=<s/d<110 Berhasil | 60=<s/d<90 Cukup Berhasil | <60 Tidak Berhasil |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | | | 0,84% | | | | ✓ |
| | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | 0,84% | | | | | ✓ |

*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Kabupaten Bone dan Data Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel 3.104. di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian Tujuan Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Bone tahun 2021 dalam kategori Tidak Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**Tujuan : Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat**

Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD

**Definisi :** Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Tahun n dibagi dengan Total APBD Tahun n dikali 100%

Dari tabel 3.97. ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD dalam kategori tidak berhasil. Pemerintah Kabupaten Bone dalam pencapaian indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD, dalam katagori tidak berhasil. Yaitu tercapai 0,84% dengan realisasi kinerja 0,0226% dari target 2,70%.

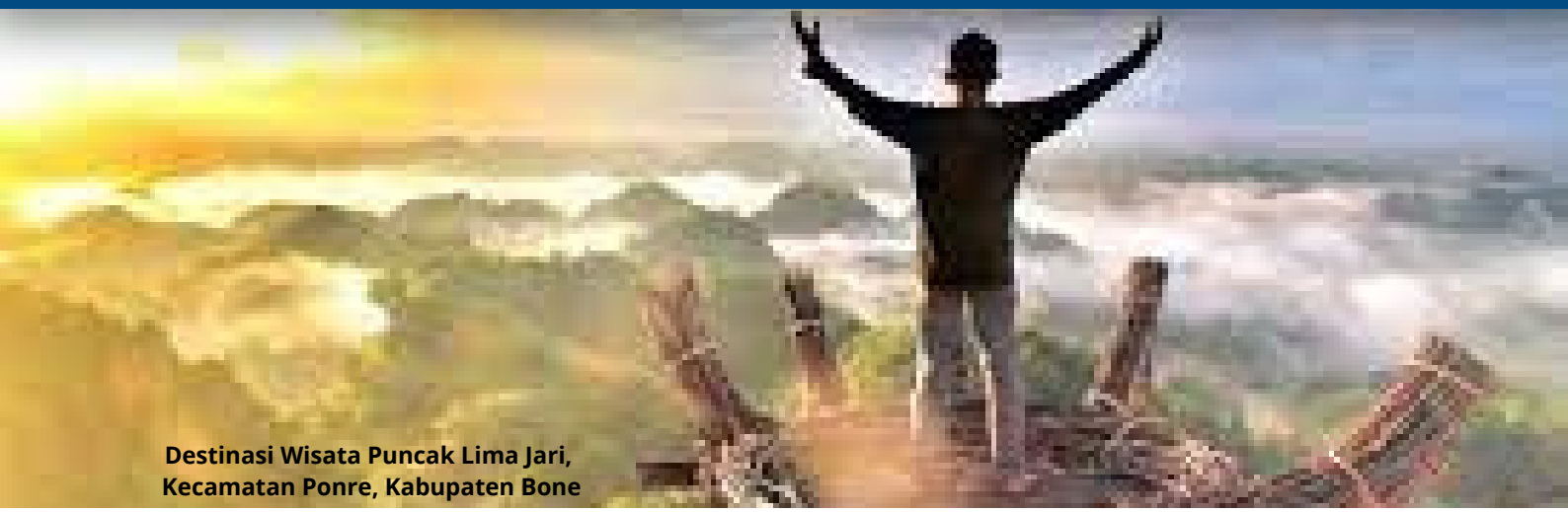

Destinasi Wisata Puncak Lima Jari, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone

**Beberapa hal yang menjadi penyebab upaya capaian indikator kinerja sebagai berikut:**

- Adanya Upaya Penyebaran Promosi Terhadap Objek-Objek Wisata yang ada diKabupaten Bone.
- Beragamnya Potensi Wisata yang cukup strategis yang dapat didatangi oleh Wisatawan, Baik dalam daerah maupun diluar daerah Kabupaten Bone.
- Dibukanya lahan untuk membangun objek wisata Baru.
- Objek Wisata yang sudah tidak Produktif, Diremajakan Kembali untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dalam daerah maupun luar daerah.

Pencapaian di atas mendpatkan hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Kurang Mendukung;
2. Komunikasi dan Publikasi Yang Masih Kurang;
3. Belum Memadainya Infrastruktur Pariwisata di Beberapa Daerah;
4. Masih Kurang Diperhatikannya Aspek Lingkungan Hidup.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kab. Bone untuk meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD antara lain:

1. Perlunya peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata, berupa peningkatan tenaga kepariwisataan yang bersertifikasi dengan mewajibkan pengelola objek wisata untuk memiliki pemandu wisata dan tenaga lain yang bersertifikasi. Pemerintah perlu mendorong berdirinya lebih banyak Lembaga Sertfikasi Profesi (LSP) khusus untuk sektor pariwisata dengan kemudahan pemberian jin serta biaya pendirian yang murah. Di samping itu, peningkatan ketrampilan berbahasa asing khususnya bahasa inggeris bagi SDM yang bekerja di sektor pariwisata di daerah-daerah tujuan pariwisata yang terpencil juga perlu dilakukan;
2. Perlunya diperbanyak dan dipertajam promosi terhadap objek-objek wisata. Penajaman promosi objek wisata tersebut misalnya bisa dilakukan dengan menyusun booklet dan atau aplikasi digital tentang jumlah pengeluaran (uang) yang dibutuhkan untuk mengunjungi berbagai objek wisata. Booklet atau aplikasi digital (internet/media sosial);
3. Perlunya peningkatan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Contohnya adalah perlunya diperbaiki jalan-jalan menuju objek wisata, meningkatkan konektivitas antar objek wisata, dan terus mengusahakan kemudahan transportasi ke objek-objek wisata; dan
4. Perlunya aspek lingkungan hidup yang diperhatikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bone. Caranya dengan menegakkan aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup di objek-objek wisata misalnya dengan denda bagi yang melanggar bahkan sangsi pidana kurungan.

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat / sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

***Tabel 3.105.***
***Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Kabupaten Bone Tahun 2021***

| Tujuan/ SasaranStrategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capain(%) | Pagu | Realisasi | Capain(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i(e-h) |
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | 2,70% | 0,0226% | 0,84% | 2.368.347.840.769 | 2.429.257.848.313,55 | 102,57% | - |

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran 2021 Kabupaten Bone dan Data Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

- Indikator **Kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD** dengan target capaian kinerja sebesar 0,84% dan capaian anggaran sebesar 102,57% menunjukkan tidak ada efesiensi.

### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

***Tabel 3.106.***
***Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Recana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | | | | | | | |
| | | | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata (%) | 100 | 95,27 | 95,27 | Mengusulkan adanya penambahan dana untuk program dan kegiatan dibidang pengembangan destinasi pariwisaa |
| | | | Program pemasaran pariwisata | Persentase peningkatan pelaksanaan pemasaran pariwisata (%) | 48,80 | 100 | 98,25 | Adanya pelaksanaan event dan promosi pariwisata secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan |

Sumber Data: Data Olah LKjIP Dinas Pariwisata Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.106. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan : Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat,** dengan indikator: **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD.**

Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata

## Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Tujuan : Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat**, dengan indikator: **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD.**

**Upaya perbaikan:**

1. Adanya peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata, berupa peningkatan tenaga kepariwisataan yang bersertifikasi dengan mewajibkan pengelola objek wisata untuk memiliki pemandu wisata dan tenaga lain yang bersertifikasi. Pemerintah perlu mendorong berdirinya lebih banyak Lembaga Sertfikasi Profesi (LSP) khusus untuk sektor pariwisata dengan kemudahan pemberian jin serta biaya pendirian yang murah. Di samping itu, peningkatan ketrampilan berbahasa asing khususnya bahasa inggeris bagi SDM yang bekerja di sektor pariwisata di daerah-daerah tujuan pariwisata yang terpencil juga perlu dilakukan;
2. Terlaksananya promosi pariwisata terhadap objek-objek wisata. pelaksanaan promosi objek wisata tersebut misalnya bisa dilakukan dengan menyusun booklet dan atau aplikasi digital tentang jumlah pengeluaran (uang) yang dibutuhkan untuk mengunjungi berbagai objek wisata. Booklet atau aplikasi digital tersebut;
3. Adanya peningkatan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bone; dan
4. Adanya perhatian baik dari para pemangku kepentingan dan masyarakat luas akan aspek lingkungan hidup dalam pengembangan sektor pariwisata di sekitar obyek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bone.

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 6.636.343.509.- (Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.107.**
**Realisasi Angaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021**

| URAIAN | JUMLAH (RP) ANGGARAN | % REALISASI |
|---|---|---|
| **Tujuan** : Mengembangkan Seni dan Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat | | |
| **Indikator Kinerja :** Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD | | |
| **Program** | | |
| • Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | 1.874.068.582 | 95,57% |
| • Program pemasaran pariwisata | 424.998.700 | 98,25% |

Sumber Data: Data Olah LKjIP Dinas Pariwisata Tahun 2021

**Sasaran 7.1. :**
**"Meningkatnya daya tarik pariwisata", dengan indikator:**
**Jumlah wisatawan**

Destinasi Wisata Togeo Beach, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone

Untuk pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2021, sebagai berikut:

**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.30.**
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

*Sumber Data: Data dari RPJMD-P Tahun 2018-2023 dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021*

Berdasarkan data gambar 3.30. di atas, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dari target sebanyak 516.000 orang dan dengan realisasi sebanyak 54.353 orang serta dengan capaian kinerja sebesar 10,53%. Jadi, sasaran strategis "Meningkatnya daya tarik pariwisata" serta dengan indikator kinerja "Jumlah wisatawan" pada tahun 2021 dapat dikategorikan Tidak Berhasil.

**2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

***Tabel 3.108.***
***Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone***

| Tujuan/Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | Data Awal 2018 | Realisasi kinerja | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya daya tarik pariwisata | Jumlah wisatawan | 131.000 Orang | 71.932 Orang | 48.768 Orang | 54.353 Orang | - | - | 54,90% | 37,22% | 41,49% | - | - |

*Sumber Data : Data dari RPJMD-P Tahun 2018-2023 dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2019 s/d 2021*

Berdasarkan data tabel 3.108. di atas, dapat dijelaskan bahwa, capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan sasaran strategis "Meningkatnya daya tarik wisata" serta dengan indikator kinerja "Jumlah wisatawan" pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 54.353 orang dengan capaian kinerja sebesar 41,49% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (tahun 2020) yang hanya sebanyak 48.692 orang dengan capaian kinerja 37,22%, sementara jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (tahun 2019) mengalami penurunan dengan jumlah realisasi sebanyak 71.932 orang dengan capaian kinerja sebesar 54,90%.

**3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah RPJMD**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 seperti dalam gambar di bawah ini:

*Gambar 3.31.*
*Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023*

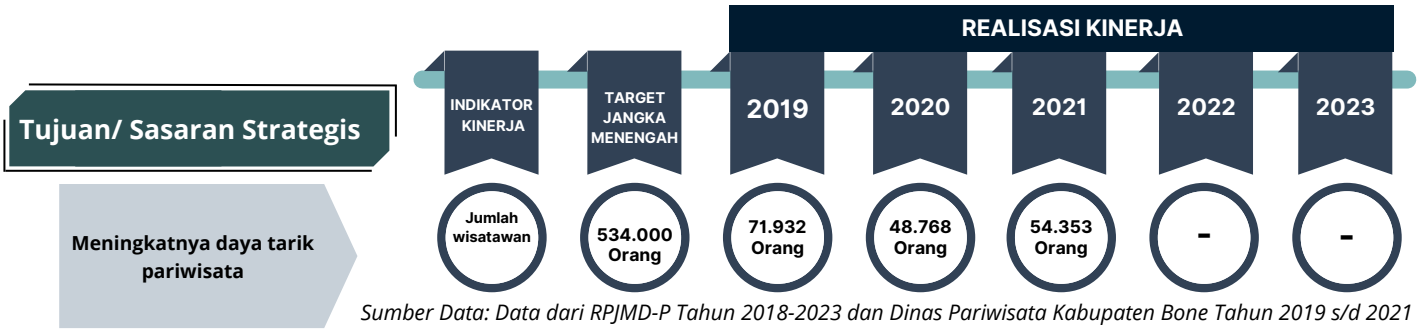


*Sumber Data: Data dari RPJMD-P Tahun 2018-2023 dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2019 s/d 2021*

** Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri*

Berdasarkan gambar 3.31. dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pelaksanaan tujuan "Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN" dengan indikator "nilai Indeks Reformasi Birokrasi" belum memenuhi target RPJMD, namun mengalami trend peningkatan dibandingkan dua tahun terakhir.

**4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana gambar berikut:

*Gambar 3.32.*

*Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya*

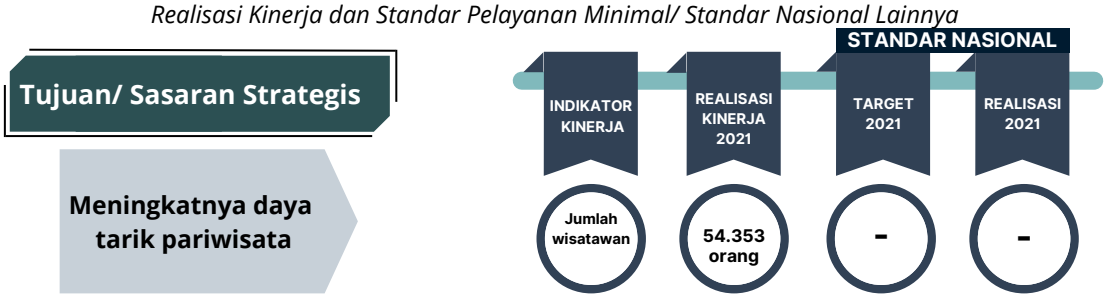


*Sumber Data: Daftar Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisnus dan Wisman) Tahun 2021*

Berdasarkan data gambar 3.32. di atas, dapat dijelaskan bahwa, dari sasaran strategis "Meningkatnya daya tarik pariwisata" serta dengan indikator kinerja "Jumlah wisatawan" dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebanyak 54.353 orang dan hasil perbandingan dari target dan realisasi standar pelayanan minimal (SPM) / standar pelayanan nasional adalah "Nihil" karena indikator tersebut di atas bukan merupakan standar pelayanan minimal (SPM) maupaun standar nasional.

**5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat gambar ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

*Gambar. 3.33.*

*Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021*

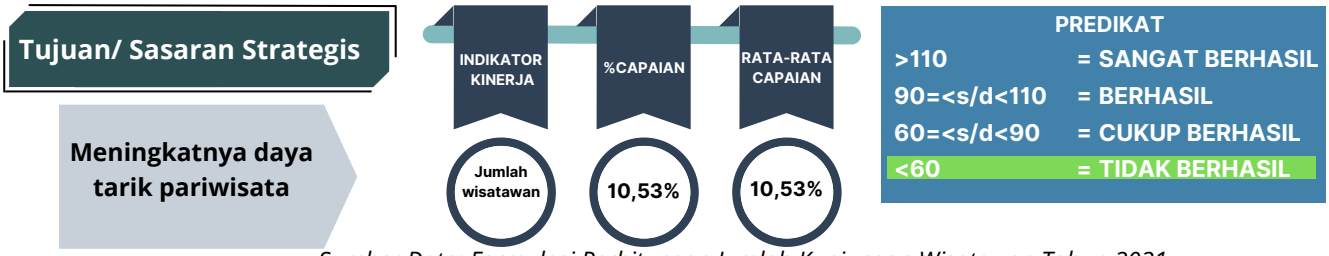


*Sumber Data: Formulasi Perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2021*

Berdasarkan data pada gambar 3.33. di atas, dapat dijelaskan bahwa dari sasaran strategis "Meningkatnya daya tarik pariwisata" serta dengan indikator kinerja "Jumlah wisatawan" dengan capaian kinerja sebesar 10,53% dan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 10,53% pada tahun 2021 dalam ikhtisar capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat dikategorikan Tidak Berhasil.

**Jumlah Wisatawan**

**Definisi :** Tidak Berhasil, Menggambarkan minat wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata masih rendah disebabkan pandemi covid-19 yang mengharuskan diterapkannya protokol kesehetan yang ketat dan ditambah dengan adanya rasa takut wisatawan akan bahaya penularan virus covid-19 di objek wisata yang ada di Kabupaten Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Jumlah Wisatawan dalam kategori tidak berhasil/tidak tercapai, hal ini karena:

- Penetapan target pasar wisata untuk wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara) yang masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara komprehensif.
- Penetapan fokus pasar yang belum mengacu pada analisis pasar wisata yang dilakukan secara berkala.
- Belum adanya pembobotan terhadap variabel yang menjadi penilaian dalam menentukan fokus pasar wisata untuk wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara).
- Masih kurangnya pusat informasi kepariwisataan yang masih bersifat parsial terbatas lokasi karena Pusat Informasi Kepariwisataan berskala nasional masih belum terbentuk.
- Belum meratanya pusat informasi kepariwisataan merupakan hal yang sangat penting bagi wisatawan dalam mengunjungi suatu destinasi pariwisata (kebutuhan pengisian bahan informasi pariwisata).

Pencapaian di atas tidak berhasil/tidak tercapai, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- Pengelolaan objek daya tarik wisata yang masih belum profesional.
- Budaya sadar wisata masyarakat yang masih di anggap rendah.
- Regulasi yang mengatur tentang kepariwisataan secara spesifik yang belum ada.
- Belum memadainya pusat informasi kepariwisataan yang ada sebagai media untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kepariwisataan di Kabupaten Bone.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.109.**
**Perbandingan Jumlah Wisatawan**
**(Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara) Tahun 2019 s/d 2023**

| Uraian | Target Jangka Mengah | Realisasi | | | | | Capaian Kinerja | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wisatawan Nusantara | 534.000 Orang | 71.873 Orang | 48.692 | 54.343 Orang | - | - | 13,45% | 9,11% | 10,17% | - | - |
| Wisatawan Nusantara | | 59 Orang | 76 Orang | 10 Orang | - | - | 0,011% | 0,014% | 0,001% | - | - |
| **Jumlah Wisatawan** | | **71.932 Orang** | **48.768 Orang** | **54.353 Orang** | - | - | **54,90%** | **37,22%** | **41,49%** | - | - |

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk meningkatkan Jumlah wisatawan antara lain:
Adanya penetapan pasar wisata yang terencana dengan baik dan yang mengacu pada riset pasar secara komprehensif dan mengacu pada anlisis pasar yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;

- Adanya pusat informasi kepariwisataan (Tourism Information Centre (TIC)) yang memadai dan bersifat parsial di setiap obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
- Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia pengelola kepariwisataan guna mewujudkan sumber daya masnuai yang lebih profesional;
- Pemeliharaan dan pengembangan obyek daya tarik wisata, agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung;
- Melaksanakan promosi kepariwisataan baik melalui media cetak, elektronik, media sosial dan penyelenggaraan event-event daerah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; dan
- Pembinaan terhadap aparat kepariwisataan desa yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya wisata pedesaaan di daerah.

### 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

***Tabel 3.110.***
***Efesiensi Penggunaan Sumber Daya***
***Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021***

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Sumber Daya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian% | Pagu | Realisasi | Capaian(%) | |
| a | b | c | d | e (d/c x 100%) | f | g | h (g/f x 100%) | i (e-h) |
| Meningkatnya daya tarik pariwisata | Jumlah wisatawan | 516.000 Orang | 54,353 Orang | 10,53 % | 2.299.067.282.- | 2.203.012.271.- | 193,31 % | (-) 182,78 % |

*Sumber Data : RPJMD-P Tahun 2018-2023 dan Laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 3.110. di atas, hasil dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

- Indikator kinerja "Jumlah wisatawan" dengan capaian kinerja sebesar 10,53% dan capaian anggaran sebesar (-) 182,78% menunjukkan tidak ada efesiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2021.

### 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

*Tabel 3.111.*
*Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja*

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Meningkatnya daya tarik pariwisata* | Jumlah wisatawan | 54.353 Orang | Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten | 100 | 95,27 | 95,27 | Mengusulkan adanya penambahan dana untuk program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata |
| | | | Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota | Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikelola | 100 | 95,06 | 95,06 | Adanya pengoptimalan dalam pengelolaan obyek daya tarik wisata |

| Tujuan/ Sasaran Starategis | Indikator Kinerja | CAPAIAN (%) | Program Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % | Capaian % | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub. kegiatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota | Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan | 100 | 95,06 | 95,06 | Adanya pengoptimalan dalam pengembangan obyek daya tarik wisata |
| | | | Kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/ kota | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di Kabupaten Bone | 100 | 99,87 | 99,87 | Adanya data base tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang ada di kabupaten bone |
| | | | Sub. kegiatan penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota | Jumlah layanan pendaftaran usaha pariwisata yang tersedia | 100 | 99,87 | 99,87 | Adanya proses penginventarisir tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang ada di kabupaten bone |
| | | | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per-kebangsaaan | 48,8 | 100 | 98,25 | Adanya pelaksanaan event dan promosi pariwisata secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan |
| | | | Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata kabupaten/ kota | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata | 100 | 98,25 | 98,25 | Adanya pengoptimalan dalam promosi dan pemasaran sektor pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, daya tarik wisata, dan kawasan strategis pariwisata |
| | | | Sub. kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri | Jumlah pembuatan majalah pariwisata dan film pendek pariwisata | 100 | 97,16 | 97,16 | Adanya upya pengoptimalan dalam promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri media elektronik |
| | | | Sub. kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota | Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi | 100 | 99,90 | 99,90 % | Adanya fasilitas yang memadai dari kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota |

Sumber Data: Laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.111. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang kebehasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Sasaran :** Meningkatnya daya tarik pariwisata, dengan indikator :

Jumlah wisatawan.

Indikator kinerja dapat terlaksana melalui program, kegiatan dan sub.kegiatan, sebagai berikut:

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata :

- Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota;
- Sub kegiatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- Kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/ kota;
- Sub kegiatan penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota

Program pemasaran pariwisata :

- Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata kabupaten/ kota;
- Sub. kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri; dan
- Sub. kegiatan Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota.

## Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran: Meningkatnya daya tarik pariwisata, dengan indikator :**

**Jumlah wisatawan**

**Upaya perbaikan :**

- Adanya pengoptimalan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bone baik dari infrastruktur/akses, sarana dan prasarana serta fasilitas;
- Adanya data base tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dan proses penginventarisir tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang ada di kabupaten bone, sebagai salah satu daya tarik wisata, seperti industri di sekor pariwisata (pusat kuliner, suvenir, dan yang lainnya);
- Adanya pelaksanaan event dan promosi pariwisata secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan (covid-19);
- Adanya pengoptimalan dalam upaya promosi dan pemasaran sektor pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, daya tarik wisata, dan kawasan strategis pariwisata yang ada di Kabupaten Bone,
- Adanya penguatan promosi pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti : booklet, majalah, website, dan media sosial/internet; dan
- Tersedianya fasilitas kegiatan promosi pemasaran pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti ; pelaksanaan dan keikutsertaan dalam event pariwisata dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, serta event pariwisata yang dilaksanakan di luar negeri.

## Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2021 dalam mewujudkan Misi 6 Kabupaten Bone **"Meningkatnya Budaya Politik, Penegakan Hukum dan Seni Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat" dengan tujuan "Mengembangkan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat"** dan dengan sasaran "Meningkatnya daya tarik wisata pariwisata" dan dengan indikator kinerja "Jumlah wisatawan" setelah perubahan sebesar Rp. 2.299.067.282- (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi capaian sebesar 193,52 % (Seratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Dua Persen), sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel. 3.112.**
**Realisasi Angaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021**

| Uraian | Jumlah (Rp) | |
|---|---|---|
| | Anggaran | % Realisasi |
| Sasaran :<br>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | | |
| Indikator :<br>Jumlah wisatawan | | |
| **Program** | | |
| • **Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata** | **1.874.068.582** | **95,27 %** |
| • Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota | 1.794.221.882 | 95,06 % |
| • Sub. kegiatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota | 1.794.221.882 | 95,06 % |
| • Kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) daerah kabupaten/ kota | 79.846.700 | 99,87 % |
| • Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota | 79.846.700 | 99,87 % |
| • **Program pemasaran pariwisata** | **424.998.700** | **98,25 %** |
| • Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata kabupaten/ kota | 424.998.700 | 98,25 % |
| • Sub. kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainya baik dalam dan luar negeri | 256.110.150 | 97,16 % |
| • Sub. kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota | 168.888.550 | 99,90 % |
| | **2.299.067.282** | **193,52 %** |

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kab. Bone Tahun 2021

# B. REALISASI ANGGARAN

## AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

### 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
2. mendayagunakan dana melalui pola deposito;
3. perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah;
4. intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga; dan
5. peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Bone lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.

Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.113.**
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**
**Per 31 Desember 2021**

| Uraian Pendapatan | Pagu Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **208.439.169.492,00** | **177.415.175.484,05** | **85,12** |
| Pajak Daerah | 55.452.080.493,00 | 60.489.214.171,00 | 109,08 |
| Retribusi Daerah | 27.226.049.400,00 | 19.289.033.385,00 | 70,85 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 15.036.211.026,00 | 13.683.335.633,00 | 91,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 110.724.828.573,00 | 83.953.592.295,05 | 75,82 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **2.013.060.742.466,00** | **1.975.622.618.985,00** | **98,14** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.856.843.116.967,00 | 1.843.769.419.189,00 | 99,30 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 156.217.625.499,00 | 131.853.199.796,00 | 84,40 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **146.847.928.811,00** | **148.553.294.762,00** | **101,16** |
| Pendapatan Hibah | 51.745.626.500,00 | 56.124.280.762,00 | 108,46 |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan | 95.102.302.311,00 | | |
| Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | 92.429.014.000,00 | 97,19 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | **2.368.347.840.769,00** | **2.301.591.089.231,05** | **97,18** |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2021

### 2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.114.**
**Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021**

| Uraian Belanja | Pagu Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **BELANJA DAERAH** | | | |
| **BELANJA OPERASI** | **1.715.682.811.033,00** | **1.612.490.669.459,28** | **93,99** |
| Belanja Pegawai | 976.333.887.255,00 | 936.625.135.866,28 | 95,93 |
| Belanja Barang Jasa | 698.219.605.335,00 | 647.320.033.179,00 | 92,71 |
| Belanja Bunga | 3.956.534.888,00 | 552.738.359,00 | 13,97 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 35.661.967.555,00 | 26.589.469.055,00 | 74,56 |
| Belanja Bantuan Sosial | 1.510.816.000,00 | 1.403.293.000,00 | 92,88 |
| **BELANJA MODAL** | **559.212.273.088,00** | **194.622.957.401,17** | **34,80** |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.991.685.603,00 | 67.743.514.178,00 | 94,10 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 43.534.773.182,00 | 38.469.944.801,00 | 88,37 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 427.287.785.877,00 | 73.420.894.118,17 | 17,18 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 16.398.028.426,00 | 14.988.604.304,00 | 91,40 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **12.500.000.000,00** | **7.485.833.539,00** | **59,89** |
| Belanja Tidak Terduga | 12.500.000.000,00 | 7.485.833.539,00 | 59,89 |
| **BELANJA TRANSFER** | 454.764.191.140,00 | 453.514.222.795,00 | 99,73 |
| Belanja Bagi Hasil | 8.267.813.040,00 | 8.238.542.989,00 | 99,65 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 446.496.378.100,00 | 445.275.679.806,00 | 99,73 |
| **JUMLAH BELANJA** | **2.742.159.275.261,00** | **2.268.113.683.194,45** | **82,71** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(373.811.434.492,00)** | **33.477.406.036,60** | **(8,96)** |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2021

### 3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.115.**
**Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021**

| Uraian Belanja | Pagu Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **388.069.408.492,00** | **89.259.917.343,23** | **23,00** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 89.291.917.343,00 | 89.259.917.343,23 | 99,96 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 298.777.491.149,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **14.257.974.000,00** | **14.999.257.974,00** | **105,20** |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 14.257.974.000,00 | 14.999.257.974,00 | 105,20 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **373.811.434.492,00** | **74.260.659.369,23** | **19,87** |
| **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** | **0,00** | **107.738.065.405,83** | **100,00** |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2021

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# BAB 4

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
## B. REALISASI ANGGARAN

# BAB IV
# PENUTUP

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada sasaran strategis yang mengacu pada target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa berbagai upaya keras telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai target dan prioritas pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2021, yang mencakup juga penentuan program dan kegiatan serta alokasi anggarannya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bone Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bone telah memperlihatkan pencapaian kinerja sebesar 91.73% atau kategori Berhasil dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi telah mendapatkan nilai B (kategori Baik).

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bone yang menggambarkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone.

Watampone, 28 Maret 2022
BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si